

Rencana Strategis

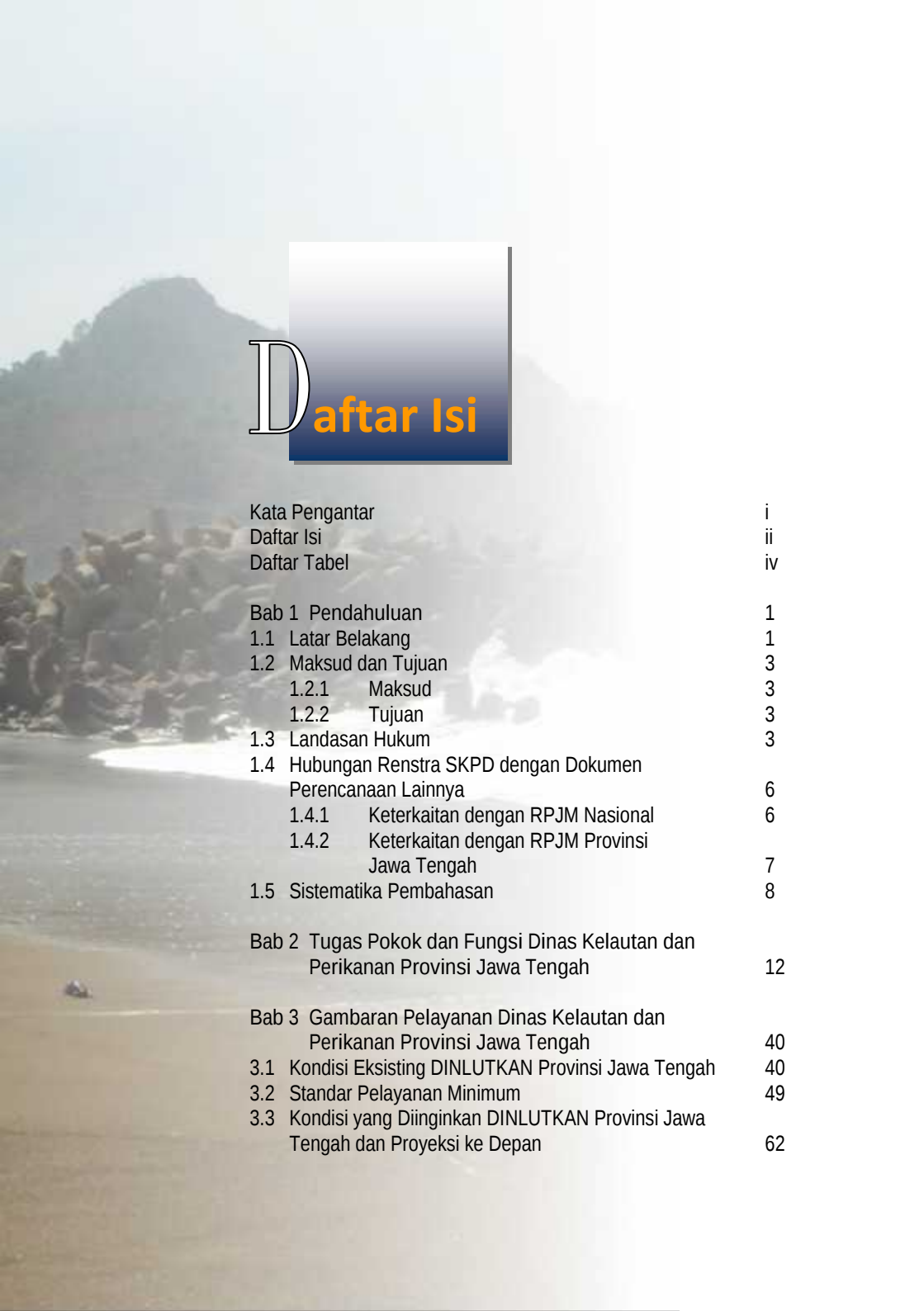
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Provinsi Jawa Tengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Dinas Kelautan dan Perikanan

Jl. Imam Bonjol No. 134 Telp. (024) 3546489 - 3546607 Fax. (024) 3551289
E-mail : diskanlut_jateng@hotmail.com
Semarang - 50132



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.2.1 Maksud	3
1.2.2 Tujuan	3
1.3 Landasan Hukum	3
1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
1.4.1 Keterkaitan dengan RPJM Nasional	6
1.4.2 Keterkaitan dengan RPJM Provinsi Jawa Tengah	7
1.5 Sistematika Pembahasan	8
Bab 2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	12
Bab 3 Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	40
3.1 Kondisi Eksisting DINLUTKAN Provinsi Jawa Tengah	40
3.2 Standar Pelayanan Minimum	49
3.3 Kondisi yang Diinginkan DINLUTKAN Provinsi Jawa Tengah dan Proyeksi ke Depan	62

Bab 4 Isu-isu Strategis	70
4.1 Potensi	70
4.2 Permasalahan	75
4.3 Peluang	77
 Bab 5 Visi, Misi dan Nilai-nilai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	 79
5.1 Visi	79
5.2 Misi	79
5.3 Nilai-nilai	80
 Bab 6 Faktor-faktor Kunci Keberhasilan	 81
6.1 Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dan Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE)	81
6.1.1 Faktor Internal	82
6.1.2 Faktor Eksternal	83
6.2 Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE)	84
6.3 Penetapan Asumsi Strategis KAFI dan KAFE melalui Analisis SWOT	89
6.4 Penetapan Prioritas Asumsi Strategis Berdasarkan Tingkat Keterkaitan Dengan Visi, Misi Dan Nilai-Nilai	94
6.5 Penetapan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK)	104
 Bab 7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	 107
7.1 Tujuan dan Sasaran	107
7.2 Strategi	115
7.3 Kebijakan	116
 Bab 8 Rencana Program/Kegiatan, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif dan Indikator Kinerja	 118
 Bab 9 Penutup	 185
 Lampiran	 188



Daftar Tabel

Tabel 3.1.	Standar Pelayanan Minimal dan Hasil Capaian Kinerja saat ini	49
Tabel 3.2.	Standar Pelayanan Minimal Dan Ekspektasi Kinerja Yang Ingin Dicapai	64
Tabel 6.1.	Format KAFI dalam Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah tahun 2008 - 2013	85
Tabel 6.2.	Format KAFE dalam Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah tahun 2008 - 2013	87
Tabel 6.3.	Analisis SWOT Dalam Rangka Menentukan Asumsi Strategis Pada Rencana Strategis Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013	90
Tabel 6.4.	Penetapan Urutan Pilihan Asumsi Strategik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013	95
Tabel 8.1	Matriks Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013	119
Tabel 8.2	Matriks Program Lima Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013	145
Tabel 8.3	Matriks Program Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013	166

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dampak arus globalisasi yang makin meluas, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, serta karakteristik sumberdaya kelautan dan perikanan, akan berpengaruh pula pada pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah. Dengan demikian, perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan tidak dapat dilepaskan dan harus mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Sektor kelautan dan perikanan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan sektor lain, khususnya sumberdaya perikanan laut yang pada hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Sumberdaya perikanan laut tropis memiliki banyak spesies yang relatif terbatas jumlahnya.

Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kedepan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan. Untuk itu diperlukan adanya dukungan IPTEK, sumberdaya manusia yang berkualitas, kerja sama antar instansi / lembaga pemerintah lainnya, kemitraan



Produksi perikanan (penangkapan)
di TPI Sarang Rembang

pemerintah dan swasta, serta pelaksanaan peraturan per-undang-undangan yang mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.



Aktivitas pengolahan hasil perikanan di pesisir Kabupaten Demak

Di sisi lain, pembangunan kelautan dan perikanan Jawa Tengah masih memerlukan perhatian seperti rendahnya eksploitasi sumberdaya ikan demersal di Laut Jawa, belum optimalnya pemanfaatan perairan ZEE di Selatan Jawa Tengah, belum dimanfaatkannya berbagai organisme laut sebagai sumber bahan industri bio-farmasi, kimia, pertanian maupun jasa lingkungan dan belum optimalnya waduk/bendungan sebagai lahan budi-daya ikan dan penangkapan.



Sumber daya pesisir non perikanan (garam) di sepanjang pesisir Kabupaten Rembang

Dalam upaya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah sesuai dengan potensinya tersebut, maka diperlukan suatu model perencanaan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan nasional dan regional dalam bentuk Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan

Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2008 – 2013, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok fungsi dan sasaran pembangunan kelautan perikanan yang berpedoman kepada RPJMD Jawa Tengah 2008 - 2013.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan rencana kegiatan jangka menengah untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berdasarkan RPJMD 2008 - 2013.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Usaha Perikanan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun

- 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
 22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 – 2008;
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perijinan Usaha Perikanan;
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 29. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.82 Tahun 2007 tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur No.30 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 82 Tahun 2007 tentang Program Indikatif Provinsi Jawa Tengah;
 30. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
 31. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; dan

32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PPRB) Provinsi Jawa Tengah.

1.4 Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

a. Keterkaitan dengan RPJM Nasional

Rencana Strategis Pembangunan Departemen Kelautan dan Perikanan dihasilkan melalui penyerasian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 - 2014, Visi, Misi Departemen Kelautan dan Perikanan dan Renstra sebelumnya serta pengejawantahan ke dalam visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2008 - 2013 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang semakin Sejahtera".

Terkait dengan hal tersebut, peningkatan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah memerlukan re-orientasi kebijakan pembangunan yang mengarah kepada pembangunan pedesaan. Pokok-pokok pikiran "Bali Ndeso, Mbangun Deso" diharapkan dapat dipahami secara utuh baik dari segi filosofi dan pengertian "Bali Ndeso Mbangun Deso" yang merupakan implementasi dari visi dan misi Gubernur terpilih dalam melaksanakan pembangunan Jawa Tengah tahun 2008 - 2013. Program disusun berdasarkan usulan dari unit kerja, yang selanjutnya disusun berdasarkan bidang kewenangan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Setiap unit kerja dituntut kinerjanya sesuai dengan format AKIP-LAKIP, untuk dipertanggungjawabkan kepada publik. Indikator makro merupakan pengerucutan dan interaksi berbagai kinerja unit kerja, sehingga indikator makro adalah pencapaian sasaran strategis.

Dalam periode lima tahun ke depan, kondisi yang diinginkan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah sebagai berikut: "Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK serta memperkuat daya saing perekonomian". Sedangkan Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan RPJMN tahun 2010 – 2014 sbb:

- Meningkatkan upaya pemeliharaan keamanan nasional / pengamanan kekayaan SDA Nasional, termasuk di wilayah laut;

- Peningkatan Pembangunan Kelautan secara Terpadu, termasuk pengembangan IPTEK Kelautan; dan
- Pengembangan industri Kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumberdaya mineral secara sinergi, optimal dan berkelanjutan.

b. Keterkaitan dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2008 – 2013 disusun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025. Dasar pertimbangan ditetapkannya RPJPD Prov. Jawa Tengah Tahun 2005–2025 sebagai Peraturan Daerah adalah sebagai berikut : (1). Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional yang disusun dalam jangka panjang, menengah dan pendek; (2). Untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan nasional, maka perlu disusun RPJPD kurun waktu 20 tahun; (3). Untuk melaksanakan Pasal 13 ayat (2) UU 25/2004 dan Pasal 1 UU 17/2007, RPJPD merupakan dokumen Perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun terhitung 2005 sampai dengan 2025 yang ditetapkan dengan PERDA.

Tujuan Ditetapkannya Perda Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2008 Tentang RPJPD Prov. Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut : (1). Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah; (2). Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antar Pusat dan daerah; (3). Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (4). Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan serta (5).Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2008, RPJP-D Provinsi Jawa Tengah 2005-2025 digunakan sebagai : (a). landasan dan pedoman

bagi PEMDA dalam melaksanakan pembangunan sejak tahun 2005 sampai dengan 2025 (Pasal 3); (b).pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Gubernur (Pasal 5 ayat 2); (c) acuan bagi Pemerintah Kab./Kota dalam menyusun RPJPD Kab./Kota yang memuat visi, misi dan arah pembangunan kurun waktu 2005-2025.

Tahapan dan Skala Prioritas Pembangunan Daerah: RPJMD I (2005 – 2009) : pemerataan akses pelayanan dasar, peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi rakyat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan serta pengelolaan Sumber Daya Alam.

RPJMD II (2010 – 2014) : Peningkatan kualitas pelayanan dasar, Peningkatan daya saing ekonomi rakyat, Peningkatan tata kelola pemerintahan serta kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam.

RPJMD III (2015 – 2019) : pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat Jawa Tengah yang berlandaskan pada keunggulan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, kondusivitas wilayah yang makin mantap serta kemampuan IPTEK yang makin meningkat.

RPJMD IV (2020 – 2024) : akselerasi pembangunan. di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Jawa Tengah yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya sebagaimana telah ditentukan dalam Perda No. 3 Tahun 2008, penyusunan Renstra – SKPD harus berpedoman terhadap RPJM Daerah, maka Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 tersebut.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dokumen Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya Renstra yang diawali dengan uraian singkat tentang latar belakang kondisi sektor Kelautan dan Perikanan secara Nasional dan Regional Jawa Tengah, termasuk permasalahan dan strategi umum pengelolaannya. Selain itu, dimuat pula tentang landasan hukum penyusunan Renstra, keterkaitan dengan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah 2008 – 2013, serta uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra ini.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini memuat rumusan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, termasuk Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan, Tugas dan Fungsi serta hal-hal lain yang dianggap penting bagi setiap personil dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pengabdianya.

BAB III GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini memuat kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah saat ini, termasuk di dalamnya kesesuaian tugas dan fungsi berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja. Hal lain yang dibahas pada bab ini adalah gambaran kondisi yang diinginkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan proyeksi ke depan, berupa Standar Pelayanan Minimum dan Hasil Kerja yang ingin dicapai.

BAB IV ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini memuat isu-isu strategis berupa kendala, peluang dan program-program prioritas dalam penanganan kendala dan pemanfaatan peluang yang ada dalam optimalisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

BAB V VISI, MISI DAN NILAI-NILAI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

Bab ini memuat Visi (rumusan tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode), Misi (rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi) dan Nilai-Nilai yang dianut dan digunakan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VI FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN,

Bab ini memuat analisa Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dan Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE), Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAPE), penetapan asumsi strategis KAFI dan KAPE melalui Analisis SWOT, penetapan prioritas asumsi strategis berdasarkan tingkat keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai dan penetapan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK) sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan pencapaian program melalui perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan .

BAB VII TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini memuat rumusan tujuan (penjabaran dari visi yang lebih spesifik dan terukur), sasaran agregat bidang yang mendukung sasaran Dinas, strategi mewujudkan tujuan secara konseptual, analitis, realistis dan komprehensif dan diwujudkan oleh kebijakan sebagai penentu konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan, berdasarkan dari faktor-faktor kunci keberhasilan.

BAB VIII PENTAHAPAN PENCAPAIAN PROGRAM (KEGIATAN)

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, penjelasan prioritas-prioritas program, kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya yang sah dalam periode 5 (lima) tahun dan tahunan serta indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berupa refleksi capaian prioritas program dan kegiatan yang telah direncanakan serta terukur. Indikator-

indikator kinerja tersebut berupa angka, prosentase dan penjelasan naratif.

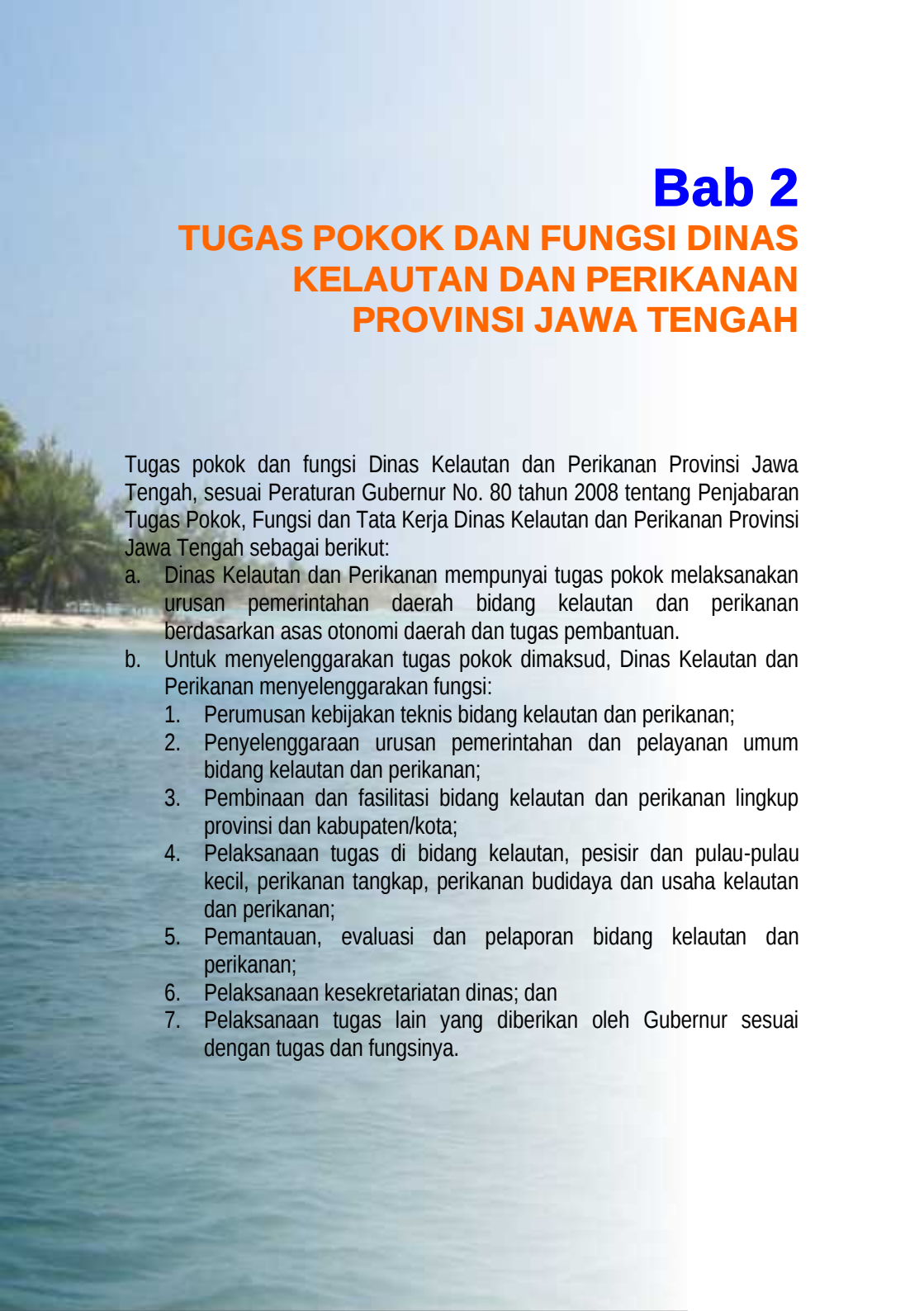
BAB IX PENUTUP

Bab ini memuat penegasan fungsi renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, yaitu sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, implementasi penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan, serta memuat pula catatan dan harapan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN

Berisi tentang lampiran-lampiran sebagai berikut:

1. Data Perkembangan Kegiatan Perikanan tahun 2000 - 2008;
2. Data Perkembangan Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya tahun 2000 - 2008;
3. Data Sasaran Kegiatan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2013;
4. Data Sasaran Kegiatan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2013; dan
5. Data Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Jawa Tengah 2009 – 2013.



Bab 2

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur No. 80 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang kelautan dan perikanan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kelautan dan perikanan;
 3. Pembinaan dan fasilitasi bidang kelautan dan perikanan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
 4. Pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, perikanan tangkap, perikanan budidaya dan usaha kelautan dan perikanan;
 5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelautan dan perikanan;
 6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh struktur/susunan organisasi sebagai berikut:

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin tugas pokok dan fungsi, sebagaimana tersebut di atas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1.A. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program;
- 1.B. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan;
- 1.C. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian;
- 1.D. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan:

1. Subbagian Program:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, meliputi: koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi

dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi di lingkungan Dinas.

2. Subbagian Keuangan:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

C. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana dan program bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis, fasilitasi dan kerjasama, pemantauan dan evaluasi kegiatan Bina Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan; serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan rencana dan program Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis kegiatan Bina Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan; serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan;

3. Penyiapan bahan pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama kegiatan Bina Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan; serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan;
4. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan Bina Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil; Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan; serta Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, membawahkan:

1. Seksi Bina Pesisir Laut dan Pulau-pulau Kecil:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina pesisir laut dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
 - Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan tata ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi;
 - Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi;
 - Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;
 - Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan di wilayah laut kewenangan provinsi;
 - Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah laut kewenangan provinsi;
 - Pelaksanaan penyerasian dan pengharmonisasian pengelolaan wilayah dan sumberdaya laut kewenangan provinsi;
 - Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di wilayah kewenangan provinsi;

- Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa, dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi;
- Perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang laut wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan zonasi dan tata ruang perairan dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi;
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Seksi Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumberdaya Kelautan:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi, pengendalian ekosistem dan sumberdaya kelautan, meliputi:

- Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia;
- Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar kabupaten/kota di wilayah laut provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi, pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi, rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi;

- Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi dan lingkungan sumberdaya ikan di wilayah kewenangan provinsi;
- Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan dan lingkungannya.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Jasa Kelautan.

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan jasa kelautan, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kabupaten/kota dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan dan koordinasi penyerasian riset kelautan di wilayah kewenangan laut provinsi dalam rangka pengembangan jasa kelautan;
- Pelaksanaan pengawasan dan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangannya dengan pemerintah dan kabupaten/kota;
- Pelaksanaan koordinasi pengelolaan jasa kelautan dan kemaritiman di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan perijinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan provinsi;
- Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

D. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap, sarana perikanan tangkap dan pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perikanan tangkap;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:

1. Seksi Prasarana Perikanan Tangkap:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap, meliputi:
 - Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan provinsi;
 - Penetapan petunjuk pembangunan tipe pelabuhan perikanan, penyusunan data fasilitas pelabuhan perikanan Jawa Tengah (fasilitas pokok, fungsional dan penunjang);
 - Penetapan petunjuk pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah;
 - Inventarisasi data kebutuhan pengembangan pelabuhan perikanan;
 - Penyusunan analisa data kebutuhan pengembangan pelabuhan perikanan;

- Usulan rencana pengembangan pelabuhan perikanan jangka pendek dan jangka panjang;
- Penyusunan rencana pembangunan pelabuhan perikanan;
- Evaluasi pelaksanaan pengembangan pelabuhan perikanan;
- Inventarisasi dan evaluasi lokasi pelabuhan perikanan yang akan diidentifikasi;
- Usulan tata cara identifikasi pembangunan pelabuhan perikanan;
- Analisis dan evaluasi kegiatan identifikasi pengembangan pelabuhan perikanan;
- Analisis dan evaluasi usulan rencana induk pengembangan pelabuhan perikanan;
- Pelaksanaan pengembangan pelabuhan perikanan;
- Analisis lokasi / site pelabuhan perikanan yang akan dibangun;
- Usulan kerangka acuan studi kelayakan dan studi teknis pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep tata cara pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan bahan supervisi pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan bahan analisa dan evaluasi studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep usulan pentahapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan;
- Usulan kerangka acuan rancang bangun pelabuhan perikanan;
- Usulan tata cara pelaksanaan pembuatan rancang bangun pelabuhan perikanan yang akan dibangun;
- Penyusunan bahan supervisi pelaksanaan pembuatan rancang bangun pembangunan pelabuhan perikanan;
- Analisis dan evaluasi hasil pembuatan rancang bangun pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep rencana pentahapan pelaksanaan konstruksi pelabuhan perikanan;

- Bimbingan pelaksanaan rancang bangun pelabuhan perikanan;
- Pengumpulan data/informasi serta penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan laporan hasil pembangunan pelabuhan perikanan;
- Pemantauan pelaksanaan pelayanan teknik pembangunan pelabuhan perikanan;
- Penyusunan petunjuk persiapan operasional pelabuhan perikanan;
- Usulan bimbingan pelaksanaan operasional pelabuhan perikanan;
- Evaluasi dan analisis kegiatan operasional pelabuhan perikanan;
- Usulan tata cara kerjasama operasional pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep usulan perjanjian kerjasama operasional pelabuhan perikanan;
- Penyusunan bahan informasi/data pembangunan dalam rangka promosi investasi dan kerjasama operasional pelabuhan perikanan;
- Pengusulan tata cara pemantauan operasional pelabuhan perikanan;
- Penyusunan bahan evaluasi operasional pelabuhan perikanan;
- Penyusunan konsep pelaporan pengelolaan pelabuhan perikanan;
- Pemantauan pemanfaatan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan.

2. Seksi Sarana Perikanan Tangkap:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perikanan tangkap, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan;
- Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT s.d. 30 GT;
- Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat tangkap ikan;

- Dukungan dalam penetapan kebijakan produktivitas kapal penangkap ikan;
 - Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan;
 - Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT s.d. 30 GT;
 - Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi;
 - Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi;
 - Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan;
 - Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
 - Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi.
3. Seksi Pengawasan dan Pengelolaan Sumber daya Ikan:
 Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan, meliputi:
- Pengelolaan dan pemanfaatan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
 - Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah perairan kewenangan provinsi;
 - Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/kota;
 - Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi;
 - Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi;
 - Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi;
 - Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan antar kabupaten/kota;

- Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi.

E. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, pengelolaan budidaya air payau dan laut, serta pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air payau dan laut;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Budidaya Air Tawar:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, meliputi:
 - Pelaksanaan kebijakan produk perikanan di air tawar;
 - Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar;
 - Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan air tawar;
 - Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan air tawar;

- Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk /benih ikan air tawar;
- Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk per jenis, induk dasar dan benih alam air tawar;
- Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan air tawar;
- Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan air tawar;
- Pembinaan pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan air tawar;
- Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya air tawar.

2. Seksi Pengelolaan Budidaya Air Payau dan Laut:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan produk perikanan di air payau dan laut;
- Pelaksanaan kebijakan, pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air payau dan laut;
- Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan air payau dan laut;
- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan air payau dan laut;
- Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk /benih ikan air payau dan laut;
- Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk perjenis, induk dasar dan benih alam air payau dan laut;
- Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan air payau dan laut;
- Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan air payau dan laut;
- Pembinaan pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan air payau dan laut;

- Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya air payau dan laut.

4. Seksi Pengelolaan Sumber daya Perikanan Budidaya:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan;
- Pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan biologis dan pakan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor-impor induk dan benih ikan;
- Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan air tawar;
- Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, peredaran dan/atau pemeliharaan ikan lintas kabupaten/kota;
- Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
- Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota;
- Koordinasi dan pengembangan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan;
- Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota;

- Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung (KJA) di perairan umum (PU) lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi;
- Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi;
- Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

F. Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang usaha perikanan, pengolahan hasil dan pemasaran, dan pengembangan SDM serta kelembagaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha perikanan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil dan pemasaran;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan Kelembagaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan membawahkan:

1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha perikanan, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi;

- Pemberian ijin penangkapan dan / atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT s.d. 30 GT serta tidak menggunakan tenaga kerja asing;
- Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi;
- Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan skala menengah yang tidak menggunakan tenaga kerja asing di wilayah provinsi.

2. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran:

Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil dan pemasaran, meliputi:

- Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan;
- Pelaksanaan kebijakan mutu di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai dengan prinsip PMMT atau HACCP;
- Pelaksanaan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi di bidang perikanan tangkap kewenangan provinsi;
- Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerjasama kemitraan usaha pembudidayaan ikan;
- Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya;
- Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan;
- Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik, cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya, serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- Pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan;

- Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan;
 - Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi;
 - Akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan;
 - Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan.
3. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Kelembagaan:
 Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan kelembagaan, meliputi:
- Penetapan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan;
 - Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan usaha kelautan dan perikanan di provinsi;
 - Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi;
 - Peragaan penyebaran dan bimbingan penerapan teknologi perikanan;
 - Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistikserta informasi bidang perikanan diwilayah laut kewenangan provinsi;
 - Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi.

G. UPTD- LPPMHP

UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Semarang;
- b. Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Pekalongan; dan
- c. Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Cilacap.

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Jawa Tengah di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan serta pengawasan pengolahan hasil perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-LPPMHP mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana dan program kegiatan pengujian mutu hasil perikanan;
2. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana untuk pengujian mutu hasil perikanan;
3. Pelaksanaan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan.

Struktur Organisasi UPT sebagai berikut:

- a. Kepala Laboratorium;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian; dan
- d. Seksi Pengawasan Mutu.

Penjabaran tugas UPT-UPT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

- Penyiapan bahan rencana dan program kerja;
- Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup Laboratorium;
- Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup Laboratorium;
- Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan Laboratorium; dan
- Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan Laboratorium.

b) Seksi Pengujian

- Penyusunan rencana dan program kegiatan pengujian mutu hasil perikanan;
- Penyusunan perencanaan kebutuhan perangkat keras dan lunak untuk program pengujian mutu hasil perikanan;
- Penyiapan dan pengumpulan data serta bahan untuk pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan;
- Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan secara mikrobiologi, organoleptik dan kimia;
- Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan pengujian mutu terhadap produk pengolahan;
- Pemeliharaan dan perawatan, bahan kimia dan media pengujian;
- Pelaksanaan fungsi Manajerial Teknis sesuai SNI 19-17025-2000 (ISO Guide 17025) sebagai laboratorium terakreditasi; dan
- Pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar.

c) Seksi Pengawasan Mutu

- Pengumpulan dan inventarisasi data usaha pengolahan hasil perikanan tradisional maupun modern;
- Pelaksanaan pengawasan pada unit usaha pengolahan hasil perikanan tradisional dan modern;
- Monitoring dan evaluasi secara berkala pada unit usaha pengolahan hasil perikanan tradisional dan modern;
- Pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh pengujian; dan
- Pelaksanaan fungsi Deputy Manajerial Mutu sesuai SNI 19-17025-2000 (ISO Guide 17025) sebagai laboratorium terakreditasi.

H. UPTD-PPP

Unit Pelaksana Teknis - PPP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal;
- b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Kab. Pati;

- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak Kab. Demak;
- d. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto Kab. Pekalongan;
- e. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asemdayong Kab. Pemalang;
- f. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor Kab. Batang;
- g. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kab. Rembang;
- h. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang Kab. Kendal; dan
- i. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa Kab. Jepara.

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas pokok:

- 1. Melaksanakan fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayah kerjanya
- 2. Pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-PPP mempunyai fungsi :

- 1. Perencanaan pengembangan, pemeliharaan serta pemanfaatan sarana prasarana pelabuhan perikanan;
- 2. Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan pelabuhan perikanan;
- 3. Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran pelabuhan perikanan; dan
- 4. Melakukan pemberian pelayanan kapal dan keselamatan pelayaran, pengumpulan data dan penyusunan laporan.

Struktur Organisasi UPT sebagai berikut:

- 1. Kepala Pelabuhan;
- 2. Subbagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Tata Pengusahaan; dan
- 4. Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran.

Penjabaran tugas UPT-UPT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

- 1) Penyiapan bahan rencana dan program kerja;
- 2) Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup PPP;

- 3) Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup PPP;
- 4) Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan PPP; dan
- 5) Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan PPP.

b) Seksi Tata Pengusahaan

- 1) Penyiapan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan;
- 2) Pemeliharaan sarana pelayaran;
- 3) Pelayanan jasa;
- 4) Pengelolaan keamanan;
- 5) Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan;
- 6) Pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan; dan
- 7) Koordinasi pengawasan penangkapan dan mutu hasil perikanan.

c) Seksi Tata Pelayanan dan Kesyahbandaran

- 1) Perencanaan pengembangan pemeliharaan, serta pemanfaatansarana pelabuhan perikanan;
- 2) Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan berupa penerbitan surat ijin berlayar (SIB);
- 3) Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan;
- 4) Pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan;
- 5) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemrosesan hasil perikanan;

- 6) Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan pengolahan, pemasaran dan mutu hasil perikanan;
- 7) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta statistik perikanan;
- 8) Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya;
- 9) Pemanfaatan wilayah pesisir dan fasilitas Wisata Bahari; dan
- 10) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

I. UPTD-Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan (BBI)

Unit Pelaksana Teknis-BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar
- b. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan perbenihan dan budidaya ikan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-BPBI mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis perbenihan dan budidaya ikan;
3. Pelaksanaan fasilitasi teknis unit perbenihan dan budidaya ikan milik rakyat;
4. Penyediaan benih dan calon induk ikan unggul;
5. Pelaksanaan kaji terap teknologi baru perbenihan dan budidaya ikan;
6. Penyediaan dan penebaran benih ikan di perairan umum;
7. Pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan;
8. Pelaksanaan sertifikasi benih dan induk ikan unggul;

9. Pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan dan pengembangan budidaya ikan;
10. Pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas; dan
11. Pengelolaan ketatausahaan.

Struktur Organisasi UPT sebagai berikut:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pelayanan Teknis; dan
4. Seksi Standarisasi dan Informasi.

Penjabaran tugas UPT-UPT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

- 1) Penyiapan bahan rencana dan program kerja;
- 2) Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup Balai;
- 3) Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup Balai;
- 4) Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan Balai; dan
- 5) Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan Balai.

b) Seksi Pelayanan Teknis

- 1) Pelaksanaan identifikasi pasar/permintaan benih/induk;
- 2) Perencanaan komoditas yang diproduksi secara kualitatif/kuantitatif;
- 3) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana produksi;
- 4) Penyusunan panduan mutu;
- 5) Pelaksanaan proses produksi dengan mentaati panduan mutu;

- 6) Pelaksanaan audit internal produksi;
 - 7) Pelaksanaan proses sertifikasi; dan
 - 8) Pelaksanaan pembinaan pembenihan dan budidaya.
- c) Seksi Standarisasi dan Informasi
- 1) Identifikasi teknologi perbenihan dan budidaya;
 - 2) Pelaksanaan kaji terap teknologi;
 - 3) Perumusan hasil kaji terap;
 - 4) Sosialisasi pengembangan teknologi;
 - 5) Pembinaan pengembangan teknologi di kabupaten/kota; dan
 - 6) Perumusan standar teknologi.

J. Balai Karantina dan Kesehatan Ikan

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, menganalisis, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit serta karantina ikan dalam rangka melindungi sumberdaya ikan dan lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-BKKI mempunyai fungsi :

- 1. Mengupayakan pencegahan masuk dan keluarnya hama dan penyakit ikan atau organisme pengganggu;
- 2. Melakukan pengawasan keluar-masuknya ikan;
- 3. Melakukan pemeriksaan keluar-masuknya ikan;
- 4. Standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; dan
- 5. Melakukan pembinaan kepada masyarakat tentang karantina dan kesehatan ikan.

Struktur Organisasi UPT sebagai berikut:

- 1. Kepala Balai;
- 2. Subbagian Tata Usaha;
- 3. Seksi Pengawasan; dan
- 4. Seksi Pengujian.

Penjabaran tugas UPT-UPT tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a) Subbagian Tata Usaha

- 1) Penyiapan bahan rencana dan program kerja;
- 2) Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup Balai;
- 3) Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup Balai;
- 4) Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan Balai; dan
- 5) Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan Balai.

b) Seksi Pengawasan

- 1) Pelaksanaan pengendalian penyakit dan pengobatan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan peredaran pestisida, bahan kimia maupun obat-obatan yang digunakan kegiatan perikanan budidaya;
- 3) Penilaian kelayakan Laboratorium Hama Penyakit Ikan;
- 4) Monitoring dan surveillance Hama Penyakit Ikan;
- 5) Analisa resiko akibat hama penyakit ikan;
- 6) Pengawasan lalu lintas media pembawa hama penyakit ikan;
- 7) Monitoring residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan ikan; dan
- 8) Pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat (petani, nelayan, siswa/mahasiswa, dll.).

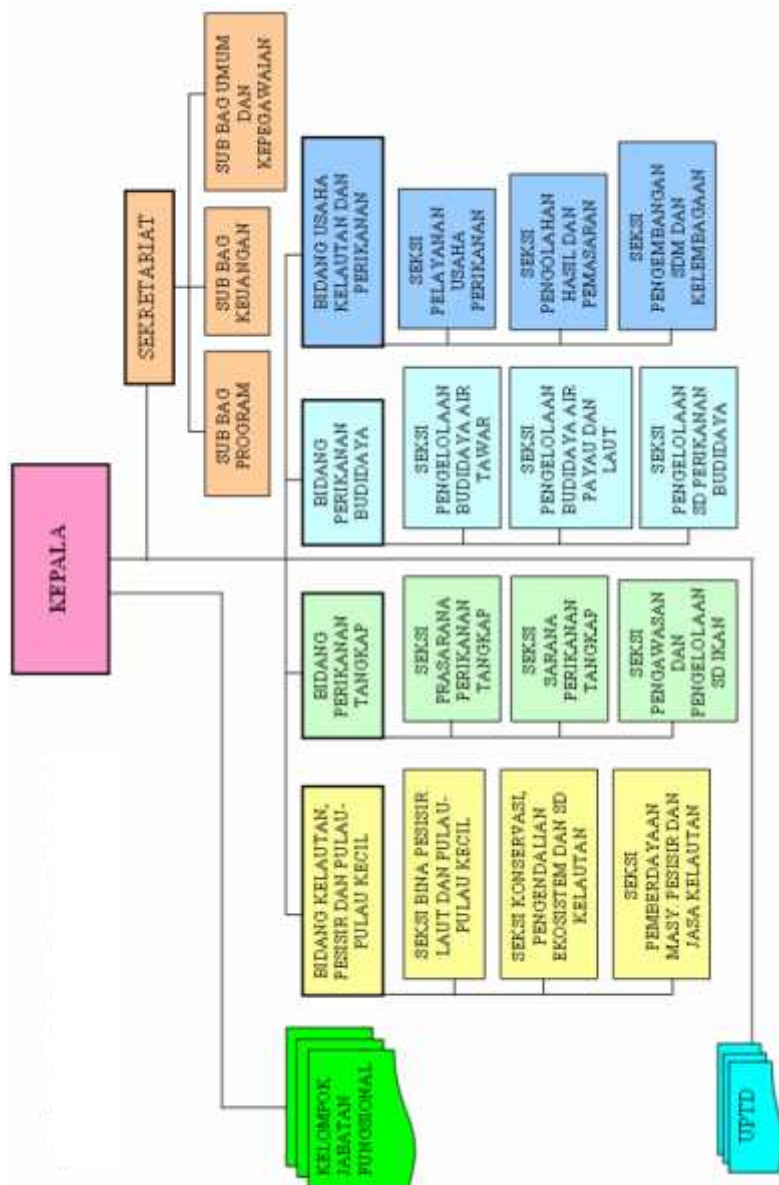
c) Seksi Pengujian

- 1) Penyusunan bahan informasi tentang Penyakit Ikan;
- 2) Visualisasi dan dokumentasi tentang Hama Penyakit Ikan;
- 3) Pengujian obat-obatan ikan;

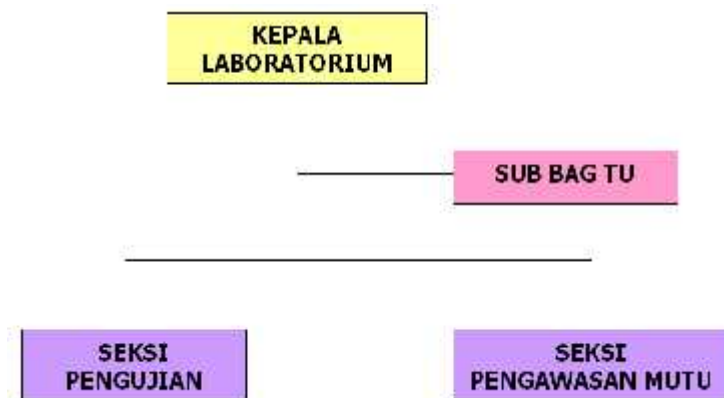
- 4) Penelitian dan perekayasaan di bidang pengendalian Hama Penyakit Ikan;
- 5) Penyusunan konsep naskah perundangan/kebijakan tentang Hama Penyakit Ikan;
- 6) Standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- 7) Sertifikasi kesehatan ikan;
- 8) Analisa dan evaluasi kerugian budidaya akibat Hama Penyakit Ikan;
- 9) Pemeriksaan penyakit ikan (virus, bakteri, parasit, jamur);
- 10) Analisa residu pestisida/obat-obatan dan bahan kimia lainnya; dan
- 11) Penyusunan laporan dan rencana kerja laboratorium.

K. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat, Bidang-bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Usaha Kelautan dan Perikanan, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :



Sumber: 2.1. BAGAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH



Bagan Organisasi UPT Lab. Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



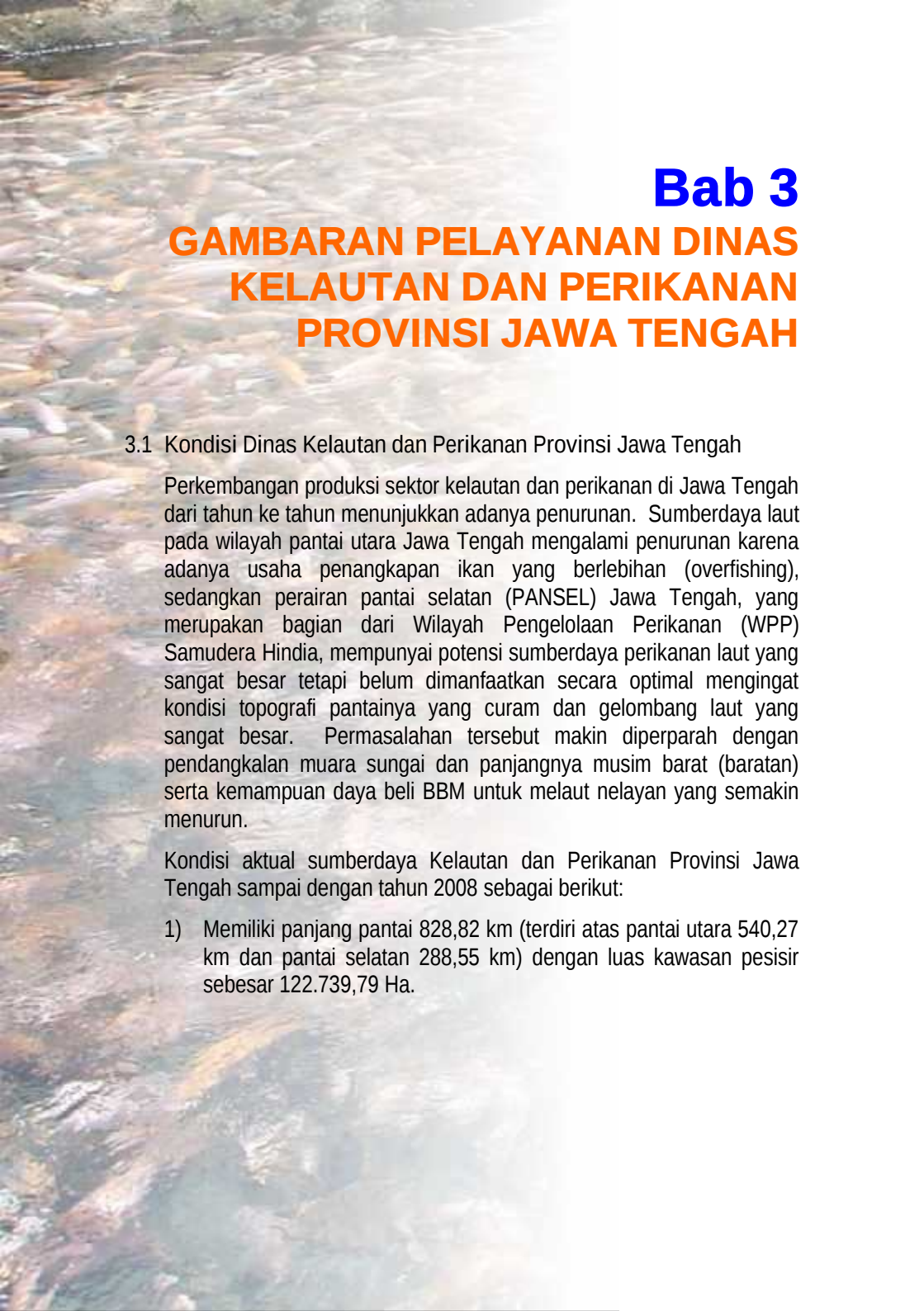
Bagan Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Bagan Organisasi UPT Balai Pembibitan dan Budidaya Ikan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Bagan Organisasi UPT Balai Karantina dan Kesehatan Ikan
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Bab 3

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

3.1 Kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Perkembangan produksi sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan. Sumberdaya laut pada wilayah pantai utara Jawa Tengah mengalami penurunan karena adanya usaha penangkapan ikan yang berlebihan (overfishing), sedangkan perairan pantai selatan (PANSEL) Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Samudera Hindia, mempunyai potensi sumberdaya perikanan laut yang sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal mengingat kondisi topografi pantainya yang curam dan gelombang laut yang sangat besar. Permasalahan tersebut makin diperparah dengan pendangkalan muara sungai dan panjangnya musim barat (baratan) serta kemampuan daya beli BBM untuk melaut nelayan yang semakin menurun.

Kondisi aktual sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2008 sebagai berikut:

- 1) Memiliki panjang pantai 828,82 km (terdiri atas pantai utara 540,27 km dan pantai selatan 288,55 km) dengan luas kawasan pesisir sebesar 122.739,79 Ha.

- 2) Memiliki ekosistem mangrove yang mencakup 8,78% dari luas lahan pesisir, yaitu seluas 10.786,08 Ha yang tersebar di sepanjang pantai utara dan pantai selatan. Dengan kondisi yang kurang baik sebesar 75% dari luas kawasan mangrove (luas kawasan mangrove yang rusak adalah sebesar 8.089,56 Ha).



Ekosistem Mangrove di pesisir Kabupaten Kendal

- 3) Perairan Provinsi Jawa Tengah memiliki hamparan terumbu karang seluas 3800,30 Ha yang tersebar di perairan Kabupaten Tegal, Batang, Kendal, Jepara, Pati, Rembang. Sebagian besar dari hamparan terumbu karang tersebut telah mengalami kerusakan, sebesar 93,7% atau 3.559,60 Ha.



Hamparan Terumbu Karang di perairan perairan Kepulauan Karimunjawa

- 4) Di beberapa kawasan pesisir telah mengalami degradasi lingkungan berupa abrasi dan akresi. Luas daerah terabrasi mencapai 4.072,17 Ha sedangkan daerah akresi seluas 1.275,23 Ha.
- 5) Pada wilayah pesisir Kabupaten Jepara dan Cilacap, teridentifikasi adanya area bekas pertambangan, yaitu seluas 271,16 Ha untuk wilayah pesisir Jepara dan 436,40 Ha untuk wilayah Cilacap.

- 6) Produksi perikanan secara keseluruhan mengalami sedikit pertumbuhan rata-rata sebesar 0,02 % per tahun, yaitu dari 350.484,10 ton pada tahun 2000 menjadi 349.613,81 ton pada tahun 2008. Nilai produksi perikanan secara keseluruhan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,36 % per tahun yaitu dari Rp. 2.100.533.050,00 pada tahun 2000 menjadi Rp. 2.543.855.112,73 pada tahun 2008.
- 7) Terjadi penurunan produksi perikanan tangkap rata-rata sebesar 3,97% per tahun dari produksi 280.049,70 ton pada tahun 2000 menjadi 183.044,81 ton pada tahun 2008. Namun, nilai produksi perikanan tangkap ternyata mengalami kenaikan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,72% per tahun meskipun nilai produksi pada tahun 2008 lebih rendah yaitu Rp. 912.276.314.73, dibandingkan nilai Rp. 1.172.669.281,00 pada tahun 2008.



Hasil produksi perikanan tangkap di TPI
Bajomulyo, Kabupaten Pati

Produksi perikanan tangkap diperoleh dari penangkapan di Laut dan penangkapan di Perairan Umum, seperti terlihat pada lampiran 1. Tampak bahwa perikanan tangkap laut dan perairan umum mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,96% dan 2,93% per tahun. Berdasarkan nilai produksinya, perikanan tangkap di laut mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,12%, sedangkan di perairan darat mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,07 %.

- 8) Meningkatnya produksi perikanan budidaya rata-rata sebesar 11,76% per tahun dari produksi sejumlah 70.434,40 ton pada tahun 2000 menjadi 166.569,00 ton pada tahun 2008. Hal tersebut juga diikuti oleh peningkatan nilai produksi rata-rata sebesar 10,54% per tahun yaitu dari Rp. 927.863.769,00 pada tahun 2000 menjadi Rp. 1.631.578.798,00 pada tahun 2008.



Aktivitas perikanan budidaya di Satker PBIAT Janti, Klaten

Produksi perikanan budidaya diperoleh dari budidaya kolam, karamba, waduk, tambak, laut dan jenis budidaya lainnya, seperti terlihat pada lampiran 1. Data menunjukkan bahwa budidaya sawah yang mengalami peningkatan tertinggi, yaitu rata-rata produksi sebesar 275,28% per tahun, disusul oleh budidaya kolam, karamba dan tambak, sebesar

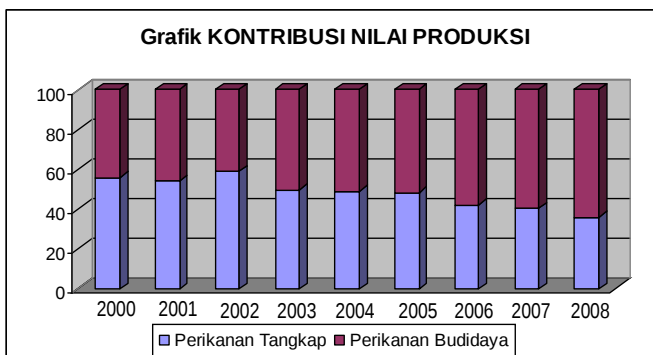
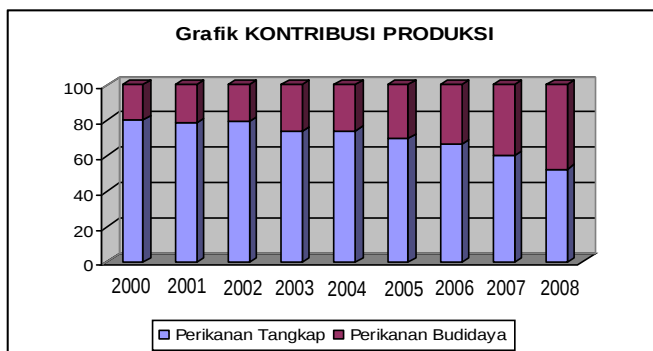


Areal budidaya tambak di Kabupaten Demak

masing-masing 10,35%, 8,19% dan 5,32%. Sedangkan budidaya perikanan di laut mengalami penurunan rata-rata sebesar 9,19% per tahun. Jenis budidaya di perairan lainnya relatif kurang diperhitungkan karena hanya memproduksi pada tahun 2005 saja.

Perkembangan nilai produksi perikanan budidaya berkorelasi lurus dengan perkembangan produksinya, kecuali pada karamba. Hal ini terlihat dari prosentase nilai produksi jenis budidaya di sawah, kolam, karamba dan tambak masing-masing sebesar 250,02%, 14,18%, 14,34% dan 4,21%. Sedangkan budidaya perikanan di laut mengalami penurunan rata-rata sebesar 7,18% per tahun.

- 9) Perkembangan kontribusi produksi dan nilai produksi perikanan Jawa Tengah dari produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya dapat digambarkan seperti pada gambar berikut:



Grafik Kontribusi Produksi dan Nilai Produksi Perikanan
tahun 2000 – 2008

- 10) Menurunnya pendapatan nelayan (Laut dan Perairan Umum) sebesar rata-rata 2,70% per tahun dan meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan sebesar rata-rata 8,92% per tahun. Perkembangan pendapatan per kapita nelayan dan pembudidaya dapat dilihat pada lampiran 1;



Aktivitas nelayan di pesisir Kabupaten Purworejo

- 11) Meningkatnya ekspor produk perikanan sebesar 7,85% per tahun, terhitung dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008;
- 12) Meningkatnya konsumsi makan ikan sebesar 7,46% per tahun; Perkembangan produksi, nilai produksi, pendapatan, ekspor dan konsumsi makan ikan secara lebih jelas dapat dilihat pada Lampiran 1.
- 13) Komoditas andalan perikanan budidaya terdiri dari budidaya air payau (tambak) dan budidaya air tawar, dengan jenis komoditas andalan yaitu Ikan Kakap, Udang Windu, Udang Putih, Kepiting/Rajungan, Ikan Bandeng, Gurame, Nila, Mas, dan Lele.



Hasil budidaya kolam komoditas Lele

Perkembangan produksi komoditas andalan perikanan budidaya tahun 2000 – 2008 seperti pada Lampiran 2.

Kepiting/Rajungan merupakan komoditas yang mengalami perkembangan paling tinggi dengan rata-rata pertumbuhan produksi per tahun mencapai 15,81%, disusul komoditas Nila, Lele, Kakap, Udang Windu, Mas, Bandeng dan Udang putih dengan rata-rata pertumbuhan produksi per tahun berturut-turut: 15,81%, 8,51%, 8,36%, 4,90%, 4,85%, 3,14% dan 1,79%. Gurame merupakan satu-satunya komoditas yang mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan produksi per tahun sebesar 4,87%.

- 14) Unit Pengolah Ikan (UPI) berorientasi Ekspor di Jawa Tengah sejumlah 22 unit dan unit Pengolahan Ikan yang banyak tersebar di Jawa Tengah masih berorientasi pada pemasaran lokal dan berskala mikro (tradisional), walaupun ada beberapa di antaranya yang telah berpotensi ekspor dan menjadi klaster. Di Jawa Tengah, saat ini terdapat 7.000 unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dimana usaha pengolahan sebanyak 4.184 unit dan usaha pemasaran sebanyak 2.816 unit (Data Statistik P2HP, 2008).
- 15) Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah cukup tinggi, yang tercermin dari jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) pada tahun 2006 tercatat sebanyak 3.171.201 rumah tangga yang setara dengan 12,68 juta jiwa. RTM tersebut yang termasuk dalam kategori "Sangat Miskin" sebanyak 0,34 juta rumah tangga (setara dengan 6,16 juta jiwa) dan "Hampir Miskin" sebanyak 1,27 juta rumah tangga (setara dengan 5,08 juta jiwa). Jumlah penduduk miskin tersebut, sebagian besar merupakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan.

3.2 Standar Pelayanan Minimal

Proyeksi kondisi jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ke depan pada tahun 2008 – 2013, akan berdasar pada standar pelayanan minimal yang telah dicapai pada periode-periode sebelumnya. Standar pelayanan minimal tersebut sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing bidang pelayanan.

Yang dimaksud dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah suatu standar dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat yang mencakup jenis pelayanan, indikator dan nilai (benchmark). SPM pada hakekatnya adalah pengejawantahan dari Standar Prosedur Operasional dengan penambahan atribut mutu. Mutu tersebut akan selalu dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi secara temporal. Dari uraian tersebut, nampak bahwa SPM sangat relevan dengan proyeksi kondisi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah jangka 5 (lima) tahun ke depan. Standar Pelayanan Minimal tersebut adalah:

Tabel 3.1. Standar Pelayanan Minimal dan Hasil Capaian Kinerja saat ini

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
1	BIDANG SEKRETARIAT	a. Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan	Menghasilkan: - Program Kerja Dinas - Konsep usulan perencanaan anggaran Dinas - Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Kelautan dan Perikanan skala Provinsi (Renstra, Renja SKPD, Usulan Program Kegiatan). - Membuat Laporan Akhir Kegiatan (LAKIP, Laporan Tahunan, Laporan Bulanan dan Triwulan Perkembangan Program/Kegiatan, LPJ Gubernur, Laporan Penyerahan Kegiatan)
		b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.	Menghasilkan: - Program Kerja Sub Bagian Keuangan - Konsep usulan perencanaan anggaran Sub Bagian Keuangan - Berkas Rencana Usulan Biaya Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran - Berkas Rencana Usulan Biaya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Membuat Laporan Akhir Kegiatan
		c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, Pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan	Menghasilkan: - Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Konsep usulan perencanaan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Pemberkasan CPNS - Pendistribusian SK CPNS - Usulan Peserta Diklat Prajabatan golongan I, II, dan III dan Ujian Dinas - Usulan Pengangkatan PNS - Usulan Kenaikan Pangkat Pegawai di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah - Usulan Kenaikan Gaji Berkala

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
		tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.	- Daftar Hadir Apel PNS - Usulan Karis, Karsu dan Karpeg - Surat Ijin Cuti PNS - Pengolahan administarsi ATK dan barang perlengkapan kantor - Pengelolaan administrasi inventarisasi barang perlengkapan gedung dan perabot - Layanan pemeliharaan dan perlengkapan gedung - Layanan penggunaan ruangan dan kendaraan operasional - Pembayaran rekening telpon, listrik, air untuk Dinas dan Rumah Dinas - Pengolahan administarsi surat masuk, surat keluar dan tata kearsipan - Penyediaan Bahan Bacaan, Peraturan PerUUan dan langganan Koran/ Majalah - Penyediaan Buku Perpustakaan - Forum wartawan dan LSM - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan - Cetak Bulletin/ Majalan - Penerbitan Buku Informasi Dinlutkan Prov. Jateng - Mengkliping Koran - Mengkoreksi produk Hukum - Membuat Laporan Akhir Kegiatan - Penanganan Kasus-kasus Kepegawaian - Usulan Jabatan PNS - Usulan Pensiun PNS dan Usulan Tanda Jasa - Pelaksanaan ASKES pegawai - Usulan Tugas Belajar bagi PNS - Penyajian Data PNS (jumlah, jenis, golongan, lokasi PNS/UPT, dll. - Usulan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan - Memberi Layanan Riset bagi Mahasiswa - Penanganan Kawin-Cerai PNS - Pembinaan PNS (melalui Bintek)
2	BIDANG KELAUTAN,	a. Pembinaan dan pelaksanaan	- Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan ikan di wilayah laut

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
	PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	di bidang Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil	kewenangan provinsi, - Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penataan ruang laut sesuai dengan peta potensi laut di wilayah laut kewenangan provinsi, - Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil termasuk sumberdaya alam di wilayah laut kewenangan provinsi, - Pelaksanaan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumberdaya laut antar kabupaten/ kota dalam wilayah kewenangan provinsi - Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di wilayah laut kewenangan provinsi, - Pelaksanaan dan koordinasi pemetaan potensi sumberdaya kelautan di wilayah perairan laut kewenangan provinsi, - Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan wilayah laut di dalam kewenangan provinsi, - Pelaksanaan koordinasi eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan danau, sungai, rawa dan wilayah perairan lainnya di wilayah provinsi, - Penyusunan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan dalam wilayah provinsi, - Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
		b. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang konservasi, pengendalian ekosistem dan sumber daya kelautan	- Penetapan dan pelaksanaan kebijakan reklamasi pantai dan mitigasi bencana alam di wilayah pesisir dan laut dalam kewenangan provinsi. - Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan dan dikeluarkan ke dan dari wilayah republik indonesia. - Pelaksanaan kebijakan rehabilitasi dan peningkatan sumberdaya ikan serta lingkungannya antar provinsi. - Pelaksanaan dan koordinasi mitigasi kerusakan lingkungan pesisir dan laut di wilayah laut kewenangan provinsi. - Pelaksanaan dan koordinasi penetapan jenis ikan yang dilindungi. - Rehabilitasi sumberdaya pesisir, pulau-pulau kecil dan laut di wilayah kewenangan provinsi. - Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi perairan di wilayah kewenangan provinsi.

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
			- Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan konservasi sumberdaya ikan dan lingkungan sumberdaya ikan kewenangan provinsi. - Koordinasi pelaksanaan pengawasan pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya di pulau-pulau kecil di wilayah kewenangan provinsi. - Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan konservasi plasma nutfah spesifik lokasi di wilayah laut kewenangan provinsi. - Pelaksanaan dan koordinasi pencegahan pencemaran dan kerusakan sumberdaya ikan serta lingkungannya.
		c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan masyarakat pesisir dan jasa kelautan	- Pelaksanaan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar kab./Kota dalam wilayah kewenangan provinsi. - Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan jasa kelautan dan Kamaritiman di wilayah laut kewenangan Provinsi - Pelaksanaan Pengawasan pemanfaatan benda berharga dari kapal tenggelam berdasarkan wilayah kewenangan Provinsi Pelaksanaan Kebijakan Perijinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut kewenangan Provinsi - Bimbingan dan Pelaksa Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi
3	BIDANG PERIKANAN TANGKAP	a. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang prasarana perikanan tangkap	- Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan kewenangan Provinsi. - Penetapan petunjuk pembangunan tipe pelabuhan perikanan. - Penyusunan data fasilitas pelabuhan perikanan Jawa Tengah (fasilitas pokok, fungsional dan penunjang). - Penetapan petunjuk pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah. - Inventarisasi, analisa data kebutuhan pengembangan pelabuhan perikanan. - Usulan rencana pengembangan pelabuhan perikanan jangka pendek dan jangka panjang. - Penyusunan rencana pembangunan pelabuhan perikanan. - Evaluasi pelaksanaan pengembangan pelabuhan perikanan. - Inventarisasi dan evaluasi lokasi pelabuhan perikanan yang akan diidentifikasi. - Usulan tata cara identifikasi pembangunan pelabuhan perikanan.

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
			- Analisis dan evaluasi kegiatan identifikasi pengembangan pelabuhan perikanan. - Analisis dan evaluasi usulan rencana induk dan rumusan skala prioritas rencana dan pelaksanaan pengembangan pelabuhan perikanan. - Analisis lokasi/site pelabuhan perikanan yang akan dibangun. - Usulan kerangka acuan dan penyusunan konsep tata cara serta penyusunan bahan supervisi pelaksanaan studi kelayakan dan studi teknis pembangunan pelabuhan perikanan
		b. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang sarana perikanan tangkap	- Pelaksanaan kebijakan pembangunan kapal perikanan - Pembuatan dan pelaksanaan berbagai kebijakan pembangunan dan operasional sarana dan prasarana Perikanan Tangkap, terutama pemeriksaan fisik kapal. Produk pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan peraturan tentang pemeriksaan fisik kapal, sbb: a) Pendaftaran kapal perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT b) Pelaksanaan kebijakan pembuatan alat tangkap ikan c) Pelaksanaan kebijakan penggunaan peralatan bantu dan penginderaan jauh untuk penangkapan ikan - Pelaksanaan kebijakan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT - Pelaksanaan kebijakan dan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan yang menjadi kewenangan provinsi - Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan pemanfaatan dan penempatan rumpon di perairan laut kewenangan provinsi - Dukungan rekayasa dan pelaksanaan teknologi penangkapan ikan - Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil - Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi
		c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan dan pengelolaan sumberdaya ikan	- Pengelolaan dan pemanfaatan Perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi - Koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan di wilayah kewenangan provinsi - Fasilitasi kerjasama pengelolaan dan pemanfaatan perikanan antar kabupaten/ kota - Dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi penyebaran ikan di perairan wilayah kewenangan provinsi

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
			- Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan di wilayah laut kewenangan provinsi - Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi - Bimbingan teknis kerjasama pemanfaatan terpadu Sumberdaya Ikan antar kabupaten/kota - Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah kewenangan provinsi - Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan provinsi - Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan kelembagaan nelayan kecil termasuk sosialisasi hukum perundangan terkait secara periodik - Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan statistik serta informasi bidang perikanan tangkap seperti stok ikan, Catch per Unit Effort dan penyebaran ikan, secara periodik di wilayah laut kewenangan provinsi Jawa Tengah
4	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan budidaya air tawar, payau dan laut	- Pelaksanaan kebijakan produk perikanan di air tawar, payau dan laut. - Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan Balai Benih Ikan Air Tawar, payau dan laut - Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan air tawar, payau dan laut - Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan air tawar, payau dan laut - Pelaksanaan teknis perbanyakan dan pengelolaan induk per jenis, induk dasar dan benih alam air tawar, payau dan laut - Pengawasan, pemanfaatan dan perlindungan plasma nuftah perikanan air tawar, payau dan laut - Pembinaan pemantauan dan pengawasan lembaga sertifikasi perbenihan ikan air tawar, payau dan laut - Pengawasan mutu benih dan induk ikan air tawar, payau dan laut - Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan - Pelaksanaan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
			obat ikan, bahan obat dan pakan ikan - Pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan - Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan budidaya - Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor induk dan benih ikan - Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan - Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, peredaran dan/atau pemeliharaan ikan lintas kab/kota - Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya - Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan air payau dan laut - Pelaksanaan kebijakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya - Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan - Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi benih ikan lintas kabupaten/kota - Koordinasi dan pengembangan pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan - Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan lintas kabupaten/kota - Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung (KJA) di perairan umum (PU) lintas kabupaten/kota dan wilayah laut kewenangan provinsi - Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik serta informasi bidang perikanan di wilayah Laut kewenangan provinsi - Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi - Pelatihan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)/GAP (Good Aquaculture Practice) dan Penyuluhan kepada pembudidaya ikan / Unit Perbenihan Rakyat. - Fasilitator pertemuan bisnis perikanan air tawar, payau dan laut. - Tersusunnya program rencana kerja dan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas berikut pelaporan hasil kegiatan.
5	BIDANG USAHA KELAUTAN DAN	a. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelayanan usaha	- Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
	PERIKANAN	perikanan	- Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di provinsi - Pemberian ijin penangkapan dan / atau pengangkutan ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT berupa Pelayanan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) bidang Penangkapan, Pengangkutan, Pengumpulan dan Pemasaran, Pengolahan dan Pembudidayaan, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) serta tidak menggunakan tenaga kerja asing - Penetapan kebijakan dan pelaksanaan pungutan perikanan kewenangan provinsi - Pelaksanaan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah kewenangan provinsi - Pelaksanaan kebijakan perizinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan skala menengah yang tidak mengguna tenaga kerja asing di wilayah provinsi
		b. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengolahan hasil dan pemasaran	- Pelaksanan kebijakan pembangunan dan pengelolaan pusat pemasaran ikan - Pelaksanan kebijakan mutu di unit pengolahan, transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan sesuai dengan prinsip PMMT atau HACCP - Pelaksanan pengujian mutu secara laboratoris terhadap produk hasil perikanan - Pelaksanan kebijakan sistem permodalan, promosi dan investasi dibidang perikanan tangkap kewenangan provinsi - Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan - Pelaksanaan kebijakan pengolahan hasil perikanan dan pemasarannya - Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan laboratorium pengujian dan pengolahan mutu hasil perikanan - Bimbingan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan / lingkungan tempat ikan hidup - Pengawasan PMMT, atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan - Pengawasan mutu ekspor hasil perikanan - Bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistim mutu hasil perikanan - Pelaksanaan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan/ atau sertifikat mutu

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
			terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan - Penunjang dan penjamin standar kualitas dan produksi benih dan induk ikan tawar, payau dan laut, misal melalui perlakuan pemuliaan reproduksi dan genetik serta pengendalian hama dan penyakit ikan. - Pengembangan klaster unit pengolah ikan berbasis nilai tambah. - Peningkatan konsumsi ikan per kapita per tahun melalui Gerakan Makan Ikan
		c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan SDM dan Kelembagaan	- Peningkatan Kapasitas kelembagaan dan SDM Bidang Kelautan dan Perikanan - Pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM di bidang kelautan dan perikanan - Pelaksanaan kebijakan dan bimbingan penyuluhan kelautan dan perikanan di provinsi - Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan perikanan di provinsi - Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan - Bimbingan dan pelaksanaan pengumpulan pengolahan, analisa dan penyajian data statistik serta informasi bidang kelautan dan perikanan di wilayah laut kewenangan provinsi - Perencanaan pembangunan perikanan skala provinsi - Pusat Jaringan Usaha dan Informasi Perikanan - Fasilitator dan pembina Kemitraan Usaha Perikanan
6	UPTD	a. Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil perikanan (LPPMHP): Pelaksana sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan serta pengawasan pengolahan hasil perikanan.	- Penyiapan bahan rencana dan program kerja; - Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup Laboratorium; - Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup Laboratorium; - Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan Laboratorium; - Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
			umum serta kepegawaian di Lingkungan Laboratorium. - Penyusunan rencana dan program kegiatan pengujian mutu hasil perikanan; - Penyusunan perencanaan kebutuhan perangkat keras dan lunak untuk program pengujian mutu hasil perikanan; - Penyiapan dan pengumpulan data serta bahan untuk pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan; - Pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan secara mikrobiologi, organoleptik dan kimia; - Pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan pengujian mutu terhadap produk pengolahan; - Pemeliharaan dan perawatan, bahan kimia dan media pengujian; - Pelaksanaan fungsi Manajerial Teknis sesuai SNI 19-17025-2000 (ISO Guide 17025) sebagai laboratorium terakreditasi; - Pengembangan kemampuan pengujian sesuai tuntutan pasar. - Pengumpulan dan inventarisasi data usaha pengolahan hasil perikanan tradisional maupun modern; - Pelaksanaan pengawasan pada unit usaha pengolahan hasil perikanan tradisional dan modern; - Monitoring dan evaluasi secara berkala pada unit usaha pengolahan hasil perikanan tradisional dan modern; - Pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh pengujian; dan - Pelaksanaan fungsi Deputy Manajerial Mutu sesuai SNI 19-17025-2000 (ISO Guide 17025) sebagai laboratorium terakreditasi.
		b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): 1. Pelaksana fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayah kerjanya 2. Pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk	- Penyiapan bahan rencana dan program kerja; - Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup PPP; - Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup PPP;

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
		pelestariannya.	- Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan PPP; - Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan PPP. - Penyiapan perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan; - Pemeliharaan sarana pelayaran; - Pelayanan jasa; - Pengelolaan keamanan; - Pelaksanaan ketertiban dan kebersihan lingkungan pelabuhan perikanan; - Pengelolaan kawasan pelabuhan perikanan; - Koordinasi pengawasan penangkapan dan mutu hasil perikanan. - Perencanaan pengembangan pemeliharaan, serta pemanfaatansarana pelabuhan perikanan; - Pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran perikanan berupa penerbitan surat ijin berlayar (SIB); - Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan; - Pengembangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat perikanan; - Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemrosesan hasil perikanan; - Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan pengolahan, pemasaran dan mutu hasil perikanan; - Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta statistik perikanan; - Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayahnya; - Pemanfaatan wilayah pesisir dan fasilitas Wisata Bahari; dan - Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
		c. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan: Pelaksana sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan	- Penyiapan bahan rencana dan program kerja; - Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup Balai; - Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
		Provinsi Jawa Tengah di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan perbenihan dan budidaya ikan.	dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup Balai; - Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan Balai; - Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan Balai. - Pelaksanaan identifikasi pasar/permintaan benih/induk; - Perencanaan komoditas yang diproduksi secara kualitatif/ kuantitatif; - Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana produksi; - Penyusunan panduan mutu; - Pelaksanaan proses produksi dengan mentaati panduan mutu; - Pelaksanaan audit internal produksi; - Pelaksanaan proses sertifikasi; - Pelaksanaan pembinaan pembenihan dan budidaya. - Identifikasi teknologi perbenihan dan budidaya; - Pelaksanaan kaji terap teknologi; - Perumusan hasil kaji terap; - Sosialisasi pengembangan teknologi; - Pembinaan pengembangan teknologi di kabupaten/kota; dan - Perumusan standar teknologi.
		d. Balai Karantina dan Kesehatan Ikan: Penyiapan, pelaksana, penganalisis, pengevaluasi, pengembang dan pelaporan kegiatan pengendalian hama dan penyakit serta karantina ikan dalam rangka melindungi sumberdaya ikan dan	- Penyiapan bahan rencana dan program kerja; - Pelaksanaan koordinasi bidang program, bidang keuangan dan bidang umum kepegawaian lingkup Balai; - Pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis di bidang penyusunan perencanaan dan program kerja; bidang keuangan yang meliputi urusan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi; bidang umum dan kepegawaian yang meliputi urusan rumah tangga, surat menyurat, kebersihan, keamanan, pemeliharaan, humas, protokol dan ketatausahaan kepegawaian lingkup Balai; - Pengelolaan sistem informasi dan pelaporan bidang program di lingkungan Balai;

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimal saat ini	Hasil Capaian Kinerja
		lingkungan	- Evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang program, bidang keuangan dan bidang umum serta kepegawaian di Lingkungan Balai. - Pelaksanaan pengendalian penyakit dan pengobatan; - Pelaksanaan pengawasan peredaran pestisida, bahan kimia maupun obat-obatan yang digunakan kegiatan perikanan budidaya; - Penilaian kelayakan Laboratorium Hama Penyakit Ikan; - Monitoring dan surveillance Hama Penyakit Ikan; - Analisa resiko akibat hama penyakit ikan; - Pengawasan lalu lintas media pembawa hama penyakit ikan; - Monitoring residu obat, bahan kimia, bahan biologi dan kontaminan serta penggunaan pakan ikan; dan - Pelaksanaan bimbingan kepada masyarakat (petani, nelayan, siswa/mahasiswa, dll.) - Penyusunan bahan informasi tentang Penyakit Ikan; - Visualisasi dan dokumentasi tentang Hama Penyakit Ikan; - Pengujian obat-obatan ikan; - Penelitian dan perekayasa di bidang pengendalian Hama Penyakit Ikan; - Penyusunan konsep naskah perundangan/kebijakan tentang Hama Penyakit Ikan; - Standarisasi kesehatan ikan dan lingkungan budidaya; - Sertifikasi kesehatan ikan; - Analisa dan evaluasi kerugian budidaya akibat Hama Penyakit Ikan; - Pemeriksaan penyakit ikan (virus, bakteri, parasit, jamur); - Analisa residu pestisida/obat-obatan dan bahan kimia lainnya; dan - Penyusunan laporan dan rencana kerja laboratorium.

3.3 Kondisi yang diinginkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Proyeksi ke Depan

Berkaca terhadap kondisi eksisting Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah saat ini, sasaran pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan yang diinginkan pada tahun 2009 – 2013 secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan ekspor produk perikanan rata-rata sebesar 5,10 % per tahun, atau peningkatan produksi sebesar $\pm$ 850 ton per tahun. Data ekspor produk perikanan dapat dilihat pada Lampiran 1, dengan estimasi kenaikan ekspor produk perikanan dapat dilihat pada Lampiran 3.
- 2) Meningkatkan produksi perikanan tangkap rata-rata sebesar 1,0 % per tahun, atau peningkatan produksi sebesar 2.695,7 ton per tahun, dan pendapatan nelayan (penangkapan di perairan laut dan perairan umum) sebesar 0,93% per tahun. Data produksi perikanan tangkap dapat dilihat pada Lampiran 1, dengan estimasi kenaikan produk perikanan tangkap dan pendapatan nelayan dapat dilihat pada Lampiran 3.

Penetapan peningkatan produk sebesar 1,0% per tahun, merupakan akumulasi kenaikan dari hasil penangkapan di perairan laut dan perairan umum dimana kenaikan dari penangkapan di perairan umum cukup signifikan lebih dari 1% per tahun. Peningkatan tersebut dapat terjadi dengan memperhitungkan upaya-upaya perbaikan kinerja penangkapan ikan seperti: Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan, Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan, Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana PPP serta Pengelolaan dan Pengendalian Sumber Daya Ikan.

- 3) Meningkatkan produksi perikanan budidaya rata-rata sebesar 6,62 % per tahun, atau peningkatan produksi sebesar 4.971,4 ton per tahun, dan pendapatan pembudidaya ikan sebesar 6,59% per tahun. Data produksi perikanan budidaya dapat dilihat pada Lampiran 1, dengan estimasi kenaikan produk perikanan budidaya

dan pendapatan pembudidaya ikan dapat dilihat pada Lampiran 3. Sasaran jenis produksi perikanan budidaya pada lokus jenis-jenis komoditas andalan yaitu Udang Windu, Udang Putih, Ikan Gurame, Nila, Mas, Lele, Kakap, Lele, Bandeng dan Kepiting/Rajungan dapat dilihat pada Lampiran 5.

Lele merupakan komoditas terandalkan dengan estimasi pertumbuhan produksi per tahun rata-rata mencapai 17%, disusul komoditas Nila, Gurame, Kepiting/Rajungan, Kakap, Mas, Udang putih, Bandeng dan Udang Windu dengan rata-rata pertumbuhan produksi per tahun berturut-turut: 12%, 10%, 10%, 10%, 8%, 6%, 4% dan 2%. Pertumbuhan produksi komoditas-komoditas tersebut ditunjang dengan upaya-upaya seperti: penerapan dan pembinaan CBIB dan CPIB, Pembinaan dan Pendampingan, Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan, Pengembangan Sarana-Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut, serta Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya udang, produksi budidaya komoditas ini diharapkan mampu meningkat menjadi 2% per tahun.

- 4) Meningkatnya konsumsi makan ikan rata-rata sebesar 2,40% per tahun atau meningkat 0,28 kg/kapita/tahun melalui Program "Gemar Makan Ikan". Data konsumsi makan ikan dapat dilihat pada Lampiran 1, dengan estimasi kenaikan konsumsi makan ikan dapat dilihat pada Lampiran 3.
- 5) Meningkatnya jumlah dan peranan petugas penyuluh pada desa yang berpotensi perikanan, dari sejumlah 204 orang (pada tahun 2008) menjadi sejumlah 8.559 orang (tahun 2013). Peranan petugas penyuluh tersebut disertai pula dengan dukungan aktivitas lembaga perikanan serta sarana penyuluhan di Kecamatan dan Desa.

Kondisi yang diinginkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan proyeksinya ke depan berupa standar pelayanan minimum dan hasil kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Standar Pelayanan Minimal Dan Ekspektasi Kinerja Yang Ingin Dicapai

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimum yang diinginkan	Hasil Capaian Kinerja
1	BIDANG SEKRETARIAT	Peningkatan kualitas kinerja yang ada	- Pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi : pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas. - Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian - Pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
2	BIDANG KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	a. Peningkatan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia Pesisir dan Kelembagaan	- Sosialisasi dalam kegiatan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan laut kepada masyarakat - Sosialisasi kepada nelayan terhadap benda muatan kapal tenggelam (BMKT) dalam wilayah kewenangan provinsi Jawa Tengah. - Sosialisasi penyadaran pentingnya kelestarian sumberdaya, ekosistem dan habitat vital wilayah pesisir dan laut
		b. Up-dating database	- Penyusunan Naskah Akademik Perda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil provinsi Jawa Tengah - Up-dating database Potensi perikanan dan kelautan wilayah kewenangan provinsi Jawa Tengah - Up-dating Peta zona eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan perairan umum (danau, sungai, rawa, waduk, cek dam, dan genangan air di wilayah provinsi Jawa Tengah) - Up-dating Data identifikasi dan inventarisasi plasma nutfah spesifik lokasi (laut dan tawar)
		c. Peningkatan Pembangunan bidang kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil	- Pembinaan usaha petambak garam, wanita pesisir dan taruna pesisir; - Penebaran benih ikan di kawasan konservasi. - penanaman pohon mangrove, - Penenggelman terumbu karang buatan, - Transplantasi karang.

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimum yang diinginkan	Hasil Capaian Kinerja
			- Pemasangan Alat Pemecah Ombak (APO) - Groin Bis Beton - Optimalisasi potensi kelautan pesisir berdasarkan pada sumber database terbaru.
3	BIDANG PERIKANAN TANGKAP	a. Peningkatan SDM	- Peningkatan intensitas kinerja petugas cek fisik kapal serta petugas statistik yang dikhususkan menangani hal tersebut secara khusus, fokus dan terkonsentrasi. - Peningkatan intensitas dan evaluasi terhadap petugas cek fisik kapal yang telah memiliki brevet dalam menjalankan tugasnya. - Relokasi Usaha Nelayan
		b. Peningkatan Regulasi	- Perlu disusunnya peraturan dan payung hukum yang jelas oleh Departemen Kelautan dan Perikanan RI yang berkaitan dengan pelaksanaan tupoksi di daerah dalam pengelolaan sumberdaya ikan dan kegiatan penangkapan ikan, beserta ketersediaan SDM yang memadai berikut dana operasional.
		c. Optimalisasi Sarana-Prasarana	- Peningkatan dan optimalisasi implementasi pelaksanaan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap untuk mendukung usaha penangkapan nelayan yang lestari dan berkelanjutan. - Penyediaan database Perikanan Tangkap secara cepat, tepat, dan akurat. - Pengembangan dan Pengelolaan Sarana - Prasarana di 9 PPP - Implementasi dan Optimalisasi penggunaan alat tangkap ramah lingkungan
4	BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA	a. Peningkatan Sarana-prasarana Budidaya	- Peningkatan sarana dan dan prasarana budidaya, khususnya sarana penanggulangan penyakit dan rekayasa teknologi pakan. - Pengembangan Komoditas Ikan Lokal yang bernilai ekonomis tinggi (Ikan Gabus)
		b. Peningkatan skill budidaya bagi stakeholders	- Peningkatan kualitas dan kuantitas penerapan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik)/ GAP (Good Aquaculture Product) serta Peningkatan dan Pengembangan teknologi pembudidayaan ikan di stakeholders budidaya. - Peningkatan frekuensi dan kualitas pelatihan maupun penyuluhan sehingga terjadi peningkatan kualitas SDM budidaya perairan.
		c. Perbaikan kualitas Lingkungan Budidaya	- Peningkatan / revitalisasi / rehabilitasi ekosistem sumberdaya perikanan budidaya, seperti: penanggulangan abrasi pantai, rehabilitasi pada tambak, mangrove, dan penerapan bioremediasi. - Penyusunan tata ruang kabupaten dan kota dalam kaitannya dengan penerapan budidaya yang berwawasan lingkungan.

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimum yang diinginkan	Hasil Capaian Kinerja
			- Pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan Grass Carp berbasis CBF (Culture Based Fisheries)
		d. Peningkatan produksi budidaya	- Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan (Nila, Patin, Lele, Gurami, Udang, Kepiting dan Rumput Laut) - Penyiapan alih komoditas pada kawasan sentra produksi - Pengembangan alih usaha nelayan ke budidaya - Peningkatan kualitas pembenihan, khususnya melalui rekayasa genetika dan Pelaksanaan Akreditasi dan sertifikasi perbenihan ikan. - Terjaganya stabilitas produksi ikan yang dihasilkan oleh pembudidaya, baik secara kualitas maupun kuantitas. - Peningkatan Pendataan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya serta Pengelolaan Informasi Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan. - Peningkatan Pendataan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya serta Pengelolaan Informasi Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan.
		e. Peningkatan Pembangunan Kelembagaan	Terjalannya hubungan kerjasama antar pembenih di Jawa Tengah secara lebih intensif demi peningkatan kesejahteraan.
5	BIDANG USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	a. Peningkatan kualitas pelayanan dan Pengembangan SDM	- Peningkatan kepemilikan SIUP dan SIPI/SIKPI menjadi > 50% - Percepatan birokrasi pelayanan dan penyelesaian SIUP/SIPI - Revisi Substansi Perda, Pergub dan petunjuk teknis Pelayanan Perizinan untuk optimalisasi pelayanan usaha perikanan-kelautan. - Penyediaan peta sebaran usaha perikanan di Kab kota se Jawa Tengah, sesuai dengan komoditas unggulannya, baik produk budidaya, olahan maupun hasil tangkapan. - Pembinaan dalam rangka Peningkatan SDM yang berkualitas di bidang Perikanan dan Kelautan. - Peningkatan kualitas masyarakat dan stakeholders perikanan dengan pengembangan kegiatan di bidang pendidikan kemasyarakatan. - Perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan khususnya Pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan penyuluhan berdasarkan skala prioritas guna mendukung tercapai Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). - Peningkatan bimbingan kapasitas dan kelembagaan penyuluh perikanan kerjasama dengan instansi terkait (Bakorluh, Bapeluh dll); - Peningkatan sosialisasi kebijakan kelembagaan penyuluh kepada Sumberdaya manusia

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimum yang diinginkan	Hasil Capaian Kinerja
			penyuluh dan Bapeluh kabupaten/kota; - Peningkatan kemampuan dan pengetahuan SDM, terutama penguasaan program dan perawatan komputer - Penambahan jumlah Komputer, luasan Ruang pelayanan, dan pengadaan almari arsip SIUP, SIPI yang telah diterbitkan. - Penambahan lokasi pelayanan di Pelabuhan Perikanan Pantai yang tersebar di Jateng (9 PPP) sehingga dapat menjangkau seluruh pelaku usaha sesuai dengan domisili administrasinya, - Pengupayaan sistem pelayanan satu atap, - Pengaktifan kembali sistem yang sudah ada, dengan substansi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha perikanan - Tersedianya database sumberdaya manusia penyuluh perikanan guna mendukung kegiatan penyuluhan di wilayah kewenangan kab/kota;
		b. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan, Pemasaran Hasil Perikanan	- Meningkatkan sosialisasi, sehingga seluruh penyuluh dan Bapeluh kabupaten/kota serta melaksanakan kegiatan penyuluhan sesuai kaidah penyuluhan yang dikeluarkan oleh BPSPDM KP; - Meningkatkan penyuluhan kepada para pengolah tradisional untuk tidak menggunakan B3 (Bahan Beracun Berbahaya) dan menerapkan HACCP. - Tetap melakukan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup dilakukan secara periodik bersama petugas laboratorium di sentra pengolahan, budidaya dan TPI maupun di kapal penangkap ikan. - Melanjutkan pengawasan PMMT atau HACCP di unit pengolahan hasil perikanan. - Tetap melakukan pengawasan mutu ekspor hasil perikanan. - Melanjutkan melakukan bimbingan teknis pelaksanaan standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistim mutu hasil perikanan. - Tetap melaksanakan kebijakan penerbitan sertifikat kesehatan dan atau sertifikat mutu terhadap produk perikanan dalam rangka jaminan mutu dan jaminan pangan. - Meningkatkan angka konsumsi makan ikan per kapita per tahun dengan jalan gerakan makan ikan. - Gerakan promosi produk hasil perikanan baik skala regional maupun nasional sebagai pengembangan pemasaran hasil perikanan di masyarakat.

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimum yang diinginkan	Hasil Capaian Kinerja
			- Adanya kemudahan kredit lunak dengan bunga ringan bagi usaha penangkapan ikan dengan persyaratan yang ringan. - Adanya rintisan kerjasama kemitraan antara pembudidaya dengan tengkulak, agar ada jaminan bagi kedua belah pihak. - Dengan adanya Badan Akreditasi dan Sertifikasi diklat, diharapkan diklat penyuluhan bidang perikanan dapat memenuhi standar yang diharapkan - Meningkatkan sarana pemasaran ikan yang telah mempertimbangkan persyaratan higienitas komoditas perikanan sebagai bahan baku dengan senantiasa menerapkan sistem rantai dingin (cold chain system). Sarana pemasaran ikan tersebut dalam bentuk Pasar Ikan Higienis dan pembangunan Los Pasar Ikan Tradisional. - Melanjutkan rehabilitasi/pembangunan pasar ikan tradisional di kabupaten/kota lain yang belum direhabilitasi/dibangun serta mengusahakan pihak Swasta untuk pengelolaan PIH agar segera termanfaatkan. - Meneruskan rehabilitasi kawasan pengelolaan ikan dan memberikan bimbingan/ pembinaan serta bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan dengan skala prioritas. - Terpenuhinya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan dalam rangka penyebaran dan penerapan teknologi; - Memanfaatkan cool storage, coldroom yang telah dibangun untuk memudahkan mendapatkan bahan baku bagi pengolah ikan. Memanfaatkan jaringan PUSJUI untuk memudahkan dan membuka jaringan pemasaran. - Tetap mensupport keberadaan LPPMHP dengan melengkapi sarana dan prasarana serta peralatan yang dibutuhkan dan sumberdaya manusia pengawas mutu. - Pengembangan klaster unit pengolahan ikan dengan produk olahan hasil perikanan bernilai tambah
6	UPTD	Peningkatan kualitas kinerja yang ada	a. Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil perikanan (LPPMHP): Pelaksana sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan pengujian mutu hasil perikanan serta pengawasan pengolahan hasil perikanan. b. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP): - Pelaksana fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan tangkap di wilayah kerjanya

No.	Bidang/Seksi	Standar Pelayanan Minimum yang diinginkan	Hasil Capaian Kinerja
			- Pemanfaatan sumberdaya penangkapan untuk pelestariannya. - Pemeliharaan alur pelayaran pelabuhan perikanan (pengadaan dan operasional beghoe) c. Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan: Pelaksana sebagian tugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan perbenihan dan budidaya ikan. a. Balai Karantina dan Kesehatan Ikan: Penyiapan, pelaksana, penganalisis, pengevaluasi, pengembang dan pelaporan kegiatan pengendalian hama dan penyakit serta karantina ikan dalam rangka melindungi sumberdaya ikan dan lingkungan

Bab 4

ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis di seputar pelaksanaan Tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah meliputi berbagai macam potensi, permasalahan dan peluang yang ada, yaitu:

4.1 Potensi

Provinsi Jawa Tengah terletak pada $5^{\circ} 30' \text{ LS} - 8^{\circ} 30' \text{ LS}$ dan $108^{\circ} 30' \text{ BT} - 111^{\circ} 30' \text{ BT}$, memiliki wilayah seluas $32.284,268 \text{ km}^2$ atau sekitar 23,97% luas wilayah Pulau Jawa. Berdasarkan sumberdaya perikanan dan kelautannya, Provinsi Jawa Tengah mempunyai 33 buah pulau-pulau kecil, yang tersebar di Laut Jawa sebanyak 32 Pulau (Pulau Marongan, Pulau Gede, Pulau Sualan, Pulau Mandalika, Pulau Panjang dan 27 pulau di gugusan Kepulauan Karimunjawa) serta 1 (satu) pulau di Samudera Hindia yaitu Pulau Nusakambangan. Di samping itu Jawa Tengah memiliki garis pantai 828,82 km, terbagi atas pantai utara 540,27 km dan pantai selatan 288,55 km.

Kondisi geografis semacam ini menyimpan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar termasuk di dalamnya perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, pulau-pulau kecil dan kegiatan



Jenis Ikan Pelagis Tuna yang didapatkan di Perairan Selatan Jawa Tengah

pendayagunaan benda-benda berharga (the sunken treasures).

Di Laut Jawa, peluang pengembangan cukup besar karena kaya akan jenis-jenis ikan pelagis kecil (small pelagic) dan ikan demersal dengan potensi sebesar 796.640 ton/tahun. Di Laut Selatan (Samudera Hindia), peluang pengembangan terbuka lebar dengan kekayaan potensi udang dan ikan-ikan pelagis besar seperti Tuna, Hiu dan lain sebagainya dengan potensi sebesar 1.076.890 ton / tahun (Komisi Nasional Pengkajian Sumber daya Ikan DKP-RI, 2007). Di bidang Perikanan Budidaya, masih berpeluang untuk dikembangkan usaha perikanan budidaya air tawar, perairan pedalaman, air payau serta budidaya laut, yang keseluruhannya mencapai luas 293.000 ha. Di mana dari segi pemasaran, baik ikan hidup, segar atau benih ikan, mempunyai prospek yang cerah karena posisi Jawa Tengah yang strategis, diapit tiga provinsi besar yaitu Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang kaya dengan perairan pedalaman, yaitu sekitar 44.328,46 Ha, yang terdiri dari jenis perairan Waduk (23.545,75 Ha), Sungai (15.876,20 Ha), Rawa (3.660,2 Ha) dan Telaga (1.246,31 Ha).

Sebagai gambaran potensi perairan pedalaman, di Jawa Tengah saat ini memiliki 37 buah waduk, di antaranya waduk-waduk besar yang sangat potensial seperti Waduk Gajahmungkur (Kab. Wonogiri), Waduk Wadas-lintang (Kab. Wonosobo), Waduk Mrica (Kab. Banjarnegara), Waduk Sempor (Kab. Kebumen) dan Waduk Kedung Ombo (Kab. Sragen, Boyolali dan Grobogan).

Pada waduk-waduk besar



Waduk Kedung Ombo sebagai salah satu perairan pedalaman di wilayah Provinsi Jawa Tengah

tersebut telah dikembangkan budidaya ikan di karamba jaring apung dengan komoditas unggulan ikan Nila Merah.

Pengembangan perluasan areal lahan usaha budidaya air payau masih terbuka terutama di pesisir Pantai Selatan Jawa Tengah, dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem jalur hijau hutan mangrove mengingat karakteristik lahannya yang khas. Pengembangan potensi perairan dalam pun belum sejalan dengan potensi agroklimat yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, prospek pengembangan ke depan masih terbuka luas, mengingat sampai saat ini, pemanfaatan secara keseluruhan baru mencapai sekitar 15 % (Dinlutkan Jateng, 2007).

Untuk kondisi perikanan tangkap, sepanjang Pantai Utara yang membentang dari Kabupaten Brebes sampai dengan Kabupaten Rembang, merupakan konsentrasi dan pemukiman nelayan. Di Pantai Selatan, konsentrasi pemukiman meliputi daerah Cilacap, Purworejo, Kebumen dan Wonogiri namun lebih sedikit dibandingkan wilayah Pantai Utara.



Tipe armada tangkap di Perairan Laut Utara Provinsi Jawa Tengah

Hal ini disebabkan kondisi pantai yang berbeda, musim yang tidak bersamaan serta keadaan laut yang memang berbeda dibandingkan laut Pantai Utara. Tercatat jumlah nelayan di Jawa Tengah pada tahun 2008 mencapai 176,969.00 orang yang mendiami 331 desa di pesisir Utara dan 95 desa di pesisir Selatan.

Jumlah armada perikanan tangkap di laut Jawa Tengah yang tercatat pada tahun 2007 sebanyak 18.498 unit, yang tersebar di Pantai Utara sebanyak 16.027 unit dan di Pantai Selatan sebanyak 2.471 unit. Jenis armada perikanan laut masih didominasi oleh jenis armada motor tempel yang jumlahnya mencapai 14.119 unit (Dinlutkan Jateng, 2007).

Kapal motor dengan alat tangkap jenis pukat cincin di Pantai Utara Jawa Tengah, dalam operasionalnya telah mencapai fishing ground hingga Pulau Matasiri di Kalimantan, Pulau Masalembu di Jawa Timur, Laut China Selatan, Selat Malaka dan Pulau Pejantan di Selatan Natuna, dengan lama operasi penangkapan mencapai 30 – 40 hari per trip. Pukat cincin (purse seine) merupakan jenis alat tangkap yang dominan dan memberikan kontribusi



Tipe armada tangkap di Periaran Laut Selatan Provinsi Jawa Tengah

paling banyak terhadap produksi perikanan Jawa Tengah, dimana periode 1998 – 2007 rata-rata mencapai 60,48% diikuti pukat kantong sebesar 18,45%, kemudian jaring insang 11,23% dan pancing 5,62%.

Untuk mengakomodasi usaha penangkapan ikan di laut, maka di Jawa Tengah terdapat 77 unit Tempat Pelelangan ikan (TPI) yang terdiri atas 67 unit di Pantai Utara dan 10 unit di Pantai Selatan. Sejak berlakunya PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab./Kota pada urusan bidang kelautan dan perikanan, maka kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI menjadi urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota. Jawa Tengah memiliki 2 (dua) buah Pelabuhan Perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP) dan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC). Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 9 (sembilan) buah Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi yaitu : (1) PPP Tasikagung Rembang, (2) PPP Bajomulyo



PPP Tasik Agung Rembang

Juwana, Kab. Pati (3) PPP Morodemak Demak, (4) PPP Wonokerto Kab. Pekalongan, (5) PPP Tawang Kendal, (6) PPP Klidang Lor Batang, (7) PPP Tegalsari Kota Tegal, dan (8) PPP Asemboyong Pemalang dan (9) PPP Karimunjawa Jepara.

Kegiatan usaha nelayan tentu tidak dapat dipisahkan dari peran KUD Mina sebagai lembaga ekonomi nelayan.

Dari 22 unit KUD Mina di Jawa Tengah, seluruhnya telah mencapai predikat KUD Mandiri, bahkan KUD Makaryo Mino di Pekalongan telah mendapatkan predikat sebagai KUD Mandiri Inti.

Potensi usaha pengolahan di Jawa Tengah berdasarkan pendataan memperlihatkan sebaran yang sangat beragam baik dalam kuantitas dan varian (kualitas) usahanya. Secara umum, kondisi pengolahan dan pemasaran masih berada pada skala usaha tradisional. Walaupun beberapa unit pengolah ikan telah berskala modern dan berorientasi pasar ekspor. Jumlah Total unit usaha pengolahan di Jawa Tengah sebanyak 4.184 unit usaha, dimana mayoritas masih berorientasi pada skala tradisional. Berdasarkan pendataan statistik, usaha pengasapan/pemanggangan merupakan jenis usaha yang terbesar di Jawa Tengah, dengan jumlah mencapai 1.110 unit. Sedangkan usaha pengalengan merupakan jenis usaha yang paling kecil jumlahnya. Berdasarkan sebaran secara geografis tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, jumlah usaha pengolahan yang terbesar terdapat di Kabupaten Rembang mencapai 1.817 unit.

Potensi usaha pemasaran di Jawa Tengah berdasarkan pendataan memperlihatkan sebaran yang sangat beragam baik dalam kuantitas dan varian (kualitas) usahanya. Jawa Tengah memiliki Pasar Ikan Higienis (PIH) sejumlah 4 (empat) unit yang berfungsi sebagai unit pemasaran ikan higienis, dengan mengutamakan kualitas / mutu produk ikan segar yang dipasarkan dengan selalu menjaga kondisi cold chain system.



Bentuk pemasaran hasil perikanan di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan pendataan statistik, total unit usaha pemasaran perikanan di Jawa Tengah sebanyak 2.812 usaha pengecer merupakan jenis usaha pemasaran perikanan yang terbesar di Jawa Tengah, dengan jumlah mencapai 1.981 unit usaha. Sedangkan usaha catering merupakan jenis usaha pemasaran yang paling kecil jumlahnya.

Berdasarkan sebaran secara geografis tiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, jumlah usaha pemasaran perikanan yang terbesar terdapat di Kabupaten Banjarnegara yang mencapai 497 unit usaha pemasaran.

Pengembangan usaha pemasaran berdasar pada Cold Chain System untuk menjaga kualitas ikan sebagai bahan baku, telah dilakukan dengan pembangunan los pasar ikan tradisional di 11 (sebelas) kabupaten/kota dan 4 (empat) unit Pasar Ikan Higienis (PIH) di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Cilacap dan Kota Surakarta.

4.2 Permasalahan

Masih cukup banyak permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Jawa Tengah yang menyebabkan

penurunan/kurang optimalnya produksi perikanan dan jasa kelautan, di antaranya adalah:

- 1) Rendahnya kemampuan SDM dan kapasitas kelembagaan masyarakat, utamanya masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan akibat rendahnya tingkat pendidikan;
- 2) Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang mengakibatkan tidak terkendalnya eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang disebabkan kurangnya kualitas dan kuantitas petugas penegak hukum di lapangan;
- 3) Adanya kerusakan habitat vital di laut / pesisir yang disebabkan pencemaran, perusakan oleh manusia, maupun faktor bencana alam, akibat rendahnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem / lingkungan.
- 4) Menurunnya produksi perikanan tangkap, yang disebabkan oleh penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, rusaknya habitat vital, dan belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
- 5) Terkonsentrasinya domisili nelayan Jawa Tengah di Pantai Utara Jawa Tengah, mengakibatkan terjadinya tekanan berlebih pada sumberdaya perikanan;
- 6) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya serta rendahnya kemampuan pembudidaya ikan yang menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (good aquaculture practices) yang disebabkan kurangnya penguasaan teknis;
- 7) Banyaknya pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang bersifat tradisional (dengan mutu produk, syarat teknis, sanitasi dan higienis yang rendah dan yang jauh dari persyaratan mutu ekspor) karena rendahnya kesadaran, pengetahuan dan permodalan, serta keterbatasan sarana – prasarana penyimpanan hasil tangkapan;
- 8) Pola pemasaran hasil perikanan yang masih tradisional, belum menerapkan sistem rantai dingin pada penanganan hasil produk perikanan, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas bahan

baku olahan perikanan. Hal ini masih ditambah dengan masih adanya penggunaan bahan beracun berbahaya;

- 9) Rendahnya tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun;
- 10) Kurangnya database kondisi dan potensi sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Provinsi Jawa Tengah beserta perangkat analisis penunjangnya; dan
- 11) Kurang optimalnya pengelolaan aset barang milik negara yang disebabkan kondisi dan lokasi aset dinas terpencar di seluruh Jawa Tengah.

4.3 Peluang

Peluang yang ada berdasarkan potensi dan isu-isu strategis di atas adalah:

- (1) Belum termanfaatkannya seluruh potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Jawa Tengah;
- (2) Komitmen pemerintah dan payung hukum dalam membangun bidang Kelautan dan Perikanan termasuk penyempurnaan otonomi dan Peraturan Daerah;
- (3) Tingginya permintaan ikan baik untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun untuk ekspor serta pertumbuhan usaha perikanan rakyat ke usaha perikanan maju seiring dengan naiknya pamor perikanan sebagai sumberdaya pangan unggulan;
- (4) Adanya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil;
- (5) Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung stakeholders, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan seperti: pelabuhan perikanan, sentra budidaya, pusat informasi dan jejaring usaha serta pariwisata;
- (6) Peran pelaku usaha perikanan yang semakin meningkat dan proaktif, serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan investasi);

- (7) Pengembangan klaster usaha pengolahan hasil perikanan dalam bentuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang berbasis pada produk bernilai tambah dan memenuhi selera pasar;
- (8) Peluang investasi pada bidang usaha pengolahan dan pemasaran dengan keunggulan jenis dan kualitas produk
- (9) Tercapainya peran serta penyuluh sebagai fasilitator dan perekat komunitas pada usaha perikanan;
- (10) Adanya peluang investasi di pulau-pulau kecil yang dapat memacu penyediaan fasilitas yang memadai;
- (11) Penyajian data dan informasi sumberdaya, sarana dan prasarana serta jaringan usaha di bidang kelautan dan perikanan Jawa Tengah;
- (12) Maraknya bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan sehingga kondisi pemasaran (ekspor) menjadi lebih kondusif;
- (13) Globalisasi / diberlakukannya pasar bebas membuka peluang pengembangan pemasaran hasil perikanan;
- (14) Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD;
- (15) Pengembangan/Peningkatan kemampuan SDM; dan
- (16) Jaminan terpenuhinya dan kelayakan pemakaian barang inventarisasi untuk menunjang kegiatan Dinas.

Bab 5

VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH

5.1 Visi

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu organisasi pemerintah di Jawa Tengah, dalam rangka melaksanakan pembangunan perikanan mempunyai visi, yaitu :

“Terwujudnya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sebagai Sumber Utama Penghidupan, Pendapatan dan Kesejahteraan yang berkelanjutan”.

5.2 Misi

Di samping mempunyai visi dalam rangka melaksanakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan sebagaimana tersebut diatas, juga mempunyai Misi, yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia serta mendorong dan meningkatkan peran pelaku-pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan (M1);
2. Meningkatkan dan menjaga daya dukung lahan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan (M2);
3. Mengembangkan alternatif pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan (M3);
4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif (M4);
5. Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan (M5);
6. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan (M6);

7. Peningkatan dan penguatan jaringan serta daya tembus pemasaran produk serta jasa kelautan (M7);
8. Peningkatan dan penguatan sistem informasi kelautan dan perikanan meliputi distribusi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta potensi pasar (M8); dan
9. Memberdayakan sosial ekonomi (M9).

5.3 Nilai-nilai

Nilai-nilai yang dianut dan digunakan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan (2009 – 2013) terangkum dalam akronim BERICHTIAR, yaitu: Brilliant (N1), Emphaty (N2), Respect (N3), Innovative (N4), Commitment (N5), Honesty (N6), Togetherness (N7), Integrity (N8), Assist (N9) dan Responsive (N10)



Bab 6

FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

6.1 Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dan Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE)

Rencana strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2013 merupakan bentuk perencanaan jangka menengah selama lima tahunan. Dalam penyusunan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, berbagai faktor strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi pelaksanaan dan keberhasilan pembangunan perlu diidentifikasi dengan didasarkan pada data dan informasi yang telah ada sebelumnya.

Faktor-faktor dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal) yang menjadi variabel penentu keberhasilan pembangunan harus diidentifikasi dengan cermat dan lengkap. Kelengkapan data dan informasi yang menyangkut berbagai faktor yang berpengaruh tersebut menjadi acuan untuk menyusun perencanaan agar lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan selama lima tahun ke depan.

Dalam rangka pencapaian misi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pentahapan identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (FKK) dengan menggunakan analisis SWOT, meliputi: Kekuatan (strengths), Kelemahan (weakneses), Peluang (opportunities), dan Ancaman (threats). Hasil identifikasi berbagai faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Stratejik Kelautan dan Perikanan tahun 2009 – 2013 sebagai berikut:

6.1.1 Faktor Internal

a. Kekuatan

- (1) Potensi Sumber daya Alam (waduk, sungai, kolam, sawah, laut, dan sebagainya) yang termanfaatkan baru $\pm$ 15% sehingga masih terbuka luas untuk dikembangkan;
- (2) Adanya komitmen pemerintah terhadap Perencanaan Pembangunan di wilayah pesisir dan laut dan disertai dukungan Anggaran APBD dan APBN untuk bidang Kelautan dan Perikanan;
- (3) Adanya Payung Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan di sektor Kelautan dan Perikanan yang mengatur kewenangan, aturan, petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kedinasan;
- (4) Adanya kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, pasarana dan teknologi di sektor perikanan, secara optimal dan bertanggung jawab;
- (5) Adanya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil;
- (6) Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung stakeholders, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan; dan
- (7) Peran pelaku usaha perikanan yang semakin meningkat dan proaktif, serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan investasi).

b. Kelemahan

- (1) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan khususnya tangkap, yang disebabkan oleh besarnya anggaran yang diperlukan untuk pembangunan;

- (2) Rendahnya kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan yang disebabkan kurangnya penguasaan teknis, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kemampuan ekonomi;
- (3) Terbatasnya data dan informasi wilayah pesisir;
- (4) Lemahnya Sanksi dan Apresiasi terhadap Peraturan Perundang-undangan (Hukum);
- (5) Kegiatan Anggaran APBD untuk kegiatan Diskanlut tidak sesuai Jadwal Kerja;
- (6) Kurangnya jumlah SDM (Pegawai) Dislutkan Jawa Tengah yang berkualifikasi memadai; dan
- (7) Kondisi dan Lokasi Aset Dinas terpecah di seluruh Jawa Tengah.

6.1.2 Faktor Eksternal

a. Peluang

- (1) Peningkatan Citra komoditas Perikanan saat ini sebagai salah satu sumber protein pangan unggulan dan maraknya paradigma blue evolution;
- (2) Peningkatan minat investasi khususnya bagi perikanan budidaya;
- (3) Maraknya bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan sehingga kondisi pemasaran (ekspor) menjadi lebih kondusif;
- (4) Globalisasi / diberlakukannya pasar bebas membuka peluang pengembangan pemasaran hasil perikanan;
- (5) Penyempurnaan Otonomi dan Peraturan Daerah;
- (6) Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD;
- (7) Pengembangan/Peningkatan kemampuan SDM; dan
- (8) Jaminan terpenuhinya dan kelayakan pemakaian barang inventarisasi untuk menunjang kegiatan Dinas.

b. Tantangan

- (1) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam, khususnya sektor kelautan dan perikanan, terutama terjadinya tekanan pada sumberdaya perikanan tangkap;
- (2) Menurunnya permintaan pasar (terutama luar negeri) akibat teknologi pengolahan yang kurang memadai;
- (3) Belum meratanya pembangunan ekonomi wilayah pesisir, terutama antara pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah;
- (4) Globalisasi (free trade) mengancam eksistensi industri Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah;
- (5) Lemahnya penegakan hukum dan rawannya konflik antar kepentingan, sehingga perlu dilakukan revitalisasi dan pembinaan/ sosialisasi peraturan perundang-undangan Perikanan; dan
- (6) Fluktuasi biaya kegiatan berkaitan dengan fluktuasi komponen biaya BBM. Penyesuaian anggaran diusulkan dalam perubahan anggaran; dan
- (7) Banyaknya aset dinas yang sudah tua dan teknologi pengelolaan sumber daya yang tertinggal, sehingga perlu upaya perbaikan dan pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis dan non-Teknis.

6.2 Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KA FE)

Faktor-faktor internal dan eksternal yang telah diidentifikasi dalam Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) dan Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) selanjutnya dianalisis dengan memberikan bobot, rating dan skor sehingga menghasilkan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KA FE).

Pembobotan pada masing-masing faktor yang telah diidentifikasi dalam PLI dan PLE diberi nilai sesuai dengan dampak strategis yang ditimbulkan. Nilai pembobotan yang tinggi diberikan kepada faktor strategik yang memberikan dampak besar bagi kinerja pembangunan Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah, dan sebaliknya. Pemberian

bobot pada faktor-faktor internal secara keseluruhan yang meliputi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) adalah 100. Demikian pula dengan pemberian bobot pada faktor-faktor eksternal secara keseluruhan yang meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threats) adalah 100.

Rating merupakan respon manajemen organisasi terhadap faktor-faktor strategik internal dan eksternal. Nilai rating untuk faktor-faktor tersebut ditetapkan dengan kisaran nilai antara 1 sampai dengan 4. Klasifikasi kisaran penilaian rating adalah:

- Nilai 1 : paling tidak menonjol
 Nilai 2 : tidak menonjol
 Nilai 3 : menonjol
 Nilai 4 : sangat menonjol

Skor pada penilaian KAFI dan KAFE adalah hasil perkalian antara bobot dan rating pada setiap faktor strategis pada hasil identifikasi Pencermatan Lingkungan Internal dan Pencermatan Lingkungan Eksternal. Skor yang diperoleh menunjukkan skala prioritas dampak masing-masing Pencermatan Lingkungan Internal dan Pencermatan Lingkungan Eksternal terhadap kinerja pembangunan Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah. Hasil penetapan skala prioritas pada setiap faktor strategik tersebut merupakan Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE). Hasil analisis KAFI dan KAFE dalam Rencana Strategik Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2013 ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1. Format KAFI dalam Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah tahun 2008 -2013

No.	Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Prioritas
A	<u>Kekuatan:</u> a. Potensi Sumber daya Alam (waduk, sungai, kolam, sawah, laut, dan sebagainya) yang termanfaatkan baru $\pm$ 15%	10	4	40	I 4

No.	Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Prioritas
	sehingga masih terbuka luas untuk dikembangkan;				
b.	Adanya komitmen pemerintah terhadap Perencanaan Pembangunan di wilayah pesisir dan laut dan disertai dukungan Anggaran APBD dan APBN untuk bidang Kelautan dan Perikanan;	10	4	40	II
c.	Adanya Payung Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan di sektor Kelautan dan Perikanan yang mengatur kewenangan, aturan, petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kedinasan;	10	4	40	III
d.	Adanya kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, pasarana dan teknologi di sektor perikanan, secara optimal dan bertanggung jawab;	5	3	15	III
e.	Adanya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil;	5	3	15	III
f.	Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung stakeholders, termasuk di dalamnya kekayaan/ Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan; dan	10	3	30	IV
g.	Peran pelaku usaha perikanan yang semakin meningkat dan proaktif, serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan investasi).	10	4	40	I

No.	Faktor Internal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Prioritas
B	<u>Kelemahan:</u>				
	a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan khususnya tangkap, yang disebabkan oleh besarnya anggaran yang diperlukan untuk pembangunan;	5	4	20	III
	b. Rendahnya kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan yang disebabkan kurangnya penguasaan teknis, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kemampuan ekonomi;	5	4	20	I
	c. Terbatasnya data dan informasi wilayah pesisir;	5	4	20	II
	d. Lemahnya Sanksi dan Apresiasi terhadap Peraturan Perundang-undangan (Hukum);	5	3	15	III
	e. Kegiatan Anggaran APBD untuk kegiatan Diskanlut tidak sesuai Jadwal Kerja;	5	3	15	IV
	f. Kurangnya jumlah SDM (Pegawai) Dislutkan Jawa Tengah yang berkualifikasi memadai; dan	10	4	40	I
	g. Kondisi dan Lokasi Aset Dinas terpecah di seluruh Jawa Tengah.	5	3	15	II
	JUMLAH	100			

Tabel 6.2. Format KAFE dalam Rencana Strategis Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah tahun 2008 -2013

No.	Faktor Eksternal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Prioritas
A	<u>Peluang:</u>				
	a. Peningkatan Citra komoditas Perikanan saat ini sebagai salah satu sumber protein	5	3	15	II

No.	Faktor Eksternal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Prioritas
	pangan unggulan dan maraknya paradigma blue evolution;				
	b. Peningkatan minat investasi khususnya bagi perikanan budidaya;	10	4	40	II
	c. Maraknya bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan sehingga kondisi pemasaran (ekspor) menjadi lebih kondusif;	10	3	30	II
	d. Globalisasi / diberlakukannya pasar bebas membuka peluang pengembangan pemasaran hasil perikanan;	5	3	15	III
	e. Penyempurnaan Otonomi dan Peraturan Daerah;	5	4	20	III
	f. Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD;	5	3	15	IV
	g. Pengembangan/Peningkatan kemampuan SDM; dan	10	4	40	I
	h. Jaminan terpenuhinya dan kelayakan pemakaian barang inventarisasi untuk menunjang kegiatan Dinas.	5	3	15	I
B	<u>Tantangan:</u>				
	a. Menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam, khususnya sektor kelautan dan perikanan, terutama terjadinya tekanan pada sumberdaya perikanan tangkap;	10	4	40	II
	b. Menurunnya permintaan pasar (terutama luar negeri) akibat teknologi pengolahan yang kurang memadai;	5	4	20	II
	c. Belum meratanya pembangunan ekonomi wilayah pesisir, terutama antara pesisir Utara dan	5	3	15	III

No.	Faktor Eksternal Strategik	Bobot	Rating	Skor	Prioritas
d.	Selatan Jawa Tengah; Globalisasi (free trade) mengancam eksistensi industri Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah;	5	3	15	III
e.	Lemahnya penegakan hukum dan rawannya konflik antar kepentingan, sehingga perlu dilakukan revitalisasi dan pembinaan/ sosialisasi peraturan perundang- undangan Perikanan; dan	5	4	20	III
f.	Fluktuasi biaya kegiatan berkaitan dengan fluktuasi komponen biaya BBM. Penyesuaian anggaran diusulkan dalam perubahan anggaran; dan	5	3	15	IV
g.	Banyaknya aset dinas yang sudah tua dan teknologi pengelolaan sumber daya yang tertinggal, sehingga perlu upaya perbaikan dan pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis dan non-Teknis.	10	4	40	I
JUMLAH		100			

6.3 Penetapan Asumsi Strategis KAFI dan KAFE melalui Analisis SWOT

Berdasarkan hasil penetapan prioritas pada penyusunan KAFI dan KAFE yang menentukan kinerja pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dilakukan analisis yang mendalam untuk menentukan asumsi-asumsi strategik dengan Analisis SWOT. Hasil analisis SWOT pada Rencana Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2013 ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6.3. Analisis SWOT Dalam Rangka Menentukan Asumsi Strategis Pada Rencana Strategis Pembangunan Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013

KAFI	Strengths (S)	Weakness (W)
KAFE	• Potensi Sumber daya Alam (waduk, sungai, kolam, sawah, laut, dan sebagainya) yang termanfaatkan baru $\pm$ 15% sehingga masih terbuka luas untuk dikembangkan; • Peran pelaku usaha perikanan yang semakin meningkat dan proaktif, serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan investasi). • Adanya komitmen pemerintah terhadap Perencanaan Pembangunan di wilayah pesisir dan laut dan disertai dukungan Anggaran APBD dan APBN untuk bidang Kelautan dan Perikanan; • Adanya Payung Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan di sektor Kelautan dan Perikanan yang mengatur kewenangan, aturan, petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kedinasan; • Adanya kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, pasarana dan teknologi di sektor perikanan, secara optimal dan bertanggung jawab; • Adanya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil; • Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung stakeholders, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan.	• Rendahnya kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan yang disebabkan kurangnya penguasaan teknis, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kemampuan ekonomi; • Kurangnya jumlah SDM (Pegawai) Dislutkan Jawa Tengah yang berkualifikasi memadai; • Kondisi dan Lokasi Aset Dinas terpecah di seluruh Jawa Tengah. • Terbatasnya data dan informasi wilayah pesisir; • Lemahnya Sanksi dan Apresiasi terhadap Peraturan Perundang-undangan (Hukum); • Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan khususnya tangkap, yang disebabkan oleh besarnya anggaran yang diperlukan untuk pembangunan; • Kegiatan Anggaran APBD untuk kegiatan Diskanlut tidak sesuai Jadwal Kerja;

Opportunities (O)	Asumsi Strategi (SO):	Asumsi Strategi (WO):
• Pengembangan/Peningkatan kemampuan SDM; • Jaminan terpenuhinya dan kelayakan pemakaian barang inventarisasi untuk menunjang kegiatan Dinas. • Peningkatan Citra komoditas Perikanan saat ini sebagai salah satu sumber protein pangan unggulan dan maraknya paradigma blue evolution; • Peningkatan minat investasi khususnya bagi perikanan budidaya; • Maraknya bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan sehingga kondisi pemasaran (ekspor) menjadi lebih kondusif; • Globalisasi / diberlakukannya pasar bebas membuka peluang pengembangan pemasaran hasil perikanan; • Penyempurnaan Otonomi dan Peraturan Daerah; • Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD;	1. Potensi Sumberdaya Alam yang ada dioptimasi melalui: ▪ Pengelolaan berbasis kompetensi SDM yang disertai dengan jaminan terpenuhinya kegiatan kerja Dinas melalui kelayakan pemakaian barang inventarisasi yang ada; ▪ Pengelolaan didukung oleh peran aktif pelaku usaha perikanan yang menunjukkan semakin meningkat dan proaktif, serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan investasi) 2. Peningkatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan didukung oleh komitmen pemerintah melalui Program Perencanaan Pembangunan di wilayah pesisir dan laut dan disertai dukungan Anggaran APBD dan APBN, sehingga mampu meningkatkan komoditas perikanan sebagai bahan pangan unggulan. Pembangunan sektor ini juga didukung oleh peningkatan investasi serta bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan sehingga kondisi pemasaran (ekspor) menjadi lebih kondusif, terutama di pasar bebas global. 3. Secara kelembagaan, Kinerja Diskanlut ditopang oleh Payung Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan di sektor Kelautan dan Perikanan yang mengatur kebijakan kewenangan, aturan, petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kedinasan yang sesuai dengan kaidah otonomi daerah. Kebijakan yang mendukung pembangunan sektor kelautan-	1. Kendala rendahnya kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan yang disebabkan kurangnya penguasaan teknis, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kemampuan ekonomi dibenahi melalui Pengembangan/Peningkatan kemampuan SDM, termasuk Pegawai Dinas, sehingga secara internal di lingkup Dinas, tercipta jaminan kualifikasi pemakaian barang inventarisasi yang ada untuk menunjang kegiatan Dinas. 2. Peningkatan minat investasi dan bantuan pengelolaan -seiring dengan meningkatnya citra komoditas Perikanan- akan lebih optimal dengan dilakukannya perbaikan data dan informasi wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan sehingga Kondisi dan Lokasi Aset Dinas yang terpencair di seluruh Jawa Tengah tidak menjadi hambatan, tetapi justru menjadi sumber data yang valid bagi terbentuknya database SD Perikanan. 3. Dilakukannya penyempurnaan terhadap peraturan daerah demi penegakan sanksi serta peningkatan apresiasi terhadap peraturan perundangan di sektor Kelautan-Perikanan sehingga tercipta kepastian hukum yang tetap, yang kemudian akan membuka minat investasi, khususnya di bidang pembangunan sarana dan pra-sarana pendukung Perikanan. 4. Optimalisasi pelaksanaan program kerja Dinas dilakukan melalui pendekatan efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD serta mengeliminasi ketidak sesuaian Anggaran terhadap jadwal Kerja.

	perikanan dalam hal ini adalah: kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, pasarana dan teknologi di sektor perikanan secara optimal dan bertanggung jawab dan kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil. 4. Efektifitas dan efisiensi kinerja Dinas ditopang oleh adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung stakeholders, termasuk di dalamnya didukung oleh kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan, yang disertai dengan pengelolaan pemakaian anggaran APBD secara optimal.	
Threats (T) - Banyaknya aset dinas yang sudah tua dan teknologi pengelolaan sumber daya yang tertinggal, sehingga perlu upaya perbaikan dan pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis dan non-Teknis. - Menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam, khususnya sektor kelautan dan perikanan, terutama terjadinya tekanan pada sumberdaya perikanan tangkap; - Menurunnya permintaan pasar (terutama luar negeri) akibat teknologi pengolahan yang kurang memadai;	Asumsi Strategi (ST): - Perlunya revitalisasi aset-aset dinas, teknologi serta SDM pengelolanya agar tercipta optimalisasi pengelolaan SDA sesuai potensi yang ada dan meminimalisasi fenomena turunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam. - Peningkatan situasi kondusif dalam investasi usaha sektor Kelautan-Perikanan dilakukan melalui terbangunnya payung hukum yang powerful, serta adanya komitmen dari pemerintah, sehingga terbangun investasi yang mampu menutup turunnya kualitas dan kuantitas SDA, kekurangan dalam teknologi pengolahan serta terhindar dari ancaman konflik antar kepentingan. - Pembentukan kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, pasarana dan teknologi serta kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara	Asumsi Strategi (WT): - Rendahnya kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan, serta SDM Dinas diatasi melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis dan non-Teknis, sehingga dapat merevitalisasi aset-aset dan teknologi pengelolaannya, serta meningkatkan proses penyuluhan dari Dinas kepada masyarakat. - Pembangunan database sumberdaya Kelautan-Perikanan sebagai upaya basic-assesment penentuan strategi mengatasi menurunnya kualitas dan kuantitas SDA, rendahnya teknologi pengolahan, belum meratanya pembangunan ekonomi sektor Kelautan-Perikanan, serta mengantisipasi fluktuasi anggaran kerja Dinas. - Penegakan Sanksi Hukum, Peningkatan Apresiasi dan upaya-upaya pembinaan/ sosialisasi terhadap

• Belum meratanya pembangunan ekonomi wilayah pesisir, terutama antara pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah; • Globalisasi (free trade) mengancam eksistensi industri Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah; • Lemahnya penegakan hukum dan rawannya konflik antar kepentingan, sehingga perlu dilakukan revitalisasi dan pembinaan/ sosialisasi peraturan perundang-undangan Perikanan; dan • Fluktuasi biaya kegiatan berkaitan dengan fluktuasi komponen biaya BBM. Penyesuaian anggaran diusulkan dalam perubahan anggaran.	lebih sistemik, pemberdayaan usaha-usaha perikanan skala kecil,serta adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung stakeholders akan mengeliminir faktor-faktor belum meratanya pembangunan ekonomi wilayah pesisir, ancaman globalisasi pasar dan fluktuasi dalam bidang anggaran. Penyesuaian anggaran secara lebih lanjut diusulkan dalam perubahan anggaran.	Peraturan Perundang-undangan diharapkan mampu mengatasi konflik antar kepentingan serta ancaman perdagangan bebas. 4. Penyesuaian anggaran diusulkan dalam perubahan anggaran sehingga Kegiatan Anggaran APBD dapat sesuai dengan Jadwal Kerja Diskanlut.
--	--	---

6.4 Penetapan Prioritas Asumsi Strategis berdasarkan tingkat keterkaitan dengan visi, misi dan nilai-nilai

Penetapan urutan pilihan asumsi strategis diperoleh dengan cara penilaian keterkaitan atau kedekatan asumsi-asumsi strategik dengan visi, misi dan nilai-nilai yang ditetapkan pada Dinas Kelautan dan Perikanan. Skor penilaian keterkaitan atau tingkat kedekatan antara asumsi-asumsi strategis dengan visi, misi dan nilai-nilai dalam empat tingkat keterkaitan adalah:

- Nilai 4 : paling terkait
- Nilai 3 : terkait
- Nilai 2 : kurang terkait
- Nilai 1 : sangat kurang terkait

Penetapan urutan pilihan asumsi strategik Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 – 2013 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 6.4. Penetapan Urutan Pilihan Asumsi Strategik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 – 2013

Asumsi Strategik	Skor Keterkaitan antar Asumsi Strategik dengan:																				Urutan Asumsi Strategik	
	Visi	Misi										Nilai-nilai										
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10		
<u>Asumsi Strategi (SO):</u>																						
1. Potensi Sumberdaya Alam yang ada dioptimasi melalui: ▪ Pengelolaan berbasis kompetensi SDM yang disertai dengan jaminan terpenuhinya kegiatan kerja Dinas melalui kelayakan pemakaian barang inventarisasi yang ada; ▪ Pengelolaan didukung oleh peran aktif pelaku usaha perikanan yang menunjukkan semakin meningkat dan proaktif, serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan investasi)	3	4	3	2	3	4	2	2	2	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	67 (XIV)	
	4	4	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	76 (VII)	

Asumsi Strategik	Skor Keterkaitan antar Asumsi Strategik dengan:																				Urutan Asumsi Strategik	
	Visi	Misi										Nilai-nilai										
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10		
2. Peningkatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan didukung oleh komitmen pemerintah melalui Program Perencanaan Pembangunan di wilayah pesisir dan laut dan disertai dukungan Anggaran APBD dan APBN, sehingga mampu meningkatkan komoditas perikanan sebagai bahan pangan unggulan. Pembangunan sektor ini juga didukung oleh peningkatan investasi serta bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan sehingga kondisi pemasaran (ekspor) menjadi lebih kondusif, terutama di pasar bebas global.	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79 (II)		
3. Secara kelembagaan, Kinerja Diskanlut ditopang oleh Payung Hukum berupa Peraturan	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	77 (V)		

Asumsi Strategik	Skor Keterkaitan antar Asumsi Strategik dengan:																				Urutan Asumsi Strategik	
	Visi	Misi										Nilai-nilai										
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10		
Perundang-undangan di sektor Kelautan dan Perikanan yang mengatur kebijakan kewenangan, aturan, petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kedinasan yang sesuai dengan kaidah otonomi daerah. Kebijakan yang mendukung pembangunan sektor kelautan-perikanan dalam hal ini adalah: kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, pasarana dan teknologi di sektor perikanan secara optimal dan bertanggung jawab dan kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil.																						
4. Efektifitas dan efisiensi kinerja Dinas ditopang oleh adanya lembaga pemerintahan yang	3	4	2	2	4	4	3	3	3	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	70 (XII)		

Asumsi Strategik	Skor Keterkaitan antar Asumsi Strategik dengan:																				Urutan Asumsi Strategik	
	Visi	Misi										Nilai-nilai										
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10		
menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung stakeholders, termasuk di dalamnya didukung oleh kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan, yang disertai dengan pengelolaan pemakaian anggaran APBD secara optimal.																						
<u>Asumsi Strategi (ST):</u>																						
1. Perlunya revitalisasi aset-aset dinas, teknologi serta SDM pengelolanya agar tercipta optimalisasi pengelolaan SDA sesuai potensi yang ada dan meminimalisasi fenomena turunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam.	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	76 (VIII)	
2. Peningkatan situasi kondusif dalam investasi usaha sektor Kelautan-Perikanan dilakukan melalui terbangunnya payung hukum yang powerfull, serta adanya	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	78 (IV)	

Asumsi Strategik	Skor Keterkaitan antar Asumsi Strategik dengan:																				Urutan Asumsi Strategik	
	Visi	Misi										Nilai-nilai										
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10		
komitmen dari pemerintah, sehingga terbangun investasi yang mampu menutup turunnya kualitas dan kuantitas SDA, kekurangan dalam teknologi pengolahan serta terhindar dari ancaman konflik antar kepentingan.																						
3. Pembentukan kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, prasarana dan teknologi serta kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik, pemberdayaan usaha-usaha perikanan skala kecil,serta adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung stakeholders akan mengeliminir faktor-faktor belum meratanya pembangunan ekonomi wilayah pesisir, ancaman globalisasi pasar dan	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	76 (IX)	

Asumsi Strategik	Skor Keterkaitan antar Asumsi Strategik dengan:																				Urutan Asumsi Strategik	
	Visi	Misi										Nilai-nilai										
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10		
fluktuasi dalam bidang anggaran. Penyesuaian anggaran secara lebih lanjut diusulkan dalam perubahan anggaran.																						
<u>Asumsi Strategi (WO):</u>																						
1. Kendala rendahnya kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan yang disebabkan kurangnya penguasaan teknis, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kemampuan ekonomi dibenahi melalui Pengembangan/Peningkatan kemampuan SDM, termasuk Pegawai Dinas, sehingga secara internal di lingkup Dinas, tercipta jaminan kualifikasi pemakaian barang inventarisasi yang ada untuk menunjang kegiatan Dinas.	4	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	77 (VI)	
2. Peningkatan minat investasi dan bantuan pengelolaan -seiring	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	80 (I)	

Asumsi Strategik	Skor Keterkaitan antar Asumsi Strategik dengan:																				Urutan Asumsi Strategik	
	Visi	Misi										Nilai-nilai										
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10		
dengan meningkatnya citra komoditas Perikanan- akan lebih optimal dengan dilakukannya perbaikan data dan informasi wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan sehingga Kondisi dan Lokasi Aset Dinas yang terpencar di seluruh Jawa Tengah tidak menjadi hambatan, tetapi justru menjadi sumber data yang valid bagi terbentuknya database SD Perikanan.																						
3. Dilakukannya penyempurnaan terhadap peraturan daerah demi penegakan sanksi serta peningkatan apresiasi terhadap peraturan perundangan di sektor Kelautan-Perikanan sehingga tercipta kepastian hukum yang tetap, yang kemudian akan membuka minat investasi, khususnya di bidang	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	74 (X)	

Asumsi Strategik	Skor Keterkaitan antar Asumsi Strategik dengan:																				Urutan Asumsi Strategik	
	Visi	Misi										Nilai-nilai										
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10		
pembangunan sarana dan pra-sarana pendukung Perikanan.																						
4. Optimalisasi pelaksanaan program kerja Dinas dilakukan melalui pendekatan efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD serta mengeliminasi ketidak sesuaian Anggaran terhadap jadwal Kerja.	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	65 (XV)	
<u>Asumsi Strategi (WT):</u>																						
1. Rendahnya kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan, serta SDM Dinas diatasi melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis dan non-Teknis, sehingga dapat merevitalisasi aset-aset dan teknologi pengelolaannya, serta meningkatkan proses penyuluhan dari Dinas kepada masyarakat.	4	4	3	4	3	4	4	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	73 (XI)	
2. Pembangunan database sumberdaya Kelautan-Perikanan sebagai upaya	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	79 (III)	

Asumsi Strategik	Skor Keterkaitan antar Asumsi Strategik dengan:																				Urutan Asumsi Strategik	
	Visi	Misi										Nilai-nilai										
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10		
basic-assesment penentuan strategi mengatasi menurunnya kualitas dan kuantitas SDA, rendahnya teknologi pengolahan, belum meratanya pembangunan ekonomi sektor Kelautan-Perikanan, serta mengantisipasi fluktuasi anggaran kerja Dinas.																						
3. Penegakan Sanksi Hukum, Peningkatan Apresiasi dan upaya-upaya pembinaan/ sosialisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan diharapkan mampu mengatasi konflik antar kepentingan serta ancaman perdagangan bebas.	4	4	4	3	4	3	3	2	2	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	70(XIII)	
4. Penyesuaian anggaran diusulkan dalam perubahan anggaran sehingga Kegiatan Anggaran APBD dapat sesuai dengan Jadwal Kerja Diskanlut.	3	3	2	2	3	4	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63 (XVI)	

6.4 Penetapan Faktor-faktor Kunci Keberhasilan (FKK)

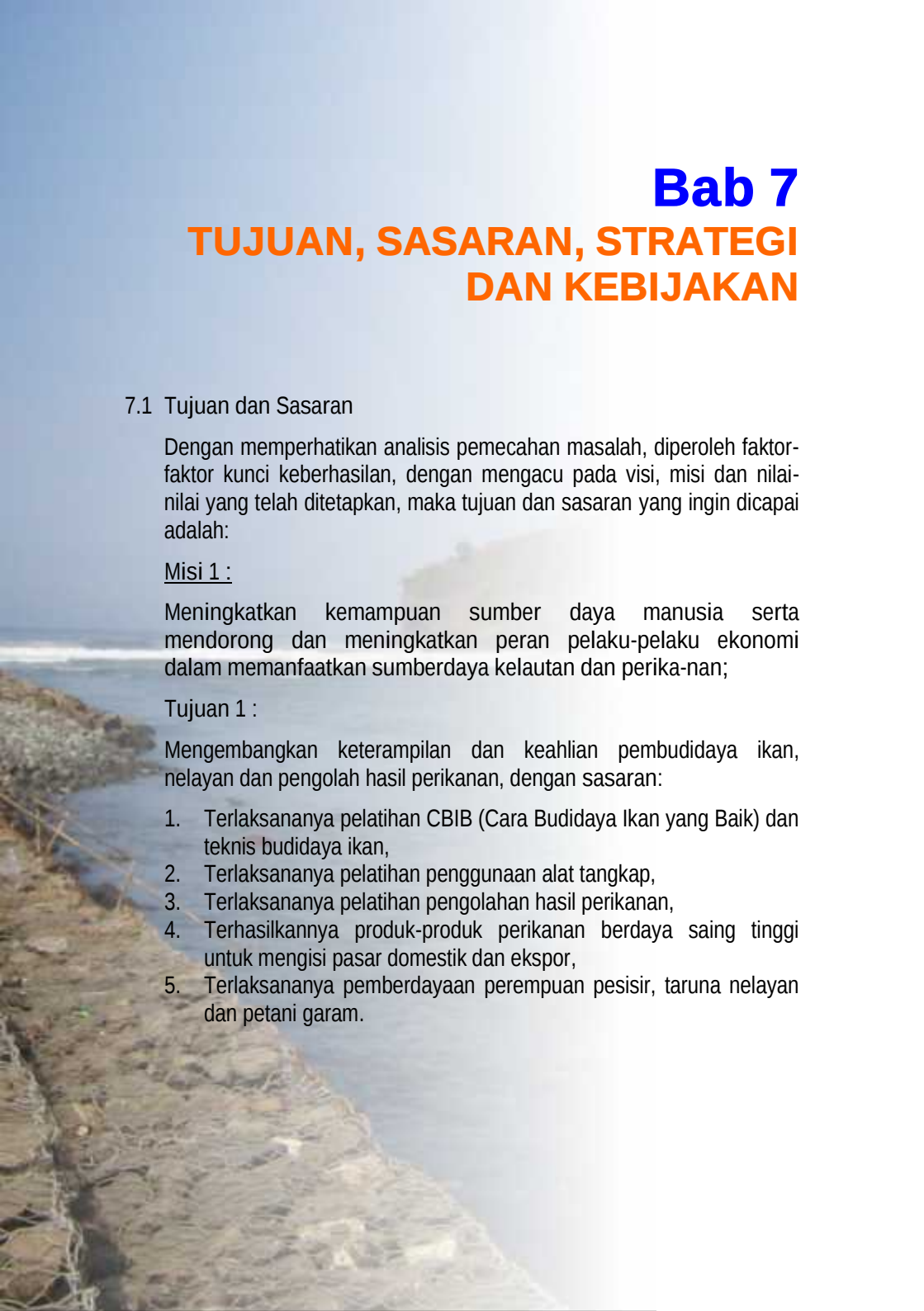
Berdasarkan hasil analisis keterkaitan antara berbagai asumsi stratejik dengan visi, misi dan nilai-nilai; skala prioritas faktor kunci keberhasilan dalam rangka pengelolaan Kelautan dan Perikanan secara lestari untuk kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah adalah:

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya yang diiringi peningkatan minat investasi dan bantuan pengelolaan -seiring dengan meningkatnya citra komoditas Perikanan- akan lebih optimal dengan dilakukannya perbaikan data dan informasi wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan sehingga identifikasi kondisi, lokasi, potensi dan permasalahan pada lokasi aset Dinas yang terpencar di seluruh Jawa Tengah tidak menjadi hambatan, tetapi justru menjadi sumber data yang valid bagi terbentuknya database SD Perikanan. Pembangunan database sumberdaya Kelautan-Perikanan juga dapat dipergunakan sebagai upaya basic-assesment penentuan strategi mengatasi menurunnya produksi perikanan tangkap dan budidaya, strategi rehabilitasi dan konservasi untulk peningkatan kualitas kualitas habitat vital di pesisir/laut, mengatasi rendahnya teknologi pengolahan, menanggulangi belum meratanya pembangunan ekonomi sektor Kelautan-Perikanan, serta mengantisipasi fluktuasi anggaran kerja Dinas.
2. Peningkatan pembangunan bidang kelautan dan perikanan didukung oleh komitmen pemerintah melalui Program Perencanaan Pembangunan di wilayah pesisir dan laut dan disertai dukungan Anggaran APBD dan APBN, sehingga mampu meningkatkan komoditas perikanan sebagai bahan pangan unggulan. Pembangunan bidang ini juga didukung oleh peningkatan investasi serta bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan sehingga kondisi pemasaran (ekspor) menjadi lebih kondusif, terutama di pasar bebas global. Di sisi lain, peningkatan produksi perikanan akan semakin kondusif dengan upaya peningkatan konsumsi makan ikan sebagai sumber protein hewani unggulan.

3. Peningkatan situasi kondusif dalam investasi usaha sektor Kelautan-Perikanan dilakukan melalui terbangunnya payung hukum yang powerful, sehingga terbangun minat investasi yang mampu menutup turunnya kualitas dan kuantitas SDA, kekurangan dalam teknologi pengolahan serta terhindar dari ancaman konflik antar kepentingan. Selain itu, secara kelembagaan, kinerja Diskanlut juga ditopang oleh Payung Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan yang mengatur kebijakan kewenangan, aturan, petunjuk teknis dan pelaksanaan dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi kedinasan yang sesuai dengan kaidah otonomi daerah. Kebijakan yang mendukung pembangunan sektor kelautan-perikanan dalam hal ini adalah: kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, prasarana dan teknologi di sektor perikanan secara optimal dan bertanggung jawab dan kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil.
4. Kendala rendahnya kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan yang disebabkan kurangnya penguasaan teknis, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kemampuan ekonomi dibenahi melalui Pengembangan/Peningkatan kemampuan SDM, termasuk Pegawai Dinas, sehingga secara internal di lingkup Dinas, tercipta jaminan kualifikasi pemakaian barang inventarisasi yang ada untuk menunjang kegiatan Dinas.
5. Pengelolaan Potensi SDA Kelautan dan Perikanan didukung oleh peran aktif pelaku usaha perikanan yang menunjukkan semakin meningkat, iklim dunia usaha yang semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan investasi) serta peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan-perikanan.
6. Perlunya penyediaan dan pengembangan sarana-prasarana serta revitalisasi aset-aset dinas, teknologi dan SDM pengelolanya agar tercipta optimalisasi pengelolaan SDA sesuai

potensi yang ada dan meminimalisasi fenomena turunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam. Rendahnya kemampuan pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan, serta SDM Dinas diatasi melalui pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat Teknis dan non-Teknis, serta meningkatkan proses penyuluhan dari Dinas kepada masyarakat.

7. Pembentukan kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, prasarana dan teknologi serta kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik, pemberdayaan usaha-usaha perikanan skala kecil, dukungan kelayakan pemakaian kekayaan/Aset Barang Daerah/ barang inventarisasi yang ada serta adanya lembaga pemerintahan lingkup Kelautan dan Perikanan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung stakeholders akan mengeliminir faktor-faktor belum meratanya pembangunan ekonomi wilayah pesisir, ancaman globalisasi pasar dan fluktuasi dalam bidang anggaran.
8. Optimalisasi pelaksanaan program kerja Dinas dilakukan melalui pendekatan efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD serta mengeliminasi ketidak sesuaian Anggaran terhadap jadwal Kerja serta penyesuaian-penyesuaian terhadap fluktuasi komponen biaya di lapangan, seperti: perubahan harga BBM.



Bab 7

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

7.1 Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan analisis pemecahan masalah, diperoleh faktor-faktor kunci keberhasilan, dengan mengacu pada visi, misi dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

Misi 1 :

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia serta mendorong dan meningkatkan peran pelaku-pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan;

Tujuan 1 :

Mengembangkan keterampilan dan keahlian pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan, dengan sasaran:

1. Terlaksananya pelatihan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan teknis budidaya ikan,
2. Terlaksananya pelatihan penggunaan alat tangkap,
3. Terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perikanan,
4. Terhasilkannya produk-produk perikanan berdaya saing tinggi untuk mengisi pasar domestik dan ekspor,
5. Terlaksananya pemberdayaan perempuan pesisir, taruna nelayan dan petani garam.

Tujuan 2 :

Mengembangkan keterampilan dan keahlian tenaga teknis Dinas Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran:

1. Terlaksananya pelatihan tenaga teknis Dinlutkan melalui diklat dan kursus ketrampilan dan keahlian kerja,
2. Terjaminnya kualifikasi pemakaian barang inventarisasi yang ada untuk menunjang kegiatan Dinas.

Misi 2 :

Meningkatkan dan menjaga daya dukung lahan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan;

Tujuan 1 :

Mewujudkan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari, dengan sasaran:

1. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir (Kelompok Masyarakat Pengawas /POKMASWAS) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta merangsang tumbuhnya POKMASWAS baru,
2. Terlaksananya rehabilitasi ekosistem habitat pesisir dan laut, dan restocking jenis sumberdaya ekonomis penting untuk peningkatan kualitas ekosistem vital di pesisir dan laut,
3. Terbentuknya database sebagai basis strategi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tujuan 2 :

Meningkatkan manfaat sosial bidang Kelautan dan Perikanan bagi masyarakat, dengan sasaran:

1. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan,
2. Terwujudnya pengembangan aneka usaha dan jasa kelautan dan perikanan secara sustainable.

Misi 3 :

Mengembangkan alternatif pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan ;

Tujuan 1 :

Membangun database sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi alternatif pengusahaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran:

1. Terselenggaranya perbaikan data dan sistem informasi Kelautan,
2. Terselenggaranya Perbaikan Data Statistik Perikanan melalui Pelatihan 510 Petugas Pengumpul dan pengolah Data Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan tingkat Kab./Kota.

Tujuan 2 :

Memanfaatkan database sumberdaya bidang Kelautan dan Perikanan untuk tujuan ekonomi masyarakat, dengan sasaran:

1. Terbentuknya alternatif usaha di bidang penangkapan ikan,
2. Terbentuknya alternatif usaha di bidang budidaya perairan,
3. Terbentuknya alternatif usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,
4. Terbentuknya alternatif pengusahaan kelautan-perikanan lainnya, seperti tambak garam, aktivitas perempuan dan taruna pesisir, serta usaha-usaha lain yang tidak bertumpu pada eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Misi 4 :

Meningkatkan iklim usaha yang kondusif;

Tujuan 1 :

Memperbaiki sistem data dan informasi wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan, dengan sasaran:

1. Teridentifikasinya kondisi dan potensi usaha di wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan,
2. Terjadinya peningkatan investasi serta bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan,
3. Terjadinya efisiensi pelayanan perijinan SIUP, dll di lingkungan Dinlutkan.

Tujuan 2 :

Membangun sistem regulasi dan payung hukum yang powerfull, dengan sasaran:

1. Terbangunnya minat investasi di bidang penangkapan ikan, budidaya perairan, pengolahan dan pemasaran Perikanan maupun jasa Kelautan.
2. Terhindarnya dari ancaman konflik antar kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan,
3. Terbangunnya kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, pasarana dan teknologi di sektor perikanan secara optimal dan bertanggung jawab,
4. Terbangunnya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil,
5. Terciptanya peningkatan peran aktif pelaku usaha perikanan (termasuk dalam aspek finansial, perbankan dan investasi),
6. Meningkatkan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha yang efisien di bidang agribisnis

Misi 5 :

Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan;

Tujuan 1 :

Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan, dengan sasaran:

1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarannya,
2. Meningkatkan produksi perikanan budidaya serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarannya,
3. Peningkatan Pengembangan Kawasan: gurame, lele, patin, nila, kepiting, rumput laut, udang, paket budidaya agropolitan di Kawasan agropolitan,
4. Meningkatkan konsumsi makan ikan dan ekspor produk perikanan.

Tujuan 2 :

Peningkatan produksi perikanan sebagai sektor unggulan, dengan sasaran:

1. Meningkatkan minat investasi dan bantuan pengelolaan wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan,
2. Terciptanya perbaikan data dan informasi produktivitas wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan,
3. Terjadinya peningkatan bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan,
4. Terjadinya peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan dan distribusi bahan pangan komoditas perikanan.

Tujuan 3 :

Meningkatkan kualitas Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan, dengan sasaran:

1. Terciptanya dukungan Anggaran APBD dan APBN yang tepat sasaran dan waktu,
2. Terbentuknya Payung Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan yang mengatur kebijakan kewenangan, aturan, petunjuk teknis dan pelaksanaan pengelolaan yang sesuai dengan kaidah otonomi daerah,
3. Terjaminnya Pengembangan / Peningkatan kemampuan SDM pengelola.

Misi 6 :

Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan;

Tujuan 1 :

Meningkatkan kualitas lingkungan pesisir dan sumberdaya kelautan, dengan sasaran:

1. Terlaksananya rehabilitasi dan konservasi untuk peningkatan kualitas ekosistem vital di pesisir dan laut,
2. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Tujuan 2 :

Meningkatkan minat investasi dan bantuan pengelolaan wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan, dengan sasaran:

1. Terciptanya perbaikan data dan informasi wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan,
2. Terjadinya peningkatan bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan.

Tujuan 3 :

Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola, dengan sasaran:

1. Terjadinya peningkatan kemampuan dan pendapatan nelayan,
2. Terjadinya peningkatan kemampuan dan pendapatan petani ikan,
3. Terjadinya peningkatan kemampuan dan pendapatan pengolah hasil perikanan dan pemasarannya,
4. Terjadinya peningkatan kemampuan teknis pegawai Dinlutkan.

Misi 7 :

Peningkatan dan penguatan jaringan serta daya tembus pemasaran produk serta jasa kelautan;

Tujuan 1 :

Meningkatkan bimbingan investasi oleh seksi Pelayanan Usaha Perikanan Dinlutkan, dengan sasaran:

1. Tercapainya peningkatan bimbingan investasi, kerjasama dengan instansi terkait (Lembaga Keuangan, BPM, dll),
2. Tercapainya peningkatan Sosialisasi kepada pengolah dan pemasar, diikuti dengan pembinaan dan penegakan aturan.

Tujuan 2 :

Memperbaiki sistem data dan informasi produk perikanan serta jasa kelautan, dengan sasaran:

1. Teridentifikasinya kondisi dan potensi usaha di wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan,
2. Terjadinya peningkatan investasi serta bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan,
3. Terjadinya efisiensi pelayanan perijinan SIUP, dll di lingkungan Dinlutkan.

Misi 8 :

Peningkatan dan penguatan sistem informasi kelautan dan perikanan meliputi distribusi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta potensi pasar;

Tujuan 1 :

Memperbaiki dan meningkatkan sistem data dan informasi wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan, dengan sasaran:

1. Teridentifikasinya kondisi dan potensi usaha di wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan,
2. Terjadinya peningkatan investasi serta bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan,
3. Terjadinya efisiensi pelayanan perijinan SIUP, dll di lingkungan Dinlutkan.

Tujuan 2 :

Mewujudkan tingkat pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari, dengan sasaran:

1. Terlaksananya rehabilitasi dan konservasi untuk peningkatan kualitas ekosistem vital di pesisir dan laut,
2. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan,
3. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan,
4. Terwujudnya pengembangan aneka usaha dan jasa kelautan dan perikanan secara sustainable.

Misi 9 :

Memberdayakan sosial ekonomi.

Tujuan :

Membangun sistem pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pembudidaya, dengan sasaran:

1. Tercapainya peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat pesisir termasuk nelayan dan pembudidaya ikan.
2. Terbangunnya minat investasi di bidang penangkapan ikan, budidaya perairan, pengolahan dan pemasaran Perikanan maupun jasa Kelautan.

3. Terhindarnya dari ancaman konflik antar kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan,
4. Terbangunnya kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, pasarana dan teknologi di sektor perikanan secara optimal dan bertanggung jawab,
5. Terbangunnya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil,
6. Terciptanya peningkatan peran aktif pelaku usaha perikanan (termasuk dalam aspek finansial, perbankan dan investasi).

7.2 Strategi

Untuk mewujudkan tujuan, diperlukan strategi yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Berdasar pada tujuan dan sasaran di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki strategi sebagai berikut:

- 1) Memanfaatkan peluang usaha masyarakat pesisir yang belum optimal seperti usaha garam rakyat, aktivitas perempuan pesisir dan taruna pesisir, dan kemungkinan pengenalan kegiatan usaha lain yang tidak bertumpu pada eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 2) Memanfaatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) untuk berperan serta dalam pengawasan dan penegakan hukum dalam pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, menumbuhkan kelompok-kelompok baru dan membantu sarana kelengkapan operasionalnya, dengan tetap melakukan operasi pengawasan bersama aparat terkait;
- 3) Mengembangkan dan memasyarakatkan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, mendekatkan fishing ground dengan pembuatan rumpon tetap dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
- 4) Mengembangkan usaha perikanan budidaya sesuai komoditas unggulan yang berbasis kawasan dan diminati pasar, dengan

meningkatkan mutu hasilnya melalui penerapan good aquaculture practices;

- 5) Meningkatkan usaha pengolahan dan pemasaran yang masih tradisional dalam hal mutu produknya guna pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor, dengan tetap membina usahapengolahan dan pemasaran modern; dan
- 6) Meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di laut / pesisir, meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran-serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem/ lingkungan melalui pembinaan, pelatihan dan sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku.

7.3 Kebijakan

Dalam mewujudkan strategi tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada penyusunan program-program kerjanya 5 (lima) tahun ke depan memiliki kebijakan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan SDM dan kapasitas kelembagaan masyarakat, utamanya masyarakat pesisir dalam optimalisasi pemanfaatan sumberdaya kelautan dan mengurangi ketergantungan terhadap eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan;
- 2) Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperbesar peran serta Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- 3) Melaksanakan optimalisasi usaha perikanan tangkap, memasyarakatkan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
- 4) Peningkatan usaha perikanan budidaya dengan dukungan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan serta meningkatkan kemampuan teknis pembudidayaan ikan, terutama dalam penerapan good aquaculture practices;

- 5) Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan mutu produk, teknologi, sanitasi dan higienis agar dapat memenuhi persyaratan mutu ekspor maupun pemenuhan kebutuhan dalam negeri; dan
- 6) Rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut / pesisir baik dengan penanganan fisik maupun vegetasi serta meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem/lingkungan.

Bab 8

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN, KELOMPOK SASARAN, PENDANAAN INDIKATIF DAN INDIKATOR KINERJA

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah merupakan bagian dalam rencana Strategis tahun 2008- 2013, dengan mencakup Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran pada kurun waktu lima tahun (tahun 2008 - 2013). Sasaran dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Program-program pembangunan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2008 - 2013 meliputi:

- 1) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
- 2) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- 3) Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
- 4) Program Pengembangan Perikanan Budidaya;
- 5) Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan; dan
- 6) Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yaitu melalui kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 8.1 Matriks Perencanaan Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
Terwujudnya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Sebagai Sumber Utama Penghidupan, Pendapatan dan Kesejahteraan yang berkelanjutan	1. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia serta mendorong dan meningkatkan peran pelaku-pelaku ekonomi dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan perikanan	1) Mengembangkan keterampilan dan keahlian pembudidaya ikan, nelayan dan pengolah hasil perikanan	a. <u>Bidang Budidaya</u> , terlaksananya: • Pelatihan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan teknis budidaya ikan sebanyak 250 orang dan atau 10 Pokdakan Udang, dan 3 Perusahaan hatchery swasta yang memperoleh sertifikat CBIB; • Pengawasan dan kegiatan POKDAKAN di kab/kota sebanyak 900 / Jumlah kelompok pembudidaya: 1.390; • Pelatihan 150 Petugas Pengumpul dan pengolah Datik Perikanan Budidaya	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budidaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir – Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan – Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan – Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Produksi lainnya – Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Komunikasi

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			b. <u>Bidang Perikanan Tangkap</u> terlaksananya: • Pelatihan penggunaan alat tangkap 360 petugas, pengadaan alat tangkap ramah lingkungan 60 paket, reservat 18 paket dan palka ikan 6 paket • Pelatihan 210 Petugas Pengumpul dan pengolah Datik Perikanan Tangkap tingkat Kabupaten/ Kota • Beraktivitasnya 21 POKMASWAS, tumbuhnya 30 kelompok baru, dan terlaksananya 50 kali operasi pengawasan	Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	– Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan – Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan – Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya PerikananTangkap – Revitalisasi Perikanan Tangkap – Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman dan Statistik Perikanan Tangkap
			c. <u>Bidang Usaha Kelautan Dan Perikanan:</u> terlaksananya:	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	- Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengu-lahan Hasil Perikanan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			• Pelatihan HACCP untuk 150 orang, • Pelatihan 150 petugas pengumpul dan pengolah Datik P2HP • Revitalisasi kawasan pengolah dan pemasar ikan 10 lokasi, • Bantuan alat pengolah 70 paket dan pemasaran ikan 70 paket, cold box 1000 bh • Terhasilkannya produk-produk perikanan dengan jaminan kualitas dan berdaya saing tinggi untuk mengisi pasar domestik dan ekspor • Gerakan gemar makan ikan di 15 kabupaten/kota di Jawa Tengah			- Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan
			d. <u>Bidang Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil:</u> • Pemberdayaan	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	— Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			800 orang perempuan pesisir, 275 orang taruna nelayan dan 250 orang petani garam dan Pelatihan Konservasi Sumberdaya, 400 orang.			– Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan
			Rehabilitasi wilayah pesisir yang terkena abrasi dengan pemasangan APO 360 unit & penanaman mangrove sebanyak 1.017.500 batang, bantuan benih ikan sebanyak 1.144.000 ekor dan Penebaran benih ikan di laut 40.900 ekor, restocking di perairan pedalaman 400.000 ekor	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumberdaya Alam	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria, Teluk dan Habitat Vital terpadu

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
		2) Mengembangkan keterampilan dan keahlian tenaga teknis Dinas Kelautan dan Perikanan	a. Terlaksananya pelatihan tenaga teknis Dinlutkan melalui diklat dan kursus ketrampilan dan keahlian kerja untuk 15 Kegiatan BinteK, 375 orang. b. Terlaksananya Pelatihan Ekosistem Mangrove kepada 765 orang; 5.600 anak; dan Pelatihan Konservasi Sumberdaya kepada 525 orang. c. Terjaminnya kualifikasi pemakaian barang inventarisasi yang ada untuk menunjang kegiatan Dinas.	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pengembangan Perikanan	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pengembangan Perikanan	– Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal – Optimalisasi dan Pengembangan Laboratorium Karantina dan Kesehatan Ikan, HACCP, CBIB, Penggunaan Alat Tangkap, Pengolahan Hasil Perikanan – Optimalisasi dan Pengembangan Laboratorium Karantina dan Kesehatan Ikan, HACCP, CBIB, Penggunaan Alat Tangkap, Pengolahan Hasil Perikanan – Pelaporan SABMN (Sistem Akuntansi Barang Milik Negara)
	2. Meningkatkan dan menjaga daya dukung lahan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan	1) Mewujudkan pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari	a. Beraktivitasnya 21 kelompok kelembagaan masyarakat di bidang pengendalian dan pengawasan	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan dan Agribisnis	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan dan Agribisnis	– Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri dan Eksport Hasil Perikanan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
	perikanan		sumberdaya kelautan dan perikanan (POKMASWAS), tumbuhnya 30 kelompok baru, dan terlaksananya 50 kali operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta merangsang tumbuhnya POKMASWAS baru			– Peningkatan koordinasi Manajemen Usaha Perikanan dan Kelembagaan SDM
			b. Tertanganinya kerusakan di wilayah pesisir karena terjadi abrasi seluas 4.072,17 Ha, antara lain dengan pemasangan APO (Alat Pemecah Ombak) sebanyak 360 unit dan Penanaman mangrove sebanyak 1.017.500 batang	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	– Pengelolaan dan Rehabilitasi Habitat Vital Terpadu

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			c. Terehabilitasinya ekosistem habitat vital seluas 3.559,60 Ha dengan pemasangan Terumbu Karang Buatan (TKB) sebanyak 225 unit; transplantasi karang sebanyak 265 unit dan penebaran benih ikan di laut sebanyak 40.900 ekor serta di pedalaman 400.000 ekor.			
			d. Terbentuknya database sebagai basis strategi pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang diperbaharui tiap tahunnya.	Penyiapan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	– Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan sistem, data, statistik dan informasi
		2) Meningkatkan manfaat sosial bidang Kelautan dan Perikanan	a. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan bidang kelautan	Penyiapan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan	Program Pengembangan Sistem Pengawasan dan	– Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAIPI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
		bagi masyarakat	dan perikanan melalui 21 POKMASWAS, tumbuhnya 30 kelompok baru, dan terlaksananya 50 kali operasi pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta merangsang tumbuhnya POKMASWAS baru	Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	dan Perikanan – Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir
			b. Terwujudnya pengembangan aneka usaha dan jasa kelautan dan perikanan secara sustainable melalui 40 pameran, sar industri kecil di 10 kabupaten, program gemar ikan,, revitalisasi kawasan pengolah ikan 10 lokasi, bantuan alat pengolah 70 paket dan pemasaran ikan 70 paket	Pelaksanaan Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan	– Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut – Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
	3. Mengembangkan alternatif pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan	1) Membangun database sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi alternatif pengusahaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan	a. Terselenggaranya perbaikan data dan sistem informasi Kelautan	Penyiapan Aplikasi Sistem Informasi Kelautan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	– Penyusunan/ Pengumpulan/ Pengolahan/ Updating/Analisa data statistik
			b. Terselenggaranya Perbaikan Data Statistik Perikanan melalui Pelatihan 510 Petugas Pengumpul dan pengolah Datik Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan tingkat Kab./Kota	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Kelautan	Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	– Penyusunan/ Pengumpulan/ Pengolahan/ Updating/Analisa data dan statistik
		2) Memanfaatkan database sumberdaya bidang Kelautan dan Perikanan untuk tujuan ekonomi masyarakat	a. Terbentuknya alternatif usaha di bidang penangkapan ikan,	Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	– Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman dan Statistik Perikanan Tangkap – Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap (RPPK)
			b. Terbentuknya alternatif usaha di bidang budidaya perairan	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan Budidaya	– Peningkatan dan Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Komunikasi – Pengembangan Sarana dan Prasarana dan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
						Produksi Budidaya
			c. Terbentuknya alternatif usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan,	Penyiapan Kegiatan Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis	– Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan – Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan sistem, data, statistik dan informasi
			d. Terbentuknya alternatif pengusahaan kelautan-perikanan lainnya, seperti tambak garam, aktivitas perempuan dan taruna pesisir, serta usaha-usaha lain yang tidak bertumpu pada eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	– Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, melalui pemberdayaan wanita pesisir, taruna pesisir dan petani garam
	4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	1) Memperbaiki sistem data dan informasi wilayah pesisir dan sumberdaya	a. Teridentifikasinya kondisi dan potensi usaha di wilayah pesisir dan sumberdaya	Penyiapan Kegiatan Pengembangan Agribisnis dan Pengembangan	Program Pengembangan Agribisnis dan Pengembangan Aplikasi dan	– Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan sistem, data, statistik dan informasi

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
		Perikanan	Perikanan	Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Teknologi Informasi dan Komunikasi	– Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perikanan – Peningkatan koordinasi Manajemen Usaha Perikanan dan Kelembagaan SDM
			b. Terjadinya peningkatan investasi serta bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Pengembangan Pola Permodalan dan Investasi Dalam Negeri dan Asing
			c. Terjadinya efisiensi pelayanan perijinan SIUP, dll di lingkungan Dinlutkan	Penyiapan Pengembangan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Pengembangan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	– Peningkatan Pelayanan Usaha dan Pengendalian Perijinan Perikanan – Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan – Peningkatan koordinasi Manajemen Usaha Perikanan dan Kelembagaan SDM
		2) Membangun sistem regulasi dan payung	a. Terbangunnya minat investasi di bidang	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya	Program Pengembangan Sumberdaya	– Pengembangan Pola Permodalan dan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
		hukum yang powerfull	penangkapan ikan, budidaya perairan, pengolahan dan pemasaran Perikanan maupun jasa Kelautan	Perikanan	Perikanan	Investasi Dalam Negeri dan Asing – Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan
			b. Terhindarnya dari ancaman konflik antar kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Perikanan	Program Penguatan dan Pengembangan Perikanan	– Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan – Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan
			c. Terbangunnya kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana, prasarana dan teknologi di sektor perikanan secara optimal dan bertanggung jawab	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Input Produksi Perikanan
			d. Terbangunnya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan skala kecil

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			kecil			
			e. Terciptanya peningkatan peran aktif pelaku usaha perikanan (termasuk dalam aspek finansial, perbankan dan investasi)	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budidaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir – Pengembangan Pola Permodalan dan Investasi Dalam Negeri dan Asing
			f. Meningkatkan lapangan kerja dengan produktivitas tinggi dan kesempatan berusaha yang efisien di bidang agribisnis	Penyiapan Pengembangan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Program Pengembangan Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	– Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perikanan
	5. Peningkatan produksi dan produktivitas kelautan dan perikanan	1) Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi perikanan	a. Meningkatkan produksi perikanan tangkap rata-rata sebesar 1,0% per tahun atau penambahan 2.695,7 ton/th, serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarannya	Penyiapan Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	– Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan Tangkap – Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan – Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan – Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
						Prasarana PPP – Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman – Revitalisasi Perikanan Tangkap
			b. Meningkatkan produksi perikanan budidaya rata-rata sebesar 6,62% per tahun atau penambahan $\pm$ 4.971,4 ton/th, serta penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarananya,	Penyiapan Pengembangan Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	– Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Produksi Budidaya – Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar, Payau dan Laut – Revitalisasi Perikanan Budidaya – Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan – Pengembangan dan Peningkatan Perbenihan Ikan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			c. Peningkatan Pengembangan Kawasan: gurame, lele, patin, nila, kepiting, rumput laut, udang, paket budidaya agropolitan 200 paket di 10 kab. Kawasan agropolitan	Penyiapan Pengembangan Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	– Pengembangan Kawasan Perikanan
			d. Meningkatkan Konsumsi Ikan sebesar 2,40%/tahun atau meningkat 0,28 kg/kapita/tahun melalui Program Nasional "Gemar Ikan" dan Peningkatan Ekspor Produk Perikanan sebesar 5,10%/tahun atau $\pm$ 850 ton/tahun	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan – Peningkatan Konsumsi Ikan melalui Program Nasional "Gemar Ikan" dan Promosi Produk Perikanan
		2) Peningkatan produksi perikanan sebagai sektor unggulan	a. Meningkatkan minat investasi dan bantuan pengelolaan wilayah pesisir & sumberdaya Perikanan	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Pengembangan Pola Permodalan & Investasi Dalam Negeri dan Asing – Penyelenggaraan Revitalisasi Usaha

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			b. Terciptanya perbaikan data dan informasi produktivitas wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan	Penyiapan Kegiatan Pengembangan Agribisnis dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Pengembangan Agribisnis dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Industri Perikanan – Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan sistem, data, statistik dan informasi
			c. Terjadinya peningkatan bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Pengembangan Pola Permodalan dan Investasi Dalam Negeri dan Asing – Penyelenggaraan Revitalisasi Usaha Industri Perikanan
			d. Terjadinya peningkatan ketahanan pangan melalui penyediaan dan distribusi bahan pangan komoditas perikanan	Penyiapan Kegiatan Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis	– Pengembangan Kawasan Perikanan
		3) Meningkatkan kualitas Program Perencanaan Pembangunan Kelautan dan	a. Terciptanya dukungan Anggaran APBD dan APBN yang tepat sasaran dan waktu	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Perencanaan/ Implementasi/ – Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
		Perikanan	b. Terbentuknya Payung Hukum berupa Peraturan Perundang-undangan di bidang Kelautan dan Perikanan yang mengatur kebijakan kewenangan, aturan, petunjuk teknis dan pelaksanaan pengelolaan yang sesuai dengan kaidah otonomi daerah	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	– Pembinaan dan Pengembangan Humas dan Hukum – Penataan dan Penegakan Hukum – Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan – Peningkatan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Perikanan dan Kelautan
			c. Terjaminnya Pengembangan / Peningkatan kemampuan SDM pengelola	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan pengelola	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan pengelola	– Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal – Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Pengelola
			a. Terlaksananya rehabilitasi dan konservasi untuk peningkatan kualitas ekosistem vital di pesisir dan laut, melalui penanaman pohon	Pelaksanaan Perlindungan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam	Program Perlindungan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam	– Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan – Pengelolaan dan rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk
	6. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	1) Meningkatkan kualitas lingkungan pesisir dan sumberdaya kelautan				

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			mangrove 1.017.500 biji / batang, terumbu karang buatan 225 unit, transplantasi karang 265 unit, dan penebaran benih ikan di kawasan konservasi / calon kawasan konservasi 1.017.500 ekor			– Pengelolaan dan Rehabilitasi Habitat Vital Terpadu
			b. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, melalui Beraktivitasnya 21 POKMASWAS, tumbuhnya 30 kelompok baru	Penyiapan Pendidikan Luar Sekolah	Program Pendidikan Luar Sekolah	– Pendidikan Kemasyarakatan
		2) Meningkatkan minat investasi dan bantuan pengelolaan	a. Terciptanya perbaikan data dan informasi wilayah pesisir & sumber-	Penyiapan Kegiatan Pengembangan Aplikasi & Teknologi Informasi	Program Pengembangan Aplikasi & Teknologi Informasi &	– Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan sistem, data, statistik dan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAIPI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
		wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan	daya Perikanan	& Komunikasi	Komunikasi	informasi
			b. Terjadinya peningkatan bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Pengembangan Pola Permodalan dan Investasi Dalam Negeri dan Asing – Penyelenggaraan Revitalisasi Usaha Industri Perikanan
	3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola		a. Terjadinya peningkatan kemampuan dan pendapatan nelayan melalui Pelatihan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan 60 paket, reservat 18 paket dan palka ikan 6 paket	Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Tangkap	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	– Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan – Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan – Revitalisasi Perikanan Tangkap
			b. Terjadinya peningkatan kemampuan dan pendapatan petani ikan melalui Pelatihan CBIB (Cara Budidaya Ikan yang Baik), CPIP dan teknis	Pengembangan Perikanan Budidaya	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	– Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Produksi lainnya – Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar, Payau dan Laut

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			budidaya ikan sebanyak 250 orang, 10 Pokdakan Udang, dan 3 Perusahaan hatchery swasta			– Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan – Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan
			c. Terjadinya peningkatan kemampuan dan pendapatan pengolah hasil perikanan dan pemasarannya melalui Pelatihan HACCP untuk 150 orang	Penyiapan Kegiatan Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis	– Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan – Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan
			d. Terjadinya peningkatan kemampuan teknis pegawai Dinlutkan melalui pelatihan tenaga teknis Dinlutkan (diklat dan kursus ketrampilan dan keahlian kerja) untuk 15 Kegiatan BinteK, 375 orang	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan pengelola	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan pengelola	– Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal – Peningkatan Sumberdaya Aparatur dan Pengelola
	7. Peningkatan dan penguatan	1) Meningkatkan bimbingan	a. Tercapainya peningkatan	Penyiapan Pembangunan	Program Pengembangan	– Pembinaan dan Pengembangan Sistem

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
	jaringan serta daya tembus pemasaran produk serta jasa kelautan	investasi oleh seksi Pelayanan Usaha Perikanan Dinlutkan	bimbingan investasi, kerjasama dengan instansi terkait (lembaga keuangan, BPM, dll),	Sumberdaya Perikanan	Sumberdaya Perikanan	Usaha Perikanan
			b. Tercapainya peningkatan Sosialisasi kepada pengolah dan pemasaran, diikuti dengan pembinaan dan penegakan aturan melalui 40 pameran, sarana industri kecil di 10 kabupaten	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Pembinaan/ Penyuluhan Program, Rencana Kerja dan Anggaran – Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan sistem, data, statistik dan informasi
	2) Memperbaiki sistem data dan informasi produk perikanan serta jasa kelautan	2) Memperbaiki sistem data dan informasi produk perikanan serta jasa kelautan	a. Teridentifikasinya kondisi dan potensi usaha di wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan, melalui Pelatihan 150 Petugas Pengumpul dan pengolah Datik Perikanan Tangkap dan Budidaya di tingkat Kab./Kota	Penyiapan Kegiatan Pengembangan Agribisnis dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Pengembangan Agribisnis dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	– Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan sistem, data, statistik dan informasi
			b. Terjadinya peningkatan	Penyiapan Pembangunan	Program Pengembangan	– Pengembangan Pola Permodalan dan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			investasi serta bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan	Sumberdaya Perikanan	Sumberdaya Perikanan	Investasi Dalam Negeri dan Asing – Penyelenggaraan Revitalisasi Usaha Industri Perikanan
			c. Terjadinya efisiensi pelayanan perijinan SIUP, dll di lingkungan Dinlutkan.	Penyiapan Kegiatan Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis	– Peningkatan Pelayanan Usaha dan Pengendalian Perijinan Perikanan – Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan – Peningkatan koordinasi Manajemen Usaha Perikanan dan Kelembagaan SDM
	8. Peningkatan dan penguatan sistem informasi kelautan dan perikanan meliputi distribusi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan serta potensi pasar.	1) Memperbaiki dan meningkatkan sistem data dan informasi wilayah pesisir dan sumberdaya Perikanan	a. Teridentifikasinya kondisi dan potensi usaha di wilayah pesisir dan sb.dy Perikanan, melalui Pelatihan 150 Petugas Pengumpul dan pengolah Datik Perikanan Tangkap dan Budidaya di tingkat Kab./Kota	Penyiapan Kegiatan Pengembangan Agribisnis dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Program Pengembangan Agribisnis dan Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	– Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan sistem, data, statistik dan informasi

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			b. Terjadinya peningkatan investasi serta bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Pengembangan Pola Permodalan dan Investasi Dalam Negeri dan Asing – Penyelenggaraan Revitalisasi Usaha Industri Perikanan
			c. Terjadinya efisiensi pelayanan perijinan SIUP, dll di lingkungan Dinlutkan, Peningkatan kepemilikan SIUP dan SIPI/SIKPI menjadi > 50%; pelayanan menjadi 1 (satu) atap	Penyiapan Kegiatan Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis	– Peningkatan Pelayanan Usaha dan Pengendalian Perijinan Perikanan – Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan – Peningkatan koordinasi Manajemen Usaha Perikanan dan Kelembagaan SDM
		2) Mewujudkan tingkat pengelolaan sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang lestari	a. Terlaksananya rehabilitasi/konservasi untuk peningkatan kualitas ekosistem vital di pesisir dan laut melalui penanaman pohon mangrove 1.017.500 batang, TKB 225	Pelaksanaan Perlindungan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam	Program Perlindungan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Alam	– Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan – Pengelolaan dan rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk – Pengelolaan dan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			unit, transplantasi karang 265 unit, & penebaran benih ikan di kawasan konservasi 400.000 ekor			Rehabilitasi Habitat Vital Terpadu
			b. Tercapainya peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan dan pemanfaatan SD kelautan dan perikanan	Penyiapan Kegiatan Pengembangan Agribisnis	Program Pengembangan Agribisnis	– Peningkatan koordinasi Manajemen Usaha Perikanan dan Kelembagaan SDM
			c. Terwujudnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan	Penyiapan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Program Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	– Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan – Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir
			d. Terwujudnya pengembangan aneka usaha dan jasa kelautan dan perikanan secara sustainable	Pelaksanaan Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut	Program Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut	– Pengembangan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi Laut dan perikanan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
				dan Perikanan	dan Perikanan	
	9. Memberdayakan sosial ekonomi	1) Membangun sistem pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir dan pembudidaya	a. Tercapainya peningkatan usaha dan kesejahteraan masyarakat pesisir termasuk nelayan dan pembudidaya ikan.	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan – Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Input Produksi lainnya
			b. Terbangunnya minat investasi di bidang penangkapan ikan, budidaya perairan, pengolahan dan pemasaran Perikanan maupun jasa Kelautan.	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan – Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan – Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan sistem, data, statistik dan informasi
			c. Terhindarnya dari ancaman konflik antar kepentingan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan,	Pelaksanaan Penguatan dan Pengembangan Perikanan	Program Penguatan dan Pengembangan Perikanan	– Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan – Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan
			d. Terbangunnya kebijakan pengembangan dan modernisasi sarana,	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Input Produksi

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
				KEBIJAKAN	PROGRAM	KEGIATAN POKOK
			prasarana dan teknologi di sektor perikanan secara optimal dan bertanggung jawab,			Perikanan
			e. Terbangunnya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil,	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan skala kecil
			f. Terciptanya peningkatan peran aktif pelaku usaha perikanan (termasuk dalam aspek finansial, perbankan dan investasi).	Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	– Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budidaya Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir – Pengembangan Pola Permodalan dan Investasi Dalam Negeri dan Asing

Tabel 8.2 Matriks Program Lima Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2013

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
1	Bidang Sekretariat <u>Kebijakan:</u> 1. Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	a. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	a. Sinkronisasi Rencana Program Kegiatan	- Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang administrasi satker Dinlutkan Jateng (01) - Meningkatnya akurasi perencanaan pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan	Administrasi Kegiatan: Honor (KPA, Bendahara, PPK, SPM, PUMK, Staf Pengelola Aset)	-	92.605.250.000 5.786.500.000	APBN + APBD APBN	Jawa Tengah
			b. Penyusunan Rencana Kerja		Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan Sistem				
			c. Validasi Rencana Indeks Teknis dan Sinkronisasi DAK dengan Kab./Kota		Akuntansi Pemerintah: VALIDASI DATA INDEKS TEKNIS DAK				
			d. Sosialisasi Hasil-hasil Kegiatan Kelautan dan Perikanan		- ATK - Perlengkapan Peserta SINKRONISASI PERENCANAAN RD DAK - ATK Panitia - Perlengkapan Peserta				
			e. Monitoring dan evaluasi terpadu Program Kegiatan Kelautan-Perikanan	- Tersedianya alat tulis kantor untuk menunjang Evaluasi satker Dinlutkan Jateng - Meningkatnya akurasi Program Kegiatan Kelautan dan Perikanan	Pemantauan dan Evaluasi: MONEV DAK NON DR TINGKAT PROVINSI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN:	-			
					- ATK Panitia - Perlengkapan Peserta MONEV DAK NON DR TINGKAT PROVINSI BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN: - ATK Panitia - Perlengkapan Peserta				

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
			f. Monitoring, Supervisi/ Pengendalian serta Pelaporan DAK,DEKON,TP	Terevaluasinya kegiatan DAK	TEMU TEKNIS MONITORING DAN EVALUASI: • Perjalanan ke Pusat				
	2. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran	b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	a. Kebutuhan Materai dan Pengiriman surat 15 UPTD, 1 unit Dinas	Tersedianya kebutuhan materai dan jasa Surat-Menyurat	1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	-	86.818.750.000 407.000.000	APBD APBD	Jawa Tengah
			b. Biaya telpon, listrik, fax dan sewa bandwidth 1 SKPD, 15 UPTD, 5 Satker	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	2. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Alam dan Listrik	-	6.241.000.000	APBD	Jawa Tengah
			c. Sewa 3 pelabuhan di PPSC Cilacap, PPNP Pekalongan, Pelabuhan Tegal	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran di Cilacap, Pekalongan dan Tegal	3. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran	-	11.572.000.000	APBD	Kota Pekalongan, Cilacap, Kota Tegal
			d. Gedung kantor dinas, mobil dan sepeda motor	Terjaminnya Gedung kantor dinas, mobil dan sepeda motor	4. Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	-	83.100.000	APBD	JawaTengah
			e. Alat tulis kantor untuk 1 SKPD, 15 UPTD, 5 Satker	Tersedianya Alat tulis kantor untuk 1 SKPD, 15 UPTD, 5 Satker	5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	1.736.500.000	APBD	JawaTengah
			f. Barang cetak untuk 1 SKPD, 15 UPTD, 5 Satker	Tersedianya Barang cetak & penggandaan untuk 1 SKPD, 15 UPTD, 5 Satker	6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	1.191.000.000	APBD	Jawa Tengah

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
			g. Lampu dan komponen listrik 1 SKPD, 15 UPTD, 5 Satker	Tersedianya Lampu dan komponen listrik 1 SKPD, 15 UPTD, 5 Satker	7. Kegiatan penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	-	1.016.000.000	APBD	Jawa Tengah
			h. 25 pemotong rumput, 35 PC, 5 kamera, 5 projector, 10 mesin fax	Tersedianya 25 pemotong rumput, 35 PC, 5 kamera, 5 projector, 10 mesin fax	8. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	1.100.000.000	APBD	Jawa Tengah
			i. Bahan pembersih, Gas, Tabung Pemadam	Tersedianya Peralatan rumah Tangga	9. Kegiatan Penyediaan Peralatan rumah Tangga	-	771.000.000	APBD	Jawa Tengah
			j. 6 Media cetak koran dan majalah	Tersedianya Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10. Kegiatan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	191.500.000	APBD	Jawa Tengah
			k. Makan minum rapat dan tamu	Tersedianya Penyediaan Makan Minum	11. Kegiatan Penyediaan Makan Minum	-	842.000.000	APBD	Jawa Tengah
			l. Perjalanan dinas dalam dan luar daerah dinas dan UPTD	Terjaminnya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	12. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Luar Daerah	-	6.191.000.000	APBD	Indonesia
			m. 36 Harlep, Pengelola Anggaran, lembur dan piket	Terjaminnya Jasa Pelayanan Perkantoran	13. Kegiatan Jasa Pelayanan Perkantoran	-	7.908.000.000	APBD	Jawa Tengah
	3. Pelaksanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	a. 5 unit rumah dinas Ngrajek, Muntilan, LPPD, guesthouse	Terjaminnya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	-	694.000.000	APBD	Jawa Tengah

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
			b. 1 gedung kantor dinas, 15 UPTD, 5 Satker	Terjaminnya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	-	2.483.000.000	APBD	Jawa Tengah
			c. 1 sedan, 11 pick up, 12 STW bensin, 9 STW solar, 2 Truk, 10 Sepeda motor	Terjaminnya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	3.150.000.000	APBD	Jawa Tengah
			d. Pemeliharaan Meubelair Kantor	Terjaminnya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair	-	191.750.000	APBD	Jawa Tengah
			e. Pemeliharaan komputer, genset, AC, aquarium	Terjaminnya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	-	914.000.000	APBD	Jawa Tengah
			f. Sertifikasi dan Akreditasi 3 unit LPPMHP	Terjaminnya Pemeliharaan Alat Laboratorium	6. Kegiatan Pemeliharaan Alat Laboratorium	-	577.500.000	APBD	Semarang, Pekalongan, Cilacap
			g. 1 unit beghoe dan kelengkapannya	Terjaminnya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Besar dan Berat	7. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat Besar dan Berat	-	571.400.000	APBD	Kota Semarang
			h. 1 unit ponton untuk beghoe	Terjaminnya Pemeliharaan Rutin Ponton	8. Kegiatan Pemeliharaan Rutin Ponton/Kendaraan di atas air tidak bermotor	-	771.000.000	APBD	Kota Semarang
			i. 4 unit kantor PPP Klidanglor, Asemdayong, Bajomulyo, Wonokerto	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor PPP Klidanglor, Asemdayong, Bajomulyo, Wonokerto	9. Rehabilitasi Gedung Kantor UPTD	-	6.262.000.000	APBD	Batang, Pemalang, Pati dan Pekalongan

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
			j. Penyediaan sarana prasarana Balai/UPTD/ Satker dalam rangka pemenuhan target pendapatan, buku-buku perikanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Pendapatan UPT	10. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Pendapatan UPT	-	17.532.000.000	APBD	Jawa Tengah
	4. Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur	d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	2.050 stel PDH dan 2.050 stel pakaian Hansip	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas & Kelengkapannya	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	-	1.488.000.000	APBD	Kota Semarang
	5. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pengembangan Perikanan	e. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pengembangan Perikanan	a. 5 tahun pengiriman diklat teknis dan non-teknis	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	538.000.000	APBD	Jawa Tengah
			b. 15 Kegiatan BinteK, 375 orang	Terlaksananya Peningkatan Sbdy Aparatur	2. Peningkatan Sumberdaya Aparatur	-	771.000.000	APBD	Satker Muntilan Magelang
	6. Pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah	f. Program Pendidikan Luar Sekolah	c. Penyusunan MoU Pengelolaan PPP dan TPI serta Penerbitan	Tercapainya Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan	3. Peningkatan Fungsi Kehumasan, Hukum dan Kelembagaan	-	1.542.000.000	APBD	Jawa Tengah
			d. BinteK Apresiasi Administrasi Keuangan untuk 15 UPTD	Terlaksananya BinteK Pengelola Keuangan dan Bendahara Penerimaan	4. BinteK Pengelola Keuangan dan Bendahara Penerimaan	-	518.500.000	APBD	Satker Muntilan Magelang
			95 binteK/40 angk. BinteK untuk 5.675 orang dan 4.000 anak-anak	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	-	9.564.500.000	APBD	Jawa Tengah

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
2	Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil <u>Kebijakan:</u> 1. Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan dan Agribisnis						24.791.000.000 10.802.500.000 3.857.500.000	APBN + APBD APBN APBN	Jawa Tengah
		a. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Terjadi peningkatan sektor Ekonomi, Sosial, Budaya, bagi para pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir	Terwujudnya pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir	Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budaya, Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir	PERDA Pengelolaan Pesisir, Kelautan dan Pulau-pulau Kecil			
		b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Terjadi peningkatan pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan	Terwujudnya Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan	Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan	-	1.542.000.000	APBN	Jawa Tengah
		c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Sumberdaya Alam	Terjadi pengelolaan dan rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk	Terwujudnya Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk	Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun, Estuaria dan Teluk	-	2.317.000.000	APBN	Jawa Tengah
		d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA	Terjadi Pengelolaan dan Rehabilitasi Habitat Vital Terpadu	Terciptanya Pengelolaan dan Rehabilitasi Habitat Vital Terpadu	Pengelolaan dan Rehabilitasi Habitat Vital Terpadu	-	3.086.000.000	APBN	Jawa Tengah
							13.988.500.000	APBD	
		e. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Terwujudnya masyarakat pesisir yang mampu dan terampil dalam pengelolaan sumber daya di wilayah pesisir	Tercapainya peningkatan kemampuan dan ketrampilan masyarakat pesisir dalam pengelolaan	1. Pemberdayaan Usaha Petambak Garam sebanyak 250 orang	-	1.057.000.000	APBD	Pati, Brebes, Jepara, Demak, Rembang
					2. Pemberdayaan Usaha Perempuan Pesisir sebanyak 800 orang	-	2.060.000.000	APBD	Demak, Jepara, Brebes, Cilacap, Kebumen, Kendal,

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
				dan pemanfaatan sumberdaya kelautan yang berwawasan - lingkungan					Batang, Tegal, Purworejo, Kota Tegal, Semarang, Pekalongan
					3. Pemberdayaan Usaha Taruna Nelayan sebanyak 275 orang	-	813.000.000	APBD	Pekalongan, Pemalang, Kebumen, Tegal, Rembang, Brebes, Demak, Pati, Jepara, Kota Semarang
					4. Pelatihan Konservasi Sumberdaya sebanyak 400 orang	-	670.000.000	APBD	Wonogiri, Tegal, Jepara, Rembang, Kendal, Wonosobo, Banjarnegara Brebes
	Pelaksanaan Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumberdaya Alam	f. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Tertanganinya kerusakan di wilayah pesisir karena terjadi abrasi seluas 4.072,17 Ha, antara lain dengan pemasangan APO (Alat Pemecah Ombak) sebanyak 360 unit dan Penanaman mangrove sebanyak 1.017.500 batang	Terwujudnya wilayah pesisir yang hijau dengan tanaman bakau/mangrove dan terhindar dari abrasi serta akresi karena pengaruh gelombang laut.	1. Rehabilitasi wilayah pesisir yang terkena abrasi dengan pemasangan APO 360 unit dan penanaman mangrove 1.017.500 batang	-	3.343.500.000	APBD	Pati, Demak, Purworejo, Jepara, Kendal, Batang, Brebes, Pemalang, Rembang, Cilacap, Karimunjawa, Kota Semarang

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
					2. Peningkatan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya kelautan yang berwawasan lingkungan dengan pemberian bantuan benih ikan 1.144.000 ekor		786.000.000	APBD	Pati, Demak, Purworejo, Jepara, Kendal, Batang, Brebes, Pemalang, Rembang, Cilacap, Karimunjawa, Kota Semarang
					3. Rehabilitasi ekosistem habitat vital dengan pemasangan TKB 225 unit; transplantasi karang 265 unit.		2.704.000.000	APBD	Jepara, Batang, Rembang, Tegal
					4. Penebaran benih ikan di laut 40.900 ekor		730.000.000	APBD	Batang, Tegal, Rembang, Jepara
					5. Restocking di perairan pedalaman dlm rangka Kawasan Konservasi Perairan, 400.000 ekor		800.000.000	APBD	Brebes, Wonogiri, Banjarnegara, Tegal, Semarang, Rembang, Kendal
		g. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Tersosialisasikannya Peraturan Perundangan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan	Sosialisasi Peraturan Perundangan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan		525.000.000	APBD	Kebumen, Pekalongan, Rembang, Jepara, Pati, Kendal, Demak, Tegal, Brebes, Kota Semarang
				Terwujudnya kelompok masyarakat Pelestari Ekosistem Pesisir	Pembinaan dan Pembentukan Kelompok Pelestari Ekosistem Pesisir		500.000.000	APBD	Demak, Pemalang, Cilacap, Batang, Brebes, Jepara, Rembang

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
3	Bidang Perikanan Tangkap <u>Kebijakan:</u> 1. Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	a. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	a. Administrasi Kegiatan b. Penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis/Program c. Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah d. Pemantauan dan Evaluasi	Terpenuhinya Administrasi Kegiatan, Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program, Sistem Akuntansi Pemerintah, Pemantauan dan Evaluasi	1. Pengembangan Perencanaan dan Administrasi Keuangan	-	97.630.400.000 18.480.900.000 2.105.700.000	APBN + APBD APBN APBN	Jawa Tengah
			a. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap sebesar 1,0% per tahun dan pendapatan nelayan (laut dan perairan umum) sebesar 0,93 % per thn b. Peningkatan Pelayanan Usaha dan Pengendalian Perijinan Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di laut dan perairan umum Jawa Tengah	2. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	-	1.401.000.000	APBN	Jawa Tengah
			c. Pengembangan prasarana Perikanan d. Pengembangan kesyahbandaran	Meningkatnya sarana dan prasarana PPI	3. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Input Produksi lainnya	-	1.964.000.000	APBN	Jawa Tengah
			Revitalisasi Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap di laut dan perairan umum Jawa Tengah	4. Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan	-	385.700.000	APBN	Jawa Tengah
			Peningkatan Tata Pemanfaatan Sumberdaya Ikan		5. Pengelolaan Sumberdaya Ikan secara Bertanggungjawab dan berkelanjutan	-	1.158.500.000	APBN	Jawa Tengah

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
	2. Penyiapan Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	b. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	a. Pengumpulan data Statistik b. Pelatihan Petugas Pengumpul dan pengolah Data Perikanan Tangkap tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya tingkat akurasi data statistik perikanan tangkap	Pengembangan Statistik Perikanan	-	1.051.000.000	APBN	Jawa Tengah
	3. Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	c. Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	a. Pembinaan/ Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran b. Administrasi Kegiatan c. Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis/Program Perencanaan / Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah d. Pemantauan dan Evaluasi	Terpenuhinya Administrasi Kegiatan, Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program, Sistem Akuntansi Pemerintah, Pemantauan dan Evaluasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan	-	3.857.500.000	APBN	Jawa Tengah
	4. Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan	d. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan (Penyiapan Blanko HPK-SLO, Pengumpulan dan Pengolahan pengiriman SLO, Pembekalan HPK-SLO, Operasi Pengawasan, Sosialisasi Peraturan Perundangan bagi Nelayan, Temu Teknis Pengawasan Perikanan, Pertemuan Pengawasan Kerjasama SDKP.	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan secara Bertanggung-jawab dan Berkelanjutan	Pengelolaan Sumberdaya Ikan secara Bertanggung jawab dan Berkelanjutan	-	3.857.500.000	APBN	Jawa Tengah

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
	5. Penyiapan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	e. Program Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	a. Peningkatan Sarana dan prasarana Pengawasan b. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan c. Pengembangan Sistem Pengawasan berbasis Kelompok Masyarakat (SISWASMAS-POKMASWAS) d. Penataan dan Penegakan Hukum	Meningkatnya Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan secara Bertanggung-jawab dan Berkelanjutan berbasis Masyarakat (SISWASMAS)	Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	-	2.700.000.000	APBN	Kabupaten-kabupaten di Pantai Utara Jawa Tengah
6.	Pelaksanaan Pengembangan Perikanan Tangkap	f. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jaring gillnet 15 paket, pembinaan alat tangkap ramah lingkungan	Meningkatnya Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	1. Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Revisi PERDA no.3 tahun 2005	79.149.500.000 6.376.000.000	APBD APBD	Kab. di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah
			Coldbox 300 unit, palka 55 paket	Meningkatnya Kualitas Hasil Tangkapa	2. Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan	-	2.317.000.000	APBD	Kabupaten-kabupaten di Pantai Utara Jawa Tengah
			Rumpon 2 paket, pendataan alat tangkap, rumpon, kapal & produktivitas	Meningkatnya Sumberdaya Perikanan Tangkap	3. Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya PerikananTangkap	-	2.505.500.000	APBD	Jawa Tengah
			Buku Perikanan dan kelautan dalam angka, reservat 3 paket, jaring gillnet 60 pc, penebaran	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap	4. Optimalisasi Perikanan Tangkap di Perairan Pedalaman dan Statistik Perikanan Tangkap	-	12.766.000.000	APBD	Grobogan, Sragen, Boyolali, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Wonogiri
			Buku kondisi dan mutu Tuna Jateng, rumpon laut dasar	Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap	5. Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Tangkap (RPPK)	-	4.011.200.000	APBD	Kab. Di Pantai Utara Jawa Tengah

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
			Operasi kapal was, pendatan kapal sesuai ijin, penataan hukum, penanganan konflik	Meningkatnya Pengawasan & Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	6. Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan Kelautan	-	3.664.000.000	APBD	Jawa Tengah
			Peningkatan operasional dan pendapatan dari jasa kepelabuhan, syahbandar PPP milik Prov. Jateng	Meningkatnya produktivitas dan pendapatan perikanan tangkap di PPP Tasikagung Rembang	7. Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana PPP Tasikagung	PERDA Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai	4.464.200.000	APBD	Rembang
			Peningkatan operasional dan pendapatan dari jasa kepelabuhan, syahbandar PPP milik Prov. Jateng	Meningkatnya produktivitas dan pendapatan perikanan tangkap di PPP Bajomulyo Juwana Pati	8. Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana PPP Bajomulyo Juwana	PERDA Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai	4.464.200.000	APBD	Pati
			Peningkatan operasional dan pendapatan dari jasa kepelabuhan, syahbandar PPP milik Prov. Jateng	Meningkatnya produktivitas dan pendapatan perikanan tangkap di PPP Morodemak Demak	9. Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana PPP Morodemak	PERDA Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai	4.782.500.000	APBD	Demak
			Peningkatan operasional dan pendapatan dari jasa kepelabuhan, syahbandar PPP milik Prov. Jateng	Meningkatnya produktivitas dan pendapatan perikanan tangkap di PPP Wonokerto Kab. Pekalongan	10. Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana PPP Wonokerto	PERDA Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai	4.464.200.000	APBD	Kab. Pekalongan
			Peningkatan operasional dan pendapatan dari jasa kepelabuhan, syahbandar PPP milik Prov. Jateng	Meningkatnya produktivitas dan pendapatan perikanan tangkap di PPP Tawang Kendal	11. Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana PPP Tawang	PERDA Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai	6.378.000.000	APBD	Kendal

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
			Peningkatan operasional dan pendapatan dari jasa kepelabuhan, syahbandar PPP milik Prov. Jateng	Meningkatnya produktivitas dan pendapatan perikanan tangkap di PPP Klidang Lor Batang	12. Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana PPP Klidang Lor	PERDA Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai	5.739.000.000	APBD	Batang
			Peningkatan operasional dan pendapatan dari jasa kepelabuhan, syahbandar PPP milik Prov. Jateng	Meningkatnya produktivitas dan pendapatan perikanan tangkap di PPP Tegalsari Tegal	13. Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana PPP Tegalsari	PERDA Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai	4.464.200.000	APBD	Kota Tegal
			Peningkatan operasional dan pendapatan dari jasa kepelabuhan, syahbandar PPP milik Prov. Jateng	Meningkatnya produktivitas dan pendapatan perikanan tangkap di PPP Asem doyong Pemalang	14. Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana PPP Asemdayong	PERDA Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai	4.464.200.000	APBD	Pemalang
				Meningkatnya produktivitas dan pendapatan perikanan tangkap di PPP Karimunjawa Jepara	15. Pembangunan, Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana Prasarana PPP Karimunjawa	PERDA Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai	8.289.300.000	APBD	Jepara
No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
4	Bidang Perikanan Budidaya						128.183.800.000 56.705.700.000	APBN + APBD APBN	
	<u>Kebijakan:</u> 1. Penyiapan Pembangunan	a. Program Pengembangan Sumberdaya	a. Peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 6,62 % per	• Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, Budidaya Pelaku Usaha	-	1.927.500.000	APBN	Jawa Tengah

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
	Sumberdaya Perikanan	Perikanan	tahun, pendapatan pembudidaya ikan sebesar 6,59% per tahun; serta sarana dan prasarana utamanya di 3 UPT perikanan budidaya; b. Pengembangan Kawasan Budidaya Air Payau (Forum penerapan dan pembinaan CBIB dan CPIB), Pembinaan dan Pendampingan, Subsidi Benih, Forum Pemberdayaan ex-Nelayan c. Pengembangan Kawasan Budidaya Tawar (Sosialisasi kegiatan PNPM dan Ketahanan Pangan dan Energi)	Budidaya: – Laut – Tambak – Kolam – Karamba – KJA – Sawah – Lainnya • Meningkatnya Jumlah Pembudidaya ikan: – Tambak – Kolam – Karamba – Sawah	Perikanan dan Masyarakat Pesisir				
			Pembinaan dan Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Meningkatnya sistem kesehatan ikan dan lingkungan Budidaya	2. Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan	-	771.000.000	APBN	Jawa Tengah
			a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja/ Teknis/ Program b. Perencanaan/ Implementasi/ Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah c. Pemantauan Evaluasi	• Terpuhinya Program dan Rencana Kerja/Teknis/ Program • Terpuhinya Pengelolaan Sistem Akuntansi	3. Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan (RPPK)	-	11.572.000.000	APBN	Jawa Tengah

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
			d. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut e. Pengembangan Kawasan Budidaya Payau f. Pengembangan Kawasan Budidaya Tawar	Pemerintah • Terpenuhinya Kegiatan Evaluasi • Terpenuhinya Pengembangan Kawasan Budidaya Payau dan Tawar					
			a. Pembangunan Kawasan Budidaya Laut b. Pembangunan Kawasan Budidaya Payau c. Pembangunan Kawasan Budidaya Tawar	Meningkatnya Produksi Komoditas Budidaya Laut, Payau dan Tawar	4. Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Produksi lainnya	-	38.577.500.000	APBN	Jawa Tengah
			a. Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Budidaya b. Pelatihan Petugas Pengelola Data Perikanan dan Budidaya tingkat Kab./Kota c. Survey Sosial ekonomi Budidaya Ikan	Meningkatnya tingkat akurasi data statistik perikanan budidaya	5. Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Komunikasi	-	3.857.700.000	APBN	Jawa Tengah
	2. Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Perikanan Budidaya	b. Program Pembangunan dan Pengembangan Perikanan	Pengembangan Satker Janti, Muntlari, Ambarawa, Ngrajek dan Aksesibilitas Soropadan	Meningkatnya Produksi Ikan di Kab. Semarang, Magelang, Klaten	1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar	-	71.478.100.000 8.098.700.000	APBD APBD	Kab. Semarang, Magelang, Klaten, Temanggung

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
		Budidaya	Pengembangan Satker Maribaya, BBIL Karimunjawa, Satker Tugu dan Sluke	Meningkatnya Produksi Ikan di Kab. Tegal, Rembang dan Kota Semarang	2. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut	-	8.033.900.000	APBD	Tegal, Jepara, Kota Semarang, Rembang
			Bantuan Induk Lele 2.500 kg, grasscarp 150.000 ekor, Induk Nila 2.500 kg, benih kerapu 4.500 ekor	Meningkatnya Produksi Ikan di Boyolali, Magelang, Sragen, Wonosobo, Karanganyar, Semarang, Jepara, Demak, Kendal, Grobogan, Purbalingga, Kota Pekalongan, Karimunjawa	3. Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan	-	12.910.000.000	APBD	Semarang, Boyolali, Wonogiri, Wonosobo, Banjarnegara, Sragen, Karanganyar, Rembang, Karimunjawa
			Pengembangan lele, nila, patin, gurame dan temu lapang dan release nila strain baru	Meningkatnya Produksi Ikan di Banjarnegara, Purbalingga, Wonogiri, Sragen, Janti, Salatiga, Kendal,	4. Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan	-	4.940.500.000	APBD	Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Kudus, Semarang, Grobogan, Klaten
			Kajian Logam Berat pada ikan dan udang, temu jaringan penyakit, validasi statistik budidaya.	Berkurangnya residu logam berat dan penyakit pada ikan dan lingkungan budidaya	5. Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ikan	-	8.800.000.000	APBD	Jawa Tengah

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
			Reagent, identifikasi penyakit ikan air tawar dan payau, pelatihan 150 orang, media informasi	Meningkatnya fungsi laboratorium karantina dan kesehatan Ikan	6. Optimalisasi dan Pengembangan Laboratorium Karantina dan Kesehatan Ikan	-	2.870.000.000	APBD	Jawa Tengah
			Pengembangan lele di Wonosobo dan Purbalingga, Workshop agrplt, udang di Brebes, Demak, Pati, Rembang, Cilacap, Kebumen, Bandeng di Kendal, Kota Semarang, Kerapu di Tegal, Pemalang, Perikanan Rakyat dan Pengalihan Usaha Nelayan	- Meningkatnya produksi lele di Wonosobo, Udang di Brebes, Demak, Pati, Rembang, Cilacap, Kebumen, Bandeng di Kendal, Kota Semarang, Kerapu di Tegal, Pemalang. - Meningkatnya produksi perikanan rakyat dan pengalihan usaha nelayan	7. Revitalisasi Perikanan Budidaya (RPPK)	-	25.825.000.000	APBD	Kota Semarang, Salatiga, Demak, Kudus, Kendal, Grobogan, Pemalang, Pati, Brebes, Rembang, Pekalongan, Kota Pekalongan,

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
5	Bidang Usaha Kelautan Dan Perikanan <u>Kebijakan:</u> 1. Penyiapan Pembangunan Sumberdaya Perikanan	a. Program Pengembangan Sumberdaya Perikanan	a. Penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis/Program b. Pengadaan Alat Pengolah Data	Tersusunnya Program dan Rencana Kerja / Anggaran dan Pengadaan Alat Pengolah Data	1. Pembinaan/ Penyuluhan Program, Rencana Kerja dan Anggaran	-	70.207.900.000 29.310.600.000 771.100.000	APBN + APBD APBN APBN	Jawa Tengah
			Administrasi Kegiatan	Terjaminnya Administrasi Kegiatan Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran	2. Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran	-	384.500.000	APBN	Jawa Tengah
			Pengembangan Pola Permodalan dan Investasi Dalam Negeri dan Asing	Terlaksananya Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	3. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan	-	384.500.000	APBN	Jawa Tengah
			a. Peningkatan Konsumsi Ikan sebesar 2,40%/tahun melalui Program Nasional "Gemar Ikan" dan Peningkatan Produk Perikanan sebesar 5,10%/tahun b. Penguatan Kelembagaan Pemasaran c. Pembinaan Eksport Produk Perikanan	Terciptanya Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Eksport Hasil Perikanan	4. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri dan Eksport Hasil Perikanan	-	7.711.000.000	APBN	Jawa Tengah

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
			a. Pengembangan Sistem Rantai dingin b. Pengembangan Sentra Pengolahan Hasil Perikanan c. Pengembangan Produk Nilai tambah tinggi d. Pengembangan Standarisasi e. Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan f. Penguatan Kompetensi Laboratorium Penguji g. Penguatan Kompetensi Lembaga Sertifikasi	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	5. Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan	-	18.516.400.000	APBN	Jawa Tengah
			Restrukturisasi dan revitalisasi Usaha Industri Pengolahan	Tercapainya Restrukturisasi dan revitalisasi Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan	6. Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan	-	771.100.000	APBN	Jawa Tengah
	2. Penyiapan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	b. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pengembangan statistik pengolahan dan pemasaran	Terlaksananya Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan sistem, data, statistik dan informasi	Pembinaan/ Pembuatan/ Pengembangan sistem, data, statistik dan informasi	-	1.156.500.000	APBN	Jawa Tengah

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
3.	Penyiapan Kegiatan Pengembangan Usaha Kelautan dan Perikanan	c. Program Pengembangan Agribisnis	Gelar perijinan 45 lks, 750 orang sos ijin usaha, software sistem pembayaran perijinan online, rakor perijinan	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perikanan	1. Peningkatan dan Pengembangan Usaha Perikanan	Revisi PERDA No.3/2005 Ttg Perizinan Usaha Perikanan	40.897.300.000 2.723.000.000	APBD APBD	Jawa Tengah
			45 pertemuan MPU, Lomba masak ikan, Statistik P2HP, Rencana Program	Tercapainya Peningkatan koordinasi Manajemen Usaha Perikanan dan Kelembagaan SDM	2. Peningkatan koordinasi Manajemen Usaha Perikanan dan Kelembagaan SDM	-	4.087.000.000	APBD	Jawa Tengah + 8 Prop. MPU
			Mon harga produk, 40 pameran, sar industri kecil 10 kabupaten, gemar ikan, pelatihan HACCP, rev kawasan pengolah ikan 10 lks, bantuan alat pengolah 70 paket dan pemasaran ikan 70 paket, cold box 1000 bh.	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	3. Pembinaan dan Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	-	10.448.000.000	APBD	Jawa Tengah
			Uji profisiensi, was HACCP, re-asesmen ISO 17025-2005, mon miniplant, formalin, chloramphenicol, test kit	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Semarang	4. Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Semarang	-	5.061.400.000	APBD	Kota Semarang
			Uji profisiensi, was HACCP, re-asesmen ISO 17025-2005, mon miniplant, formalin, chloramphenicol, test kit	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Pekalongan	5. Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Pekalongan	-	5.061.400.000	APBD	Kota Pekalongan
			Uji profisiensi, was HACCP, re-asesmen ISO 17025-2005, mon miniplant, formalin, chloramphenicol, test kit	Tercapainya Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Cilacap	6. Peningkatan dan Pengembangan LPPMHP Cilacap	-	5.061.400.000	APBD	Kab. Cilacap

No	Kebijakan	Program Prioritas	Indikator Keluaran (Output)	Indikator Hasil (Outcome)	Indikasi Kegiatan		Pagu Indikatif 5 Tahunan dan 1 Tahun Transisi		Keterangan (Lokasi)
					Kerangka Anggaran	Kerangka Regulasi	(Rp)	Sumber Pendanaan	
			Paket gurame, lele untuk fpesd, sarana pengolahan 10 paket, paket budidaya agropolitan 200 paket di 10 kab. Kawasan agropolitan	Terlaksananya Pengembangan Kawasan Perikanan di Cilacap, Rembang, Klaten, Semarang, Magelang, Wonosobo, Pemalang, Purbalingga, Batang, Karanganyar, Boyolali, Brebes, Banjarnegara	7. Pengembangan Kawasan Perikanan	-	4.597.600.000	APBD	Cilacap, Rembang, Klaten, Semarang, Magelang, Wonosobo, Pemalang, Purbalingga, Batang, Karanganyar, Boyolali, Brebes, Banjarnegara
			Rakor perencanaan prov., penyusunan renstra, monev terpadu, website, buku renstra 750 buah, laptah 350 bh, lakip 75 buah	Terlaksananya Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Perikanan dan Kelautan	8. Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Perikanan dan Kelautan	-	3.857.500.000	APBD	35 Kab/Kota

Tengah Tahun 2008 - 2013

Pagu Indikatif														
2009			2010			2011			2012			2013		
Capaian Kinerja (%)	Jml & Sb. Pendanaan	Lokasi Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Jml & Sb. Pendanaan	Lokasi Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Jml & Sb. Pendanaan	Lokasi Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Jml & Sb. Pendanaan	Lokasi Kegiatan	Capaian Kinerja (%)	Jml & Sb. Pendanaan	Lokasi Kegiatan
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	825.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	907.500.000 (APBN)	JawaTengah	22	998.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	1.098.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	1.208.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	58.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	64.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	70.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	77.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	85.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	890.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	979.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	1.076.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	1.184.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	1.303.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	1.650.000.000 (APBD)	Kota Pekalongan	20	1.815.000.000 (APBD)	Cilacap	22	1.996.000.000 (APBD)	Cilacap	24	2.196.000.000 (APBD)	Kota Tegal	-	2.415.000.000 (APBD)	Kota Tegal

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	12.100.000 (APBD)	JawaTengah	20	13.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	14.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	16.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	17.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	247.500.000 (APBD)	JawaTengah	20	272.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	300.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	330.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	362.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	170.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	187.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	205.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	226.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	248.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	145.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	160.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	175.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	193.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	212.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	157.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	172.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	190.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	209.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	230.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	110.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	121.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	133.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	146.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	161.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	27.500.000 (APBD)	JawaTengah	20	30.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	33.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	36.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	40.000.000 (APBD)	JawaTengah

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	120.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	132.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	145.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	160.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	175.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	881.000.000 (APBD)	Indonesia	20	970.000.000 (APBD)	Indonesia	22	1.066.000.000 (APBD)	Indonesia	24	1.173.000.000 (APBD)	Indonesia	-	1.300.000.000 (APBD)	Indonesia
18	1.127.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	1.240.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	1.364.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	1.501.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	1.651.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	99.000.000 (APBD)	5 unit Rumah Dinas Ngrajek, Muntilan, LPPD, guesthouse	20	109.000.000 (APBD)	5 unit Rumah Dinas Ngrajek, Muntilan, LPPD, guesthouse	22	120.000.000 (APBD)	5 unit Rumah Dinas Ngrajek, Muntilan, LPPD, guesthouse	24	131.000.000 (APBD)	5 unit Rumah Dinas Ngrajek, Muntilan, LPPD, guesthouse	-	145.000.000 (APBD)	5 unit Rumah Dinas Ngrajek, Muntilan, LPPD, guesthouse
18	354.000.000 (APBD)	1 gedung kantor dinas, 15 UPTD, 5 Satker	20	390.000.000 (APBD)	1 gedung kantor dinas, 15 UPTD, 5 Satker	22	428.000.000 (APBD)	1 gedung kantor dinas, 15 UPTD, 5 Satker	24	471.000.000 (APBD)	1 gedung kantor dinas, 15 UPTD, 5 Satker	-	518.000.000 (APBD)	1 gedung kantor dinas, 15 UPTD, 5 Satker
18	450.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	494.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	543.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	598.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	657.000.000 (APBD)	JawaTengah

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	27.500.000 (APBD)	JawaTengah	20	30.250.000 (APBD)	JawaTengah	22	33.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	36.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	40.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	130.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	143.000.100 (APBD)	JawaTengah	22	158.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	174.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	191.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	82.500.000 (APBD)	Semarang, Pekalongan, Cilacap	20	90.000.000 (APBD)	Semarang, Pekalongan, Cilacap	22	100.000.000 (APBD)	Semarang, Pekalongan, Cilacap	24	110.000.000 (APBD)	Semarang, Pekalongan, Cilacap	-	120.000.000 (APBD)	Semarang, Pekalongan, Cilacap
18	81.400.000 (APBD)	Kota Semarang	20	89.500.000 (APBD)	Kota Semarang	22	98.500.000 (APBD)	Kota Semarang	24	108.000.000 (APBD)	Kota Semarang	-	120.000.000 (APBD)	Kota Semarang
18	110.000.000 (APBD)	Kota Semarang	20	121.000.000 (APBD)	Kota Semarang	22	133.000.000 (APBD)	Kota Semarang	24	146.000.000 (APBD)	Kota Semarang	-	161.000.000 (APBD)	Kota Semarang
18	893.000.000 (APBD)	Gedung Kantor PPP Klidanglor, Batang	20	982.000.000 (APBD)	Gedung Kantor PPP Asemdayong Pemalang	22	1.080.000.000 (APBD)	Gedung Kantor PPP Bajomulyo Pati	24	1.188.000.000 (APBD)	Gedung Kantor PPP Wonokerto Pekalongan	-	1.307.000.000 (APBD)	Gedung Kantor PPP Bajomulyo Pati

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	2.500.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	2.750.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	3.024.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	3.326.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	3.660.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	212.000.000 (APBD)	Kota Semarang	20	233.000.000 (APBD)	Kota Semarang	22	257.000.000 (APBD)	Kota Semarang	24	282.000.000 (APBD)	Kota Semarang	-	311.000.000 (APBD)	Kota Semarang
18	77.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	84.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	93.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	102.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	112.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	110.000.000 (APBD)	3 Kegiatan Bintek, 75 orang di Satker Muntilan Magelang	20	121.000.000 (APBD)	3 Kegiatan Bintek, 75 orang di Satker Muntilan Magelang	22	133.000.000 (APBD)	3 Kegiatan Bintek, 75 orang di Satker Muntilan Magelang	24	146.000.000 (APBD)	3 Kegiatan Bintek, 75 orang di Satker Muntilan Magelang	-	161.000.000 (APBD)	3 Kegiatan Bintek, 75 orang di Satker Muntilan Magelang
18	220.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	242.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	266.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	292.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	322.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	74.000.000 (APBD)	Untuk 3 UPTD di Satker Muntilan Magelang	20	81.000.000 (APBD)	Untuk 3 UPTD di Satker Muntilan Magelang	22	90.000.000 (APBD)	Untuk 3 UPTD di Satker Muntilan Magelang	24	98.000.000 (APBD)	Untuk 3 UPTD di Satker Muntilan Magelang	-	108.000.000 (APBD)	Untuk 3 UPTD di Satker Muntilan Magelang

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	1.363.000.000 (APBD)	19 Bintek/ 8 angk. untuk 1.135 orang dan 800 anak-anak di Jawa Tengah	20	1.500.000.000 (APBD)	19 Bintek/ 8 angk. untuk 1.135 orang dan 800 anak-anak di Jawa Tengah	22	1.650.000.000 (APBD)	19 Bintek/ 8 angk. untuk 1.135 orang dan 800 anak-anak di Jawa Tengah	24	1.815.000.000 (APBD)	19 Bintek/ 8 angk. untuk 1.135 orang dan 800 anak-anak di Jawa Tengah	-	1.996.500.000 (APBD)	19 Bintek/ 8 angk. untuk 1.135 orang dan 800 anak-anak di Jawa Tengah
18	550.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	20	605.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	22	665.500.000 (APBN)	Jawa Tengah	24	732.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	-	805.000.000 (APBN)	Jawa Tengah
18	220.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	20	242.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	22	266.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	24	292.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	-	322.000.000 (APBN)	Jawa Tengah
18	330.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	20	363.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	22	400.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	24	440.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	-	484.000.000 (APBN)	Jawa Tengah

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	440.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	20	484.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	22	532.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	24	585.000.000 (APBN)	Jawa Tengah	-	645.000.000 (APBN)	Jawa Tengah
9,18	97.000.000	Kab. Rembang	18,92	200.000.000	Kab. Demak, Pati	19,87	210.000.000	Kab. Rembang, Jepara	20,81	220.000.000	Kab. Demak, Brebes	31,22	330.000.000	Kab. Pati, Brebes
8,25	170.000.000	Kab. Demak, Jepara, Brebes, Kota Semarang, Pekalongan	20,39	420.000.000	Kab. Brebes, Kendal, Batang, Kota Tegal, Purworejo, Cilacap	20,39	420.000.000	Kab. Cilacap, Kebumen, Demak, Jepara, Kendal, Kota Pekalongan	23,79	490.000.000	Kab. Purworejo, Kendal, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Jepara	27,18	560.000.000	Kab. Cilacap, Tegal, batang, Kendal, Demak, Kota Smg, Kebumen, Purworejo
16,36	133.000.000	Kab. Pati, Pemalang	18,45	150.000.000	Kab. Pekalongan, Kebumen	18,45	150.000.000	Kota Semarang, Kab. Tegal	22,14	180.000.000	Kab. Jepara, Rembang	24,60	200.000.000	Brebes, Demak, Jepara
0,00	0	-	14,93	100.000.000	Kab. Wonogiri, Brebes	22,39	150.000.000	Kab. Brebes, Tegal, Jepara	29,85	200.000.000	Kab. Rembang, Kendal, Banjarnegara	32,84	220.000.000	Kab. Wonogiri, Wonosobo

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9,68	323.500.000	Kab. Pati, Rembang, Demak. Cilacap, Karimunjawa	18,84	630.000.000	Kab. Batang, Pemalang, Purworejo	21,83	730.000.000	Kab. Brebres, Pati, Kendal, Batang	24,23	810.000.000	Kota Semarang, Rembang, Cilacap	25,42	850.000.000	Kab. Demak, Purworejo, Batang, Jepara
35,11	276.000.000	Kab. Pati, Rembang, Demak. Cilacap, Karimunjawa	12,72	100.000.000	Kab. Purworejo, Batang, Pemalang	12,72	100.000.000	Kab. Brebres, Pati, Kendal, Batang	19,08	150.000.000	Kota Semarang, Kab. Rembang, Cilacap	20,36	160.000.000	Kab. Demak, Purworejo, Batang, Jepara
3,11	84.000.000	Kab. Jepara	13,68	370.000.000	Kab. Batang, Tegal	22,19	600.000.000	Kab. Jepara, Rembang	29,59	800.000.000	Kab. Jepara, Rembang	31,43	850.000.000	Kab. Rembang, Kendal
-	0	-	23,29	170.000.000	Kab. Batang, Tegal	24,66	180.000.000	Kab. Tegal, Rembang	24,66	180.000.000	Kab. Batang, Jepara	27,40%	200.000.000	Kab. Batang, Tegal

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	0	-	25,00	200.000.000	Kab. Brebes, Wonogiri, Banjnegara	25,00	200.000.000	Brebes, Tegal, kab. Semarang	25,00	200.000.000	Kab. Rembang, Kendal, Banjarnegara	25,00	200.000.000	Kab. Wonogiri, Kendal, Tegal
-	0	-	19,05	100.000.000	Kab. Kebumen, Pekalongan	23,81	125.000.000	Kab. Rembang, Jepara	28,57	150.000.000	Kab. Rembang, pati, Kendal	28,57	150.000.000	Kota Semarang, Demak, Tegal, Brebes
-	0	-	20,00	100.000.000	Kab. Demak, Pemalang	20,00	100.000.000	Kab. Cilacap, Batang	30,00	150.000.000	Kab. Brebes, Demak	30,00	150.000.000	Kab. Jepara, Rembang

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	300.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	330.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	363.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	400.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	440.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	200.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	220.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	242.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	266.200.000 (APBN)	JawaTengah	-	292.800.000 (APBN)	JawaTengah
18	280.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	308.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	338.800.000 (APBN)	JawaTengah	24	372.700.000 (APBN)	JawaTengah	-	410.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	55.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	60.500.000 (APBN)	JawaTengah	22	66.500.000 (APBN)	JawaTengah	24	73.200.000 (APBN)	JawaTengah	-	80.500.000 (APBN)	JawaTengah
18	165.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	181.500.000 (APBN)	JawaTengah	22	200.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	220.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	242.000.000 (APBN)	JawaTengah

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	150.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	165.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	180.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	200.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	220.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	550.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	605.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	665.500.000 (APBN)	JawaTengah	24	732.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	805.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	550.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	605.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	665.500.000 (APBN)	JawaTengah	24	732.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	805.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	385.000.000 (APBN)	Kab. Di Pantura JawaTengah	20	424.000.000 (APBN)	Kab. Di Pantai Utara JawaTengah	22	465.000.000 (APBN)	Kab. Di Pantai Utara JawaTengah	24	512.000.000 (APBN)	Kab. Di Pantai Utara JawaTengah	-	564.000.000 (APBN)	Kab. Di Pantai Utara JawaTengah
18	910.000.000 (APBD)	Pati, Rembang, Kota Tegal, Kab. Tegal, Pemalang, Batang, Kota Pekalongan, Jepara, Pati, Kebumen, Purworejo, Brebes	20	1.000.000.000 (APBD)	Kab. Di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah	22	1.100.000.000 (APBD)	Kab. Di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah	24	1.210.000.000 (APBD)	Kab. Di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah	-	1.331.000.000 (APBD)	Kab. Di Pantai Utara dan Pantai Selatan Jawa Tengah

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	330.000.000 (APBD)	Kab. Pekalongan, Batang, Kota Semarang, Rembang	20	363.000.000 (APBD)	Kab. Di Pantai Utara Jawa Tengah	22	400.000.000 (APBD)	Kab. Di Pantai Utara Jawa Tengah	24	440.000.000 (APBD)	Kab. Di Pantai Utara Jawa Tengah	-	484.000.000 (APBD)	Kab. Di Pantai Utara Jawa Tengah
18	357.500.000 (APBD)	Batang, Rembang	20	393.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	432.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	475.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	523.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	1.820.000.000 (APBD)	Grobogan, Sragen, Boyolali, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Wonogiri	20	2.002.000.000 (APBD)	Grobogan, Sragen, Boyolali, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Wonogiri	22	2.202.000.000 (APBD)	Grobogan, Sragen, Boyolali, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Wonogiri	24	2.422.000.000 (APBD)	Grobogan, Sragen, Boyolali, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Wonogiri	-	2.665.000.000 (APBD)	Grobogan, Sragen, Boyolali, Kebumen, Banjarnegara, Wonosobo, Wonogiri
18	572.000.000 (APBD)	Pati, Pemalang, Demak, Jepara, Kota Tegal	20	629.200.000 (APBD)	Kab. Di Pantai Utara Jawa Tengah	22	692.000.000 (APBD)	Kab. Di Pantai Utara Jawa Tengah	24	761.000.000 (APBD)	Kab. Di Pantai Utara Jawa Tengah	-	837.000.000 (APBD)	Kab. Di Pantai Utara Jawa Tengah
18	522.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	575.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	632.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	695.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	765.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	637.000.000 (APBD)	Rembang	20	700.000.000 (APBD)	Rembang	22	770.000.000 (APBD)	Rembang	24	847.000.000 (APBD)	Rembang	-	931.700.000 (APBD)	Rembang
18	637.000.000 (APBD)	Juwana Pati	20	700.000.000 (APBD)	Juwana Pati	22	770.000.000 (APBD)	Juwana Pati	24	847.000.000 (APBD)	Juwana Pati	-	931.700.000 (APBD)	Juwana Pati

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	682.000.000 (APBD)	Demak	20	750.000.000 (APBD)	Demak	22	825.000.000 (APBD)	Demak	24	907.500.000 (APBD)	Demak	-	998.000.000 (APBD)	Demak
18	637.000.000 (APBD)	Kab. Pekalongan	20	700.000.000 (APBD)	Kab. Pekalongan	22	770.000.000 (APBD)	Kab. Pekalongan	24	847.000.000 (APBD)	Kab. Pekalongan	-	931.700.000 (APBD)	Kab. Pekalongan
18	910.000.000 (APBD)	Kendal	20	1.000.000.000 (APBD)	Kendal	22	1.100.000.000 (APBD)	Kendal	24	1.210.000.000 (APBD)	Kendal	-	1.331.000.000 (APBD)	Kendal
18	818.000.000 (APBD)	Batang	20	900.000.000 (APBD)	Batang	22	990.000.000 (APBD)	Batang	24	1.089.000.000 (APBD)	Batang	-	1.198.000.000 (APBD)	Batang
18	637.000.000 (APBD)	Kota Tegal	20	700.000.000 (APBD)	Kota Tegal	22	770.000.000 (APBD)	Kota Tegal	24	847.000.000 (APBD)	Kota Tegal	-	931.700.000 (APBD)	Kota Tegal
18	637.000.000 (APBD)	Pemalang	20	700.000.000 (APBD)	Pemalang	22	770.000.000 (APBD)	Pemalang	24	847.000.000 (APBD)	Pemalang	-	931.700.000 (APBD)	Pemalang
18	1.182.000.000 (APBD)	Jepara	20	1.300.000.000 (APBD)	Jepara	22	1.430.000.000 (APBD)	Jepara	24	1.573.000.000 (APBD)	Jepara	-	1.730.300.000 (APBD)	Jepara

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	275.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	302.500.000 (APBN)	JawaTengah	22	332.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	366.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	402.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	110.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	121.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	133.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	146.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	161.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	1.650.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	1.815.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	1.996.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	2.196.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	2.415.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	5.500.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	6.050.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	6.655.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	7.320.500.000 (APBN)	JawaTengah	-	8.052.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	550.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	605.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	665.500.000 (APBN)	JawaTengah	24	732.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	805.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	1.155.000.000 (APBD)	Kab. Semarang, Kab. Magelang, Klaten, Temanggung	20	1.270.000.000 (APBD)	Kab. Semarang, Kab. Magelang, Klaten, Temanggung	22	1.397.000.000 (APBD)	Kab. Semarang, Kab. Magelang, Klaten, Temanggung	24	1.536.700.000 (APBD)	Kab. Semarang, Kab. Magelang, Klaten, Temanggung	-	1.690.000.000 (APBD)	Kab. Semarang, Kab. Magelang, Klaten, Temanggung

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	1.145.000.000 (APBD)	Kab. Tegal, Jepara, Rembang, Kota Semarang	20	1.260.000.000 (APBD)	Kab. Tegal, Jepara, Rembang, Kota Semarang	22	1.386.000.000 (APBD)	Kab. Tegal, Jepara, Rembang, Kota Semarang	24	1.524.600.000 (APBD)	Kab. Tegal, Jepara, Rembang, Kota Semarang	-	1.677.000.000 (APBD)	Kab. Tegal, Jepara, Rembang, Kota Semarang
18	1.840.000.000 (APBD)	Semarang, Boyolali, Wonogiri, Wonosobo, Banjarnegara, Sragen, Karanganyar, Rembang, Karimunjawa	20	2.025.000.000 (APBD)	Semarang, Boyolali, Wonogiri, Wonosobo, Banjarnegara, Sragen, Karanganyar, Rembang, Karimunjawa	22	2.227.000.000 (APBD)	Semarang, Boyolali, Wonogiri, Wonosobo, Banjarnegara, Sragen, Karanganyar, Rembang, Karimunjawa	24	2.450.000.000 (APBD)	Semarang, Boyolali, Wonogiri, Wonosobo, Banjarnegara, Sragen, Karanganyar, Rembang, Karimunjawa	-	2.695.000.000 (APBD)	Semarang, Boyolali, Wonogiri, Wonosobo, Banjarnegara, Sragen, Karanganyar, Rembang, Karimunjawa
18	704.500.000 (APBD)	Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Kudus, Semarang, Grobogan, Klaten	20	775.000.000 (APBD)	Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Kudus, Semarang, Grobogan, Klaten	22	852.500.000 (APBD)	Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Kudus, Semarang, Grobogan, Klaten	24	937.000.000 (APBD)	Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Kudus, Semarang, Grobogan, Klaten	-	1.031.000.000 (APBD)	Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Kudus, Semarang, Grobogan, Klaten
18	1.255.000.000 (APBD)	Kota Semarang, JawaTengah	20	1.380.000.000 (APBD)	Kota Semarang, JawaTengah	22	1.518.000.000 (APBD)	Kota Semarang, JawaTengah	24	1.669.800.000 (APBD)	Kota Semarang, JawaTengah	-	1.836.700.000 (APBD)	Kota Semarang, JawaTengah
18	410.000.000 (APBD)	Kota Semarang, JawaTengah	20	450.000.000 (APBD)	Kota Semarang, JawaTengah	22	495.000.000 (APBD)	Kota Semarang, JawaTengah	24	545.000.000 (APBD)	Kota Semarang, JawaTengah	-	598.000.000 (APBD)	Kota Semarang, JawaTengah

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	3.682.000.000 (APBD)	Brebes, Rembang, Demak, Pati, Pemalang, Tegal, Kendal, Kota Pekalongan	20	4.050.000.000 (APBD)	Kota Semarang, Rembang, Brebes, Demak, Pati, Pekalongan, Kota Pekalongan, Kendal, Pemalang, Kudus, Grobogan	22	4.455.000.000 (APBD)	Kota Semarang, Rembang, Brebes, Demak, Pati, Pekalongan, Kota Pekalongan, Kendal, Pemalang, Kudus, Grobogan	24	4.900.500.000 (APBD)	Kota Semarang, Rembang, Brebes, Demak, Pati, Pekalongan, Kota Pekalongan, Kendal, Pemalang, Kudus, Grobogan	-	5.390.500.000 (APBD)	Kota Semarang, Rembang, Brebes, Demak, Pati, Pekalongan, Kota Pekalongan, Kendal, Pemalang, Kudus, Grobogan

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	110.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	121.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	133.100.000 (APBN)	JawaTengah	24	146.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	161.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	55.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	60.500.000 (APBN)	JawaTengah	22	66.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	73.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	80.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	55.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	60.500.000 (APBN)	JawaTengah	22	66.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	73.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	80.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	1.100.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	1.210.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	1.331.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	1.460.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	1.610.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	2.640.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	2.904.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	3.194.400.000 (APBN)	JawaTengah	24	3.513.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	3.865.000.000 (APBN)	JawaTengah
18	110.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	121.000.000 (APBN)	JawaTengah	22	1.331.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	1.464.100.000 (APBN)	JawaTengah	-	1.610.510.000 (APBN)	JawaTengah
18	165.000.000 (APBN)	JawaTengah	20	181.500.000 (APBN)	JawaTengah	22	200.000.000 (APBN)	JawaTengah	24	220.000.000 (APBN)	JawaTengah	-	240.000.000 (APBN)	JawaTengah

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	388.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	427.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	470.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	517.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	568.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	583.000.000 (APBD)	Jawa Tengah + 8 Prop. MPU	20	641.000.000 (APBD)	Jawa Tengah + 8 Prop. MPU	22	705.000.000 (APBD)	Jawa Tengah + 8 Prop. MPU	24	775.000.000 (APBD)	Jawa Tengah + 8 Prop. MPU	-	853.000.000 (APBD)	Jawa Tengah + 8 Prop. MPU
18	1.489.000.000 (APBD)	JawaTengah	20	1.638.000.000 (APBD)	JawaTengah	22	1.802.000.000 (APBD)	JawaTengah	24	1.984.000.000 (APBD)	JawaTengah	-	2.181.000.000 (APBD)	JawaTengah
18	721.800.000 (APBD)	Kota Semarang	20	794.000.000 (APBD)	Kota Semarang	22	873.400.000 (APBD)	Kota Semarang	24	960.000.000 (APBD)	Kota Semarang	-	1.056.000.000 (APBD)	Kota Semarang
18	721.800.000 (APBD)	Kota Pekalongan	20	794.000.000 (APBD)	Kota Pekalongan	22	873.400.000 (APBD)	Kota Pekalongan	24	960.740.000 (APBD)	Kota Pekalongan	-	1.056.800.000 (APBD)	Kota Pekalongan
18	721.800.000 (APBD)	Cilacap	20	794.000.000 (APBD)	Cilacap	22	873.400.000 (APBD)	Cilacap	24	960.740.000 (APBD)	Cilacap	-	1.056.800.000 (APBD)	Cilacap

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
18	655.600.000 (APBD)	Pemalang, Brebes, Batang	20	721.000.000 (APBD)	Rembang, Semarang	22	793.000.000 (APBD)	Klaten, Boyolali, Karanganyar	24	872.000.000 (APBD)	Magelang, Wonosobo	-	960.000.000 (APBD)	Brebes, Cilacap, Klaten
18	550.000.000 (APBD)	35 Kab/Kota	20	605.000.000 (APBD)	35 Kab/Kota	22	665.500.000 (APBD)	35 Kab/Kota	24	732.000.000 (APBD)	35 Kab/Kota	-	805.000.000 (APBD)	35 Kab/Kota

Bab 9

PENUTUP

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah merupakan bagian dalam rencana Strategis tahun 2008- 2013, dengan mencakup Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun anggaran pada kurun waktu lima tahun (tahun 2008 - 2013). Sasaran dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, implementasi penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Rencana Kerja, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. RJM Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013 ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan kualitas pelayanan dasar dan tugas sehari-hari, baik program, proyek dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Daya Saing Ekonomi Rakyat serta mewujudkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, seerasi, seimbang

dan berkualitas sesuai dengan RPJMD II Provinsi Jawa Tengah (2010 – 2014).

Pelaksanaan program-program dalam Renstra sangat terkait dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah. Saat ini, penyelenggaraan pemerintahan daerah menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan desentralisasi, karena pertimbangan kepentingan nasional dan efektivitas pemerintahan. Pelaksanaan asas dekonsentrasi oleh pemerintah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Pelaksanaan dekonsentrasi bertujuan untuk:

1. Memelihara keutuhan dan integrasi nasional.
2. Melaksanakan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah.
3. mewujudkan keserasian hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah.
4. Mengidentifikasi potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah.
5. Mencapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik, khususnya di bidang kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

Hal tersebut untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat. Tercapainya pembangunan kelautan dan perikanan tersebut seiring dengan catatan dan harapan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mengenai kegiatan-kegiatan:

- a. Rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut / pesisir baik dengan penanganan fisik maupun vegetasi serta meningkatkan pengetahuan,

kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian ekosistem/lingkungan;

- b. Peningkatan produksi perikanan tangkap, melalui serangkaian kegiatan perbaikan prasarana, paket-paket bantuan yang bersifat ramah lingkungan serta optimalisasi potensi pantai selatan Jawa Tengah;
- c. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui serangkaian kegiatan berbasis CBF (Culture Bases Fisheries), optimalisasi produksi benih ikan serta pengembangan kawasan budidaya sesuai keunggulan komoditas lokal; dan
- d. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan untuk meningkatkan mutu produk, teknologi, sanitasi dan higienis agar dapat memenuhi persyaratan mutu ekspor maupun pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Lampiran 1:

Data Perkembangan Kegiatan Perikanan tahun 2000 – 2008

URAIAN	TAHUN									% RERATA PERKEMB
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	(2000 – 2008)
PERIKANAN TANGKAP										
Produksi (Ton)	280,049.70	294,345.50	301,838.50	250,568.20	260,832.10	208,763.40	199,115.30	169,690.40	183,044.81	-3.97
Nilai (Rp 1.000,00)	1,172,669,281.00	1,145,643,513.00	1,252,748,642.00	865,525,340.00	944,167,328.00	922,177,539.00	866,705,262.00	885,915,483.60	912,276,314.73	1.72
PERIKANAN BUDIDAYA										
Produksi (Ton)	70,434.40	81,996.20	78,689.80	88,749.90	90,699.20	90,457.28	101,080.90	114,007.80	166,568.00	11.76
Nilai (Rp 1.000,00)	927,863,769.00	974,260,661.00	874,818,401.00	875,648,455.00	982,443,830.00	984,405,768.00	1,190,388,736.00	1,305,231,253.00	1,631,578,798.00	10.54
PERIKANAN TOTAL										
Produksi (Ton)	350,484.10	376,341.70	380,528.30	339,318.10	351,531.30	299,220.68	300,196.20	283,698.20	349,613.81	0.02
Nilai (Rp 1.000,00)	2,100,533,050.00	2,119,904,174.00	2,127,568,043.00	1,741,173,795.00	1,926,611,159.00	1,906,583,307.00	2,057,093,998.00	2,191,146,746.60	2,543,855,112.73	5.36
PERKEMBANGAN										
Produksi (%)	-4.26	7.38	1.11	-10.83	3.60	-14.88	0.33	-5.50	23.23	
Nilai (%)	24.96	0.82	0.36	-18.16	10.65	-1.04	7.89	6.52	16.10	
KONTRIBUSI PRODUKSI										
PERIKANAN TANGKAP	79.90	78.21	79.32	73.84	74.20	69.77	66.33	59.81	52.36	-4.79
PERIKANAN BUDIDAYA	20.10	21.79	20.68	26.16	25.80	30.23	33.67	40.19	47.64	11.98
KONTRIBUSI NILAI										
PERIKANAN TANGKAP	55.83	54.04	58.88	49.71	49.01	48.37	42.13	40.43	35.86	-4.88
PERIKANAN BUDIDAYA	44.17	45.96	41.12	50.29	50.99	51.63	57.87	59.57	64.14	5.20

Data Perkembangan Kegiatan Perikanan tahun 2000 – 2008 (lanjutan)

URAIAN	TAHUN									% RERATA PERKEMB
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	(2000 – 2008)
PERIKANAN BUDIDAYA										
BUDIDAYA AIR PAYAU										
PERIKANAN TAMBAK										
Produksi (Ton)	42.487.70	48.588.60	49.786.40	58.008.40	57.283.80	52.381.30	58.835.40	67.818.20	63.606.60	5.32
Nilai (Rp 1.000,00)	683.717.061.00	701.689.025.00	636.638.603.00	621.665.526.00	684.087.428.00	671.877.425.00	836.362.435.00	884.643.608.00	666.334.152.00	4.21
BUDIDAYA AIR TAWAR										
PERIKANAN KOLAM										
Produksi (Ton)	21.095.60	25.062.10	22.055.30	22.847.30	23.424.00	25.358.70	28.236.00	34.618.80	41.345.30	10.35
Nilai (Rp 1.000,00)	173.848.038.00	213.210.835.00	184.529.400.00	186.258.879.00	189.905.030.00	228.832.957.00	260.627.286.00	330.042.674.00	416.886.008.00	14.18
PERIKANAN SAWAH										
Produksi (Ton)	1.128.10	1.688.20	1.800.30	2.165.40	3.343.70	2.338.90	3.930.90	2.051.00	51.016.00	275.28
Nilai (Rp 1.000,00)	18.236.816.00	13.506.584.00	18.548.205.00	23.761.634.00	28.874.468.00	22.968.780.00	26.143.482.00	18.557.877.00	450.144.628.00	250.02
PERIKANAN KARAMBA										
Produksi (Ton)	5.722.00	6.657.30	5.047.80	5.728.80	6.637.70	7.112.20	7.446.80	7.663.80	8.352.70	8.18
Nilai (Rp 1.000,00)	41.061.853.00	45.854.217.00	35.102.183.00	43.961.416.00	68.566.902.00	58.865.615.00	65.989.648.00	68.752.434.00	96.942.483.00	14.34
BUDIDAYA AIR LAUT										
Produksi (Ton)	-	-	-	-	-	3.248.28	2.531.80	1.854.00	2.248.40	-8.19
Nilai (Rp 1.000,00)	-	-	-	-	-	1.624.140.00	1.265.875.00	1.234.560.00	1.271.525.00	-7.18
BUDIDAYA LAINNYA										
Produksi (Ton)	-	-	-	-	-	15.80	-	-	-	
Nilai (Rp 1.000,00)	-	-	-	-	-	135.851.00	-	-	-	

Data Perkembangan Kegiatan Perikanan tahun 2000 – 2008 (lanjutan)

URAIAN	TAHUN									% RERATA PERKEMB (2000 – 2008)
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
PERIKANAN TANGKAP										
PERIKANAN LAUT										
Produksi (Ton)	261.269,80	274.809,10	281.267,00	236.235,00	244.389,50	182.586,50	182.394,90	153.698,40	166.532,60	-4,96
Nilai (Rp 1.000,00)	1.071.310,108,00	1.035.984,862,00	1.122.530,171,00	773.621,116,00	836.661,634,00	818.450,925,00	776.600,445,00	764.646,086,00	783.194,529,13	-0,12
PERAIRAN UMUM										
Produksi (Ton)	18.779,90	19.536,40	20.571,50	14.334,20	16.442,60	16.176,90	16.720,40	15.992,00	16.512,21	-2,83
Nilai (Rp 1.000,00)	101.359,173,00	109.658,651,00	130.219,471,00	91.904,224,00	107.505,695,00	103.726,614,00	113.873,371,00	121.269,407,60	119.081,785,60	3,07
EKSPOR										
VOLUME (Kg)	12.792.032,51	13.203.124,90	14.542.669,26	17.118.728,15	20.603.545,02	16.743.424,72	17.064.736,82	19.938.399,15	17.944.559,24	7,35
NILAI (US \$)	55.698,336,78	53.955,274,82	60.072,787,56	56.628,982,56	89.659,296,20	70.179,307,99	70.614,933,33	74.643,244,22	67.178,919,80	6,49
KONSUMSI IKAN (kg/kapita/th)	9,79	10,48	12,09	10,18	9,99	9,47	13,76	14,00	15,83	7,46
PENDAPATAN PERKAPITA										
PERIKANAN TANGKAP										
Nilai (Rp 1000)	1.172.669,281,00	1.145.643,513,00	1.252.749,642,00	865.525,340,00	944.167,329,00	922.177,539,00	866.705,262,00	885.915,493,60	912.276,314,73	-2,24
Jumlah nelayan (Orang)	147.871,00	151.187,00	161.165,00	204.873,00	203.684,00	222.688,00	167.173,00	198.837,00	176.969,00	3,47
Pendapatan (Rp/Kap/Th)	7.930,353,36	7.577,658,88	7.773,087,47	4.224,692,08	4.635,451,63	4.141,119,14	5.184,481,12	4.455,486,12	5.155,006,33	-2,70
NELAYAN PERIKANAN LAUT										
Nilai (Rp 1000)	1.071.310,108,00	1.035.984,862,00	1.122.530,171,00	773.621,116,00	836.661,634,00	818.450,925,00	776.600,445,00	764.646,086,00	783.194,529,13	-2,87
Jumlah nelayan (Orang)	95.514,00	103.484,00	120.957,00	167.072,00	172.418,00	191.968,00	144.858,00	168.115,00	146.422,00	7,06
Pendapatan (Rp/Kap/Th)	11.216,262,62	10.011,063,18	9.280,406,85	4.630,465,40	4.852,519,08	4.263,475,81	5.361,115,33	4.548,351,34	5.417,181,36	-5,73
PERAIRAN UMUM										
Nilai (Rp 1.000)	101.359,173,00	109.658,651,00	130.219,471,00	91.904,224,00	107.505,695,00	103.726,614,00	113.873,371,00	121.269,407,60	119.081,785,60	3,18
Jumlah nelayan (Orang)	52.357,00	47.703,00	40.208,00	37.801,00	31.266,00	30.720,00	22.315,00	30.722,00	30.547,00	-4,98
Pendapatan (Rp/Kap/Th)	1.935,924,00	2.298,778,92	3.238,645,82	2.431,264,36	3.438,421,77	3.376,517,38	5.102,996,68	3.947,314,88	3.898,313,60	12,70

Data Perkembangan Kegiatan Perikanan tahun 2000 – 2008 (lanjutan)

URAIAN	TAHUN									% RERATA PERKEMB. (2000 – 2008)
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
PENDAPATAN PERKAPITA										
PERIKANAN BUDIDAYA										
Nilai (Rp 1.000)	927.863.769.00	974.260.661.00	874.818.401.00	875.648.455.00	982.443.830.00	982.645.777.00	1.189.122.861.00	1.303.996.683.00	1.324.632.327.80	4.92
Jumlah pembudidaya (Orang)	698.686.00	731.937.00	704.324.00	673.408.00	656.046.00	642.936.00	666.938.00	574.229.00	642.026.00	-0.79
Pendapatan (Rp/Kap/Th)	1.328.012.54	1.331.071.75	1.242.068.14	1.300.323.81	1.497.522.78	1.528.372.62	1.782.958.63	2.270.865.27	2.063.206.67	6.29
PEMBUDIDAYA TAMBAK										
Nilai (Rp 1.000)	683.717.061.00	701.689.025.00	636.638.603.00	621.665.526.00	684.097.429.00	671.977.425.00	836.382.435.00	884.643.608.00	718.417.681.60	1.118
Jumlah pembudidaya (Orang)	108.785.00	115.295.00	108.720.00	121.790.00	121.795.00	116.195.00	123.195.00	123.835.00	116.205.00	1.01
Pendapatan (Rp/Kap/Th)	6.376.955.10	6.086.031.70	5.855.763.46	5.104.405.34	5.688.899.21	5.783.187.10	6.788.931.65	7.143.728.41	6.182.330.21	0.14
PEMBUDIDAYA KOLAM										
Nilai (Rp 1.000)	173.848.039.00	213.210.835.00	184.529.400.00	186.259.879.00	189.905.030.00	228.832.957.00	260.627.296.00	330.042.674.00	471.069.709.40	14.48
Jumlah pembudidaya (Orang)	494.466.00	550.986.00	540.180.00	496.356.00	481.089.00	475.875.00	481.203.00	413.328.00	476.520.00	-0.06
Pendapatan (Rp/Kap/Th)	351.587.45	386.962.35	341.607.24	375.254.61	394.739.91	480.867.78	541.616.11	798.500.64	988.562.30	14.88
PEMBUDIDAYA SAWAH										
Nilai (Rp 1.000)	19.236.816.00	13.506.584.00	18.548.205.00	23.761.634.00	29.874.469.00	22.969.780.00	26.143.482.00	19.557.977.00	20.947.992.80	4.25
Jumlah pembudidaya (Orang)	91.251.00	63.244.00	49.646.00	49.582.00	47.268.00	46.514.00	58.154.00	34.030.00	44.942.00	-5.37
Pendapatan (Rp/Kap/Th)	210.812.11	213.563.09	373.609.25	479.239.12	632.023.12	493.825.08	449.556.04	574.727.51	466.111.72	14.31
PEMBUDIDAYA KARAMBA										
Nilai (Rp 1.000)	41.061.853.00	45.854.217.00	35.102.193.00	43.961.416.00	68.566.902.00	58.865.615.00	65.989.648.00	69.752.434.00	114.196.944.00	17.10
Jumlah pembudidaya (Orang)	4.184.00	2.412.00	5.778.00	5.680.00	5.894.00	4.352.00	4.386.00	3.036.00	4.359.00	10.84
Pendapatan (Rp/Kap/Th)	9.814.018.40	19.010.869.40	6.075.145.90	7.739.685.92	11.633.339.33	13.526.106.39	15.045.519.38	22.975.110.01	26.197.968.34	24.70
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10.165.964.791.00	9.615.047.288.00	7.194.832.988.00	7.962.766.741.00	13.939.107.285.00	13.296.539.921.00	12.611.926.26	13.731.076.23	16.938.108.11	-2.14

Lampiran 2:

Data Perkembangan Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya tahun 2000 - 2008

U R A I A N	TAHUN									% RERATA
										PERKEMB.
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	(2000 – 2008)
KAKAP	309.70	652.20	680.30	735.70	622.10	426.70	410.70	517.00	30.80	0.54
UDANG WINDU	3,948.00	3,856.90	2,894.50	2,803.50	4,601.20	5,387.10	5,817.60	6,325.00	3,336.60	2.53
UDANG PUTIH	4,956.40	6,094.70	5,341.40	6,387.60	5,972.40	4,308.30	5,704.80	8,795.00	6,947.80	7.68
KEPITING/RAJUNGAN	223.70	384.90	369.40	478.30	798.60	788.30	635.40	851.00	872.40	22.53
BANDENG	24,376.30	28,341.40	29,952.60	36,569.80	35,777.80	33,649.00	36,385.50	39,428.00	45,364.70	8.43
GURAME	5,060.50	6,691.30	4,026.10	3,993.50	3,362.40	3,596.90	3,138.80	4,222.00	5,410.10	4.08
NILA	6,572.60	7,705.40	6,982.30	8,069.30	12,705.00	9,859.20	11,686.00	12,362.00	14,094.70	12.10
MAS	3,620.30	3,997.20	3,073.70	3,375.70	5,435.30	3,830.80	4,639.00	4,564.00	5,512.90	8.61
LELE	6,259.60	7,588.30	7,758.50	8,944.20	10,241.90	11,528.80	12,648.00	14,960.00	23,072.10	18.50
JUMLAH	55,327.10	65,312.30	61,078.80	71,357.60	79,516.70	73,375.10	81,064.60	92,024.00	104,642.10	8.73

Lampiran 3:

Data Sasaran Kegiatan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2013

JENIS SASARAN	Target Peningkatan	SASARAN TARGET PADA TAHUN					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ekspor Produk Perikanan (Kg)	5,10%/th	17.944.559,24	18.859.731,76	19.821.578,08	20.832.478,56	21.894.934,97	23.011.576,65
Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1,00%/th	183.044,81	184.875,26	186.724,01	188.591,25	190.477,16	192.381,93
Pendapatan Nelayan per kap/th (Rp1000)	0,93%/th	5.155,01	5.202,95	5.251,34	5.300,18	5.349,47	5.399,22
Produksi Perikanan Budidaya (ton)	6,62%/th	166.569,00	177.595,87	189.352,72	201.887,87	215.252,85	229.502,59
Pendapatan Pembudidaya Ikan per kap/th (Rp1000)	6,59%/th	2.541,30	2.708,77	2.887,28	3.077,55	3.280,36	3.496,54
Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	2,40%/th	15.88	16.28	16.65	17.05	17.46	17.88
Pendapatan Asli Daerah (Rp.1000)	10,00%/th	16.938.108,11	16.148.300,00	2.272.538,00	2.499.791,80	2.749.770,98	3.024.748,08

Lampiran 4:

Data Sasaran Kegiatan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2013

TAHUN	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir						
- Pelatihan Petani garam	25 org	50 org	50 org	50 org	75 org	250 org
- Pelatihan Wanita pesisir	125 org	150 org	150 org	175 org	200 org	800 org
- Pelatihan Taruna Pesisir	50 org	50 org	50 org	50 org	75 org	275 org
- Pelatihan Nelayan sekitar Reservaat	0 org	100 org	100 org	100 org	100 org	400 org
Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan						
- Penanaman Mangrove	149,000 btg	175,000 btg	200,000 btg	230,000 btg	263,500 btg	1,017,500 btg
- Penenggelaman TKB	0 unit	25 unit	50 unit	75 unit	75 unit	225 unit
- Transpalantasi karang	42 unit	48 unit	50 unit	50 unit	75 unit	265 unit
- Penebaran ikan di tambak	76,000 ekor	172,500 ekor	200,000 ekor	230,000 ekor	265,500 ekor	1,144,000 ekor
- Restocking ikan di perairan karang	0 ekor	10,900 ekor	10,000 ekor	10,000 ekor	10,000 ekor	40,900 ekor
- Restocking ikan di perairan umum/pedalaman	0 ekor	100,000 ekor	100,000 ekor	100,000 ekor	100,000 ekor	400,000 ekor
- Pemasangan Alat Pemecah Ombak (APO)	40 unit	80 unit	80 unit	80 unit	80 unit	360 unit
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan						
- Sosialisasi Peraturan Perundangan	0 org	50 org	75 org	75 org	100 org	300 org
- Pembinaan dan Pembentukan kelompok Pelestari Ekosistem Pesisir	0 klmpk	5 klmpk	5 klmpk	10 klmpk	10 klmpk	30 klmpk

Lampiran 5:

Data Sasaran Produksi Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2013

Komoditas Budidaya (ton)	Target Peningkatan	SASARAN PRODUKSI PADA TAHUN					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
UDANG WINDU	2%/th	3,336.60	3,403.33	3,471.40	3,540.83	3,611.64	3,683.88
UDANG PUTIH	6%/th	6,947.80	7,364.67	7,806.55	8,274.94	8,771.44	9,297.72
NILA	12%/th	14,094.70	15,786.06	17,680.39	19,802.04	22,178.28	24,839.68
BANDENG	4%/th	45,364.70	47,179.29	49,066.46	51,029.12	53,070.28	55,193.03
KAKAP	10%/th	30.80	30.95	31.11	31.26	31.42	31.58
KEPITING/RAJUNGAN	10%/th	872.40	959.64	1,055.60	1,161.16	1,277.28	1,405.01
MAS	8%/th	5,512.90	5,953.93	6,430.25	6,944.67	7,500.24	8,100.26
LELE	17%/th	23,072.10	26,994.36	31,583.40	36,952.58	43,234.51	50,584.38
GURAME	10%/th	5,410.10	5,626.50	5,851.56	6,085.63	6,329.05	6,582.21